

**Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
dan Daya Saing Sektor
Unggulan**

Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing Sektor Unggulan

**Amir Halid
Irawati Abdul
Tineke Wolok**



IP.021.05.2023

**Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Daya Saing
Sektor Unggulan**

Amir Halid
Irawati Abdul
Tineke Wolok

Pertama kali diterbitkan pada Mei 20223

Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110

Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI No. 001/GORONTALO/14

Tersedia di www.ideaspublishing.co.id

Cetakan pertama Juni 2023

ISBN: 978-623-234-292-7

Penyunting : Akhmad Fauzi Syam

Fadel Muhammad

Penata Letak : Chairunnisa Gandura

Desainer Sampul : Ilham Djafar

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik dan mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, maupun dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel	xi
Prakata	xvii

BAB 1

Profil Pertanian

A. Tanaman Pangan.....	9
B. Tanaman Perkebunan	12
C. Tanaman Hortikultural	13
D. Peternakan	14
E. Perikanan.....	16

BAB 2

Belajar dari Pengalaman

A. Pengalaman pada Perencanaan Wilayah	23
1. Model Komunikasi	24
2. Teori Terapan dan Kelemahannya	26
3. Gaya Hidup Urban	32
4. Ulasan	32
5. Kota Bijak.....	33
6. Kaitannya terhadap Pembangunan Wilayah.....	44
7. Teknik Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	47
8. Analisis LQ_{share} dan LQ_{Shift}	48
B. Teori Terapan	52
1. Wilayah.....	52
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	59
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61

BAB 3

Masalah Kemiskinan dan Faktor Reduksi Kemiskinan

A. Diskursus	65
B. Permasalahan	68
C. Pembahasan Provinsi Gorontalo	73
D. Faktor Reduksi Kemiskinan.....	76
E. Asimetri Unsur Pembentuk Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan.....	81
F. Simpulan	85

BAB 4

Daya Saing Sektor Pertanian

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo	87
1. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) PDRB	89
2. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} PDRB	91
3. Analisis Lokalisasi, Spesialisasi dan Basis PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	93
B. Pertanian dan Peternakan di Provinsi Gorontalo.....	95
1. Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo	98
2. Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo	100
3. Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo	103
4. Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo	105
5. Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo	107

BAB 5

Kebijakan Fiskal Sektor Pertanian

A. Kebijakan Fiskal.....	111
B. Kebijakan Fiskal dalam Peningkatan PPDRB Sektor Pertanian.....	113
C. Pengujian Parsial.....	117
D. Keuangan Daerah dan Rasio Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo	120
E. Reduksi Gini Ratio Melalui PDRB, Belanja Modal Fungsi Ekonomi dan Belanja Modal Fungsi Pariwisata dan Budaya.....	129
F. Kesenjangan Sektor Ekonomi tersebut terhadap Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten/Kota Kawasan Teluk Tomini.....	132

BAB 6

Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Barometer Perguruan Tinggi	141
B. Landasan Teori.....	145
C. Permasalahan	153
D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo	162
E. Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Pertanian di Provinsi Gorontalo	165
F. Solusi Alternatif	178
G. Strategi.....	183

Bab 7

Daya Saing dan Ekosistem Industri UMKM Unggulan

A. Kriteria Pemilihan Industri Unggulan	187
B. Penetapan Industri Unggulan Provinsi	191
C. Tahapan Pembangunan Industri	191
D. Pengembangan Perwilayahan Industri	211
E. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	236

F. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	243
G. Urgensi Industrialisasi Sektor Pertanian (UMKM) dalam Menurunkan Kemiskinan	245
H. Pemetaan UMKM di Provinsi Gorontalo yang Berada di Kawasan Teluk Tomini	249
Glosarium	257
Daftar Pustaka	267
Indeks	273
Tentang Penulis	275

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Persentase Tingkat Pendidikan Petani	2
Gambar 1.2	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Nasional vs Gorontalo	4
Gambar 1.3	Lahan Dikuasai untuk Usaha Pertanian	5
Gambar 1.4	Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem	6
Gambar 1.5	Luas Lahan yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian	8
Gambar 1.6	Jumlah Rumah Tangga yang Menguasai Bukan Lahan Pertanian	9
Gambar 1.7	NTP di Provinsi Gorontalo	20
Gambar 2.1	Dampak Investasi terhadap Pencapaian <i>Steady State</i>	38
Gambar 3.1	Kemiskinan di Provinsi Gorontalo	74
Gambar 3.2	Gini Ratio di Provinsi Gorontalo	75
Gambar 5.1	ICOR Provinsi Gorontalo Beserta Kabupaten/Kota	115
Gambar 5.2	Rasio Efektivitas PAD	122
Gambar 5.3	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	123
Gambar 5.4	Rasio Efektivitas Retribusi Daerah	125
Gambar 5.5	Rasio Efisiensi	126
Gambar 5.6	Rasio Keserasian	127
Gambar 5.7	Rasio Kemandirian	129
Gambar 6.1	IPM di Provinsi Gorontalo	164

Gambar 7.1	<i>Road Map</i> LIPI Provinsi Gorontalo 2017-2028-2028- 2017	190
Gambar 7.2	Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030	211

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Proporsi Produksi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo vs Nasional	9
Tabel 1.2	Proporsi Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Gorontalo vs Nasional	12
Tabel 1.3	Proporsi Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Gorontalo vs Nasional	14
Tabel 1.4	Proporsi Jumlah Peternakan Provinsi Gorontalo vs Nasional	15
Tabel 1.5	Proporsi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo vs Nasional	16
Tabel 1.6	NTP Provinsi Gorontalo vs Nasional	18
Tabel 3.1	Penduduk, Kemiskinan & Ketimpangan di Provinsi Gorontalo	73
Tabel 3.2	DDF dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan	76
Tabel 3.3	Sektor PDRB terhadap Kemiskinan Provinsi Gorontalo	81
Tabel 4.1	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) PDRB	89
Tabel 4.2	Hasil Analisis <i>LQ_{Share}</i> dan <i>LQ_{Shift}</i>	91
Tabel 4.3	Hasil Analisis Lokalisasi, Spesialisasi dan Basis PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	93

Tabel 4.4	Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo	98
Tabel 4.5	Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo	99
Tabel 4.6	Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo	101
Tabel 4.7	Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo	102
Tabel 4.8	Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo	103
Tabel 4.9	Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo	104
Tabel 4.10	Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo	105
Tabel 4.11	Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo	106
Tabel 4.12	Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo	107
Tabel 4.13	Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo	108
Tabel 5.1	Hasil Analisis ICOR Provinsi Gorontalo	113

Tabel 5.2	Hasil Analisis Regresi Berganda	115
Tabel 5.3	Hasil Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121
Tabel 5.4	Hasil Efektivitas Pajak Daerah	123
Tabel 5.5	Hasil Efektivitas Retribusi Daerah	124
Tabel 5.6	Hasil Efisiensi	125
Tabel 5.7	Hasil Rasio Keserasian	126
Tabel 5.8	Hasil Rasio Kemandirian	127
Tabel 5.9	Pengaruh PDRB, Belanja Modal Fungsi Ekonomi dan Belanja Modal Fungsi Pariwisata dan Budaya terhadap Gini Ratio	130
Tabel 5.10	Hasil Analisis Regresi Model <i>Fixed</i>	133
Tabel 5.11	Hasil Uji Hipotesis	136
Tabel 5.12	Hasil Uji Hipotesis Tiap Subsektor	137
Tabel 6.1	Peringkat Kampus Versi Webometrics	155
Tabel 6.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	163
Tabel 6.3	Hasil Analisis Regresi Berganda	166
Tabel 7.1	Industri Unggulan Provinsi Gorontalo	191
Tabel 7.2	Tahapan Pembangunan Industri Unggulan	192
Tabel 7.3	Program Pembangunan Industri Elektronika dan Telematika	195
Tabel 7.4	Program Pembangunan Industri Pembangkit Energi	195
Tabel 7.5	Program Pembangunan Industri Alat Transportasi	197

Tabel 7.6	Program Pembangunan Industri Pangan	200
Tabel 7.7	Program Pembangunan Industri Hulu Agro	204
Tabel 7.8	Program Pembangunan Industri Kimia Dasar	206
Tabel 7.9	Program Pembangunan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	208
Tabel 7.10	Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015 – 2035	213
Tabel 7.11	Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2017-2037	227
Tabel 7.12	Program Pengembangan SDA Industri Tahun 2017 – 2037	228
Tabel 7.13	Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2017 – 2037	231
Tabel 7.14	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2017-2037	233
Tabel 7.15	Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2017-2037	234
Tabel 7.16	Program Peningkatan Kerja Sama Tahun 2017-2037	235
Tabel 7.17	Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri Tahun 2017 – 2037	236
Tabel 7.18	Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2017-2037	237

Tabel 7.19	Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2017 – 2037	238
Tabel 7.20	Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Tahun 2015-2035	240
Tabel 7.21	Program Pengembangan Transportasi Tahun 2015 – 2035	241
Tabel 7.22	Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri Tahun 2015-2035	242
Tabel 7.23	Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri Tahun 2015-2035	242
Tabel 7.24	Program Pemberdayaan IKM Tahun 2015-2035	244
Tabel 7.25	Hasil Pengujian Hipotesis	245
Tabel 7.26	Rangkuman Keunggulan UMKM	249
Tabel 7.27	Rangkuman LQ_{Share} dan LQ_{Shift} UMKM	253

Prakata

Telah kita ketahui bersama penulisan naskah akademis mencapai suatu kelengkapan membutuhkan perenungan dan pengayaan yang di dasari oleh kesabaran dan tiada kata putus asa untuk terus menjelajahi bahtera dan ladang ke ilmuan sebagai manivestasi dari hasrat setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh sang penulis sehingga terhindar dari persepsi yang keliru bahwasanya buku itu hanya sebagai ungkapan ilmiah yang bersifat transendental saja atau dikenal sebagai Menara Gading di dunia akademik.

Buku ini mencapai hasil akhir pemikiran dan gagasan ekonomi dengan telaah dari beberapa studi kasus analisis baik pada skala nasional dan daerah sehingga mampu mengungkap temuan-temuan dalam analisis ekonomi baik yang bersifat faktual empirikal dan fenomenal ekonomi sebagai dampak dari adanya berbagai macam kejadian dan guncangan ekonomi terutama pada sektor produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto dimana pandangan normative bahwa perbedaan karakteristik antar-sektor dan antar-wilayah maka perubahan perekonomian antara lain inflasi, kebijakan fiska, kebijakan ketenaga kerjaan maka akan memberikan perubahan yang sama besar antar-wilayah. Namun kenyataannya dimana suatu kebijakan diterapkan sama maka berpotensi perubahan pertumbuhan antar-sektor dan antar-wilayah menjadi berbeda adanya.

Oleh Karena itu dibutuhkan identifikasi sumber-sumber atau komponen pertumbuhan wilayah yang mana lebih cepat dan atau lambat pertumbuhannya. Pada Kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi bagi semua pihak yang tak dapat saya sebut satu per satu namanya. Sehingga buku ini mencapai penulisan yang lengkap dalam perspektif kajian dan analisis ekonomi wilayah dengan keragaan kajiannya terutama di sektor pertanian yang kita ketahui bersama sebagai sektor yang paling dominan kontribusinya pada indikator pertumbuhan ekonomi baik nasional (PDB) dan daerah (PDRB).

Gorontalo, Mei 2023

Penulis

BAB 1

Profil Pertanian

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga dimana salah satu maupun lebih anggota keluarga yang mengolah usaha pertanian serta memiliki tujuan hasilnya dimanfaatkan secara pribadi atau dijual, kategori usaha pertanian yang dimaksud adalah usaha pertanian milik sendiri, bagi hasil maupun milik orang lain dengan ketentuan kuasa usaha dalam penerimaan upah, baik usaha hasil pertanian maupun usaha jasa pertanian. Pada sektor rumah tangga usaha pertanian tingkat pendidikan petani dikelompokkan dalam enam kelompok, diantaranya belum pernah sekolah, belum lulus SD, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, dan lulusan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan petani pada sektor rumah tangga usaha pertanian didominasi oleh kelompok lulusan SD, sementara kelompok petani dengan tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi masih tergolong sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa belum cukup terpenuhinya sumber daya manusia yang akan memengaruhi perkembangan dan keberlanjutan rumah tangga usaha pertanian. Sumber daya manusia masih menjadi faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan semua sektor.



Gambar 1.1 Persentase Tingkat Pendidikan Petani
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Menurut data SUTAS Badan Pusat Statistika pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga usaha pertanian menurut keadaan ekonomi dikelompokkan dalam tiga bagian, kelompok perekonomian baik, kelompok perekonomian sedang, dan kelompok perekonomian buruk. Persentase terbesar menurut keadaan ekonomi pada rumah tangga usaha pertanian oleh kelompok ekonomi sedang sebesar 68%. Fakta dan realita ini menandakan banyak rumah tangga usaha pertanian yang belum naik kelas pada keadaan ekonomi yang baik. Sehingga perlu untuk kita menelusuri lebih lanjut faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi rumah tangga usaha pertanian. Rumah tangga usaha pertanian diantaranya dikelompokkan menurut penggunaan lahan, dimana berdasarkan perbandingan data pada tahun 2013 dan 2018 jumlah rumah tangga pengguna lahan di Indonesia, dan jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia, dimana keduanya mengalami peningkatan yang signifikan.

Sementara data badan pusat statistika pada tahun 2018 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian dalam penggunaan lahan baik secara nasional maupun pada Provinsi Gorontalo. Pada presentasi pertumbuhan jumlah rumah tangga usaha pertanian penggunaan lahan Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan sebesar 10,69%, dan pada skala nasional mengalami pertumbuhan sebesar 5,71%. Kondisi ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan pada Provinsi Gorontalo lebih tinggi apabila dibandingkan dengan skala nasional. Namun hal ini juga mengindikasikan kontribusi pertumbuhan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan Provinsi Gorontalo sebesar 0,18% terhadap total pertumbuhan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan secara nasional. Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan terdapat istilah rumah tangga petani gurem. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga pertanian dengan penggunaan lahan yang menguasai lahan sebesar $< 0,50$ Ha. Jumlah pertumbuhan rumah tangga petani gurem pada skala nasional mengalami pertumbuhan dengan nilai 10,95% kondisi kenaikan pertumbuhan ini juga diikuti di Provinsi Gorontalo dengan tingkat kenaikan pertumbuhan sebesar 6,87%.



Gambar 1.2 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Nasional vs Gorontalo
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Data kenaikan pertumbuhan yang dialami pada rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan dan kelompok rumah tangga petani gurem menandakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan merupakan sektor yang potensial dalam perkembangan dan keberlanjutannya. Bila dilihat berdasarkan pengelompokan lahan yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian menurut kondisi lapangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 – 2018 didominasi oleh kelompok penguasaan lahan 0,50 Ha. Angka ini memperjelas bahwa rumah tangga petani gurem di Provinsi Gorontalo tergolong besar, pada pengelompokan lahan yang dikuasai lainnya yaitu 0,50 – 0,99 Ha, 1,00 – 1,99 Ha, 2,00 – 2,99 Ha, 3,00 – 3,99 Ha, 4,00 – 4,99 Ha, 5,00 – 9,99 Ha, dan pengelompokan luas lahan yang dikuasai pada jumlah $\geq 10,00$ Ha tergolong kecil. Kondisi yang sama juga terjadi pada skala nasional dimana golongan luas lahan yang dikuasai oleh petani rumah tangga gurem masih mendominasi jumlah lahan yang dikuasai yaitu 0,50

Ha. Diketahui bahwa total kontribusi penggunaan lahan oleh Provinsi Gorontalo sebesar 0,67% dari total jumlah penggunaan lahan secara nasional.

Berdasarkan data perbandingan ini dapat diasumsikan bahwa temuan hambatan pada perkembangan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan cenderung sama baik secara nasional maupun pada Provinsi Gorontalo.



Gambar 1.3 Lahan Dikuasai untuk Usaha Pertanian
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan data rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian dibedakan dalam dua alokasi, diantaranya pada lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Pada rata-rata luas lahan pertanian dibagi kembali pada dua bagian yaitu pada lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Baik di Provinsi Gorontalo maupun secara nasional rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah. Apabila ditelaah lebih dalam dalam jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan kategori luas lahan sawah yang dikuasai pada tahun

2018 dimana lahan sawah yang dikuasai oleh petani dengan luas $\geq 10,00$ Ha masih menjadi yang terendah, sementara pada luas lahan $> 0,50$ Ha tetap mendominasi rumah tangga usaha pertanian berdasarkan luas lahan sawah yang dikuasai. Dimana jumlah lahan sawah yang dikuasai untuk Provinsi Gorontalo terhadap total jumlah nasional sebesar 0,52%. Hal yang sama pada luas lahan bukan sawah yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian. Dimana luas lahan bukan sawah masih tetap didominasi oleh petani rumah tangga gurem baik di Provinsi Gorontalo maupun secara nasional, dimana jumlah lahan bukan sawah yang dikuasai untuk Provinsi Gorontalo sebesar 0,73% dari jumlah nasional. Tidak hanya pada luas lahan pertanian dan lahan bukan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian, hal serupa juga terjadi pada luas lahan bukan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian dan tetap didominasi oleh petani rumah tangga gurem dengan jumlah lahan yang dikuasai untuk Provinsi Gorontalo sebesar 0,50% dari total jumlah nasional.



Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem, 2013 dan 2018

Tingkat	Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem			
	2013	2018	Pertumbuhan	
			Absolut	%
Provinsi Gorontalo	40 959	43 771	2 812	6.87
Nasional	14 248 864	15 809 398	1 560 534	10.95

Sumber: SUTA 2018 (bps.go.id)

Pertumbuhan Jumlah Rumah Tangga usaha Pertanian Provinsi Gorontalo lebih kecil dibandingkan pertumbuhan Nasional

Gambar 1.4 Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kondisi pada tiga alokasi luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian cenderung sama, baik secara nasional maupun pada kondisi lapangan di Provinsi Gorontalo, dimana pada rata-rata penguasaan lahan oleh rumah tangga petani cenderung belum mengalami perkembangan yang signifikan terhadap penguasaan lahan yang lebih besar dalam rumah tangga usaha pertanian.

Rumah tangga usaha pertanian pada pengguna lahan pertanian sawah diketahui ikut mengalami pertumbuhan yang dilihat pada data produksi padi tahun 2016–2017. Peningkatan produksi padi yang terjadi disetiap tahun menandakan tingginya potensi pada rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan pertanian sawah. Peningkatan produksi padi baik secara nasional maupun di Provinsi Gorontalo turut menjadi perhatian pada rumah tangga usaha pertanian. Dalam peningkatan produksi padi oleh Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi sebesar 0,14 terhadap total peningkatan secara nasional. Apabila dibandingkan dengan luas panen padi ikut mengalami peningkatan baik secara nasional pada Provinsi Gorontalo, dengan jumlah kontribusi peningkatan oleh Provinsi Gorontalo sebesar 0,19%.

Keberhasilan maupun kinerja rumah tangga usaha pertanian dapat dilihat pada tingkat kesejahteraan petani. Sementara kesejahteraan petani dipengaruhi oleh nilai tukar petani atau NTP, dimana menurut data Badan Pusat Statistika pada tahun 2018 terjadi penurunan pada NTP petani di Provinsi Gorontalo, sementara pada skala nasional NTP mengalami

pertumbuhan sebesar 0,78%. Kondisi ini mengartikan adanya *gap* pada rumah tangga usaha pertanian, dimana tingkat pertumbuhan yang dialami pada rumah tangga usaha pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini ikut dipengaruhi oleh faktor secara internal maupun eksternal sehingga perlu untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan petani melalui rumah tangga usaha pertanian. Rumah tangga usaha pertanian berpotensi untuk mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang akan bersifat positif dan signifikan apabila diikuti dengan pengoptimalan berbagai faktor yang memengaruhi. Salah satu faktor yang sangat memengaruhi yaitu pada pengoptimalan sumber daya manusia. Hal ini jelas terbukti bahwa sektor pertanian berpotensi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang perlu untuk terus diprioritaskan. Penting untuk mengidentifikasi kesadaran kondisi ini bahwa sektor pertanian sangat memengaruhi perkembangan ekonomi, sehingga perlu untuk memetakan dan melakukan navigasi secara tepat, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan mencapai keberlanjutan.

Rata-Rata Luas Lahan yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Provinsi dan Jenis Lahan (m ²), 2018					
Tingkat	Lahan Pertanian			Lahan Bukan Pertanian	Rata-rata
	Sawah		Bukan Sawah		
	Irigasi	Non-Irigasi			
Provinsi Gorontalo	1 009,13	414,03	8 767,37	604,73	10 795,26
Nasional	927,07	880,9	5 490,86	492,7	7 791,54

Sumber: SUTA 2018 (bps.go.id)

Rata-rata Luas lahan untuk jenis lahan bukan sawah memiliki luas lahan yang lebih besar dibandingkan jenis lahan lainnya.

Gambar 1.5 Luas Lahan yang dikuasai Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 1.6 Jumlah Rumah Tangga yang Menguasai Bukan Lahan Pertanian

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun gambaran mengenai tren pertanian Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan nasional dijabarkan sebagai berikut ini:

A. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yaitu semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan bisa juga disebutkan sebagai *harga honda forzatanaman* paling utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk berikan konsumsi daya untuk badan. Tanaman pangan di Provinsi Gorontalo difokuskan pada 7 komoditi yakni padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Gambarnya yakni:

Tabel 1.1 Proporsi Produksi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo vs Nasional

No.	Tanaman Pangan	Tahun (disajikan dalam %)					Rata-Rata
		P-2017	P-2018	P-2019	P-2020	P-2021	
1.	Padi	0.42	0.36	0.42	0.44	0.44	0.41
2.	Jagung	3.43	3.33	3.61	3.79	3.28	3.49
3.	Kedelai	0.25	0.41	0.57	0.45	0.33	0.40
4.	Kacang Tanah	0.14	0.16	0.18	0.19	0.12	0.16

Tabel 1.1 Proporsi Produksi Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo vs Nasional

5.	Kacang Hijau	0.06	0.07	0.09	0.05	0.05	0.07
6.	Ubi Kayu	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
7.	Ubi Jalar	0.12	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06
Total		0.80	0.77	0.83	0.89	0.81	0.82

Sumber: Statistik BPS Provinsi Gorontalo & Nasional, 2022

Luas panen padi secara nasional terus mengalami peningkatan persentasinya, namun demikian di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan persentase pertumbuhan penduduk nasional yakni 1,3% dan Provinsi Gorontalo yakni 1,6% setiap tahun. Dengan demikian peningkatan luas panen padi masih dapat menjanjikan peluang pekerjaan bagi tenaga kerja petani yang notabene memiliki penyerapan paling tinggi secara nasional maupun di tingkat provinsi di Indonesia. Rumah tangga usaha pertanian pada pengguna lahan pertanian sawah diketahui ikut mengalami pertumbuhan. Peningkatan produksi padi yang terjadi disetiap tahun menandakan tingginya potensi pada rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan pertanian sawah. Peningkatan produksi padi baik secara nasional maupun di Provinsi Gorontalo turut menjadi perhatian pada rumah tangga usaha pertanian. Dalam peningkatan produksi padi oleh Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi sebesar 0,14% terhadap total peningkatan nasional.

Sementara untuk jagung Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan produksi jagung nasional. Jagung sebagai

komoditi unggulan Provinsi Gorontalo menjadi komoditas yang paling besar kontribusinya dalam klasifikasi tanaman pangan yang menjadi unggulan di Provinsi Gorontalo. Peningkatan dan penurunan jagung di Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung pada iklim yang terjadi, sehingga mitigasi risiko penanaman jagung perlu dioptimalkan hal ini terutama karena rata-rata produksi jagung selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan angka tren sebesar 0,76% yang tentu menjadi pekerjaan yang berat bagi pemerintah untuk memaksimalkan program yang mampu meningkatkan produksi jagung secara berkelanjutan.

Kemudian untuk kedelai memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,40% dari produksi nasional yang berarti bahwa memang produksi kedelai untuk Provinsi Gorontalo masih sangat minim atau kurang dari 1%. Peningkatan perbaikan mutu untuk kedelai di Provinsi Gorontalo perlu untuk dioptimalkan dengan berbagai perlakuan sehingga pada perajin tahu tempe di Provinsi Gorontalo akan lebih dominan menggunakan kedelai produksi lokal dalam kegiatan usahanya.

Sementara itu untuk komoditi kacang tanah memberikan kontribusi sebesar 0,12% dari produksi nasional, kacang hijau sebesar 0,05% dari produksi nasional, ubi kayu sebesar 0,01% dari produksi nasional serta untuk ubi jalar sebesar 0,06% dari produksi nasional. Komoditi ini meski dengan kontribusi yang kecil namun mampu untuk menjadi penopang dalam menjaga kerentanan pangan yang

terjadi di Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk komoditi ini agar memberikan manfaat ekonomi bagi petani yang ada di Provinsi Gorontalo.

B. Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.

Tabel 1.2 Proporsi Produksi Tanaman Perkebunan Provinsi Gorontalo vs Nasional

No.	Lap. Usaha	Tahun (disajikan dalam %)					Rata-Rata
		P-2017	P-2018	P-2019	P-2020	P-2021	
1.	Kelapa Sawit	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
2.	Kelapa	1.62	2.07	2.14	2.36	2.27	2.09
3.	Kopi	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02
4.	Kakao	0.59	0.64	0.59	0.47	0.48	0.55
5.	Tebu	1.13	2.40	2.40	2.39	2.13	2.09
Total		0.19	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24

Sumber: Statistik BPS Provinsi Gorontalo & Nasional, 2022

Tanaman perkebunan di Provinsi Gorontalo yang mampu memberikan kontribusi produksi yang cukup besar bagi nasional yakni kelapa dan tebu masing-masing sebesar 2,09% dibandingkan skala nasional. Kedua komoditi ini menjadi sangat besar produksinya di Provinsi Gorontalo karena Provinsi Gorontalo memiliki beberapa perusahaan kelapa dan 1 pabrik

tebu yang telah dibangun pada era Presiden Soeharto. Produksi untuk kelapa pada tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Kemudian untuk tebu mengalami kenaikan pada tahun 2017-2019 namun turun pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berbagai optimalisasi perlu dilakukan termasuk peremajaan kelapa agar terjadi peningkatan produksi secara konsisten.

Kemudian untuk tanaman kakao cukup meningkat karena tanaman ini menjadi program unggulan dari Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dimana kedua kabupaten ini memiliki produksi tanaman kakao yang cukup besar. Sementara itu untuk sawit dan kopi masih belum maksimal, dimana kabupaten yang fokus dengan sawit adalah Kabupaten Boalemo bagian Wonosari, Paguyaman dan Dulupi sementara itu untuk kopi dikembangkan oleh Kabupaten Bone Bolango yang dikenal dengan produk kopi pinogu.

C. Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudiyakan untuk keperluan harian dari masyarakat, dimana produksi hortikultura bisa berupa sayur mayur. Tanaman ini sangat penting ketersediaannya karena merupakan pangan pelengkap dalam rumah tangga.

Tabel 1.3 Proporsi Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Gorontalo vs Nasional

No.	Lap. Usaha	Tahun (disajikan dalam %)					Rata-Rata
		P-2017	P-2018	P-2019	P-2020	P-2021	
1.	Bawang Merah	0.09	0.09	0.04	0.03	0.02	0.05
2.	Cabe Rawit	1.07	1.94	1.52	0.98	0.89	1.28
3.	Tomat	0.03	0.32	0.35	0.25	0.25	0.24
4.	Petsai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.50	0.61	0.48	0.32	0.28	0.44

Sumber: Statistik BPS Provinsi Gorontalo & Nasional, 2022

Tanaman hortikultura difokuskan pada 4 komoditas yang senantiasa dibutuhkan dan terus adanya produksi di Provinsi Gorontalo, dari hasil perhitungan kontribusi ditemukan bahwa cabe rawit menjadi komoditi yang sangat memberikan kontribusi besar dalam produksi nasional dimana nilai kontribusinya sebesar 1,28%. Sementara itu untuk komoditi kedua adalah tomat yang merupakan komoditi yang harganya sangat berfluktuasi terutama mulai pada puasa ramadhan. Kemudian untuk bawang merah dan petsai memiliki kontribusi yang cenderung turun, sehingga masih perlu untuk dioptimalkan dengan berbagai upaya oleh pemerintah melalui penyuluh pertanian di setiap Kecamatan di Provinsi Gorontalo.

D. Peternakan

Komoditas jenis peternakan meliputi ternak hidup termasuk daging, susu, dan pakannya. Ragam dari jenis komoditas ini mencakup sapi, ayam, kambing, daging

sapi, daging ayam, daging kambing, susu sapi, susu kambing, pakan ternak, dan lainnya.

Tabel 1.4 Proporsi Jumlah Peternakan Provinsi Gorontalo vs Nasional

No.	Lap. Usaha	Tahun (disajikan dalam %)					Rata-Rata
		P-2017	P-2018	P-2019	P-2020	P-2021	
1.	Sapi Potong	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14
2.	Kuda	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
3.	Kambing	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
4.	Babi	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
5.	Ayam Kampung	0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06
6.	Ayam Petelur	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
7.	Ayam Pedaging	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
8.	Itik	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total		0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Sumber: Statistik BPS Provinsi Gorontalo & Nasional, 2022

Komoditi peternakan cenderung meningkat kontribusi jumlahnya dibanding nasional dari tahun 2017-2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Komoditi dengan kontribusi terhadap nasional yang tertinggi adalah sapi potong, dimana untuk Provinsi Gorontalo sendiri pada tahun 2022 sebanyak 256 ekor sapi dijual di Kalimantan, yang menandakan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki surplus ketersediaan sapi potong untuk keperluan ketahanan pangan provinsi. Sementara itu kontribusi terbesar kedua adalah jenis unggas yakni ayam kampung atau ayam buras, dimana ayam kampung ini banyak dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Gorontalo yang semakin meningkat

terutama dapat dilihat dari banyaknya rumah makan di Provinsi Gorontalo dengan menu andalan adalah ayam kampung. Sementara itu komoditi peternakan lainnya memiliki kontribusi yang kecil atau masih kurang dari 0,05% yang tentu harus adanya optimalisasi bantuan ternak untuk kepentingan populasi ternak yang lebih banyak di Provinsi Gorontalo dan berimplikasi pada kesejahteraan peternak.

E. Perikanan

Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun korporasi dalam bidang usaha perikanan.

Tabel 1.5 Proporsi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo vs Nasional

No.	Lap. Usaha	Tahun			
		P-2019	P-2020	P-2021	Rata-Rata
1.	Cakalang	2.40	3.82	2.85	3.02
2.	Tongkol	2.33	2.36	2.13	2.27
3.	Tuna	8.77	12.36	6.78	9.30
4.	Udang Laut	0.00	0.01	0.00	0.00
5.	Patin	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Lele	0.35	0.36	0.32	0.34
7.	Nila	0.51	0.69	0.61	0.61
8.	Ikan Mas	0.06	0.05	0.10	0.07
9.	Kakap	0.08	0.00	0.09	0.06
10.	Bandeng	2.48	1.82	2.24	2.18

Tabel 1.5 Proporsi Produksi Perikanan Provinsi Gorontalo vs Nasional

11.	Rumput Laut	0.10	0.14	0.09	0.11
12.	Kerapu	0.40	0.22	0.46	0.36
13.	Udang Budi daya	1.39	1.61	1.10	1.37
Total		0.64	0.83	0.59	0.69

Sumber: Statistik BPS Provinsi Gorontalo & Nasional, 2022

Provinsi Gorontalo memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang tentu menjadi gambaran potensi ekonomi bagi masyarakat wilayah pesisir. Provinsi Gorontalo sendiri memiliki 2 lautan yang mampu menghasilkan sektor perikanan yakni Teluk Tomini dan Laut Sulawesi, dimana untuk kedua laut ini Teluk Tomini menjadi isu pengembangan yang terus dioptimalkan dalam penelitian dan pengabdian bagi dosen Universitas Negeri Gorontalo. Sektor perikanan yang produksinya paling besar bagi perikanan nasional adalah ikan tuna dengan kontribusi sebesar 9,30% dari produksi nasional. Sementara itu untuk komoditi unggulan lainnya adalah ikan cakalang, tongkol, bandeng dan udang vaname. Berbagai produksi ini tentu akan membuat posisi Gorontalo sebagai penghasil ikan akan semakin kuat di kawasan Teluk Tomini.

Optimalisasi pada sektor pertanian tentu akan membawa dampak kesejahteraan bagi petani, dimana kesejahteraan tersebut terlihat dari besarnya nilai tukar petani (NTP) yang akan menjadi lebih optimal jika petani memiliki NTP yang diatas 100%. Hasil NTP Provinsi Gorontalo yang kemudian dibandingkan dengan NTP nasional bisa menjadi gambaran

bagaimana posisi Provinsi Gorontalo dibandingkan nasional.

Tabel 1.6 NTP Provinsi Gorontalo vs Nasional

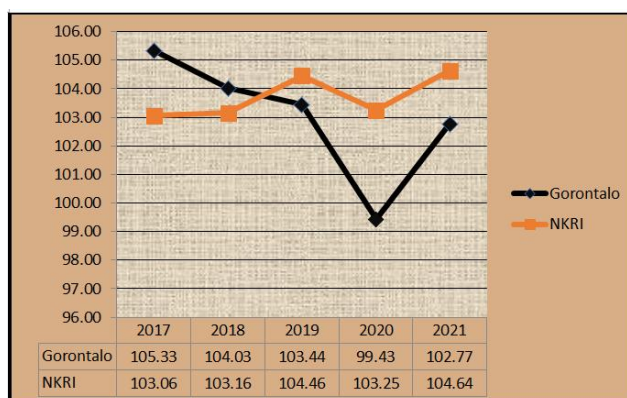
No.	Bulan	Nilai Tukar Prtani/NTP (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Januari	105.59	103.91	103.54	99.04	101.34
2.	Februari	105.32	103.93	104.21	98.71	100.40
3.	Maret	104.43	103.10	103.59	99.04	100.01
4.	April	105.09	102.60	101.94	98.55	101.43
5.	Mei	105.60	103.33	102.38	99.09	102.55
6.	Juni	105.22	103.68	101.90	98.26	102.76
7.	Juli	103.79	103.81	103.83	99.54	103.54
8.	Agustus	105.37	104.67	105.12	99.32	103.35
9.	September	105.48	105.71	104.74	99.70	104.54
10.	Oktober	106.23	105.14	102.96	100.18	103.28
11.	November	106.50	104.53	102.26	100.56	104.39
12.	Desember	105.38	103.91	104.83	101.13	105.59
Rata-Rata NTP Gorontalo		105.33	104.03	103.44	99.43	102.77
NTP Indonesia		103.06	103.16	104.46	103.25	104.64

Sumber: Statistik BPS Provinsi Gorontalo & Nasional, 2022

Keberhasilan maupun kinerja rumah tangga usaha pertanian dapat dilihat pada tingkat kesejahteraan petani. Sementara kesejahteraan petani dipengaruhi oleh nilai tukar petani atau NTP, dimana menurut data Badan Pusat Statistika pada tahun 2022 terjadi penurunan pada NTP petani di Provinsi Gorontalo yakni dari 105,33% pada tahun 2017 menjadi 102,77% pada tahun 2021 bahkan pada tahun 2020 nilai NTP Provinsi Gorontalo rata-ratanya sebesar 99,43% yang gradenya buruk karena kurang dari 100%, sementara pada skala nasional NTP mengalami pertumbuhan sebesar 1,58% dari tahun 2017 ke tahun 2022. Kondisi ini mengartikan adanya *gap* pada rumah tangga usaha pertanian, dimana tingkat pertumbuhan yang dialami pada rumah tangga usaha pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini ikut dipengaruhi oleh faktor secara internal maupun eksternal sehingga perlu untuk memberikan perhatian

yang cukup terhadap kesejahteraan petani melalui rumah tangga usaha pertanian. Rumah tangga usaha pertanian berpotensi untuk mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang akan bersifat positif dan signifikan apabila diikuti dengan pengoptimalan berbagai faktor yang memengaruhi, salah satu faktor yang sangat memengaruhi yaitu pada pengoptimalan sumber daya manusia. Hal ini jelas terbukti bahwa sektor pertanian sangat potensial terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang harus terus di prioritaskan. Penting untuk mengidentifikasi kesadaran kondisi ini bahwa sektor pertanian sangat memengaruhi perkembangan ekonomi, sehingga perlu untuk memetakan dan melakukan navigasi secara tepat, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitan sebagai indikator kesejahteraan petani, penyempurnaan penghitungan NTP perlu dilakukan melalui pendekatan nilai yaitu dengan memasukkan unsur kuantitas sehingga NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran.



Gambar 1.7 NTP di Provinsi Gorontalo
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Nilai tukar petani (NTP) di Provinsi Gorontalo cenderung menurun bahkan pada tahun 2020 mengalami keadaan yang kurang baik karena di bawah angka 100%. Sementara dibandingkan dengan nilai NTP nasional ditemukan bahwa adanya kecenderungan NTP nasional masih lebih baik. Nilai NTP rata-rata selama 5 tahun terakhir ini berada di angka yang lebih dari 100% yang artinya petani mengalami surplus atas usaha tani yang dilakukan. Namun jika NTP tersebut dalam unsur biayanya terdapat nilai biaya hidup yang dikeluarkan oleh petani selama melakukan usaha tani (menunggu hasil) dari proses pengolahan tanah hingga panen maka nilainya masih sangat kecil, yang pada akhirnya nilai NTP yang tinggi ini tidak sejalan dengan kesejahteraan petani, dimana sektor pertanian masih menjadi penyumbang tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami

penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Dalam hal ini usaha tani belum mampu untuk memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dan menjadi gambaran bahwa kurang maksimalnya usaha tani.

Pada hasil perhitungan NTP dapat dilihat bahwa NTP cenderung naik atau mulai sejahtera, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa usaha tani menjadi penyumbang terbesar dalam struktur kemiskinan di Provinsi Gorontalo. NTP terkadang belum menunjukkan aspek kesejahteraan yang sesungguhnya di lapangan. Hasil yang kurang maksimal dari nilai NTP ini sesuai dengan pernyataan dari Rachmat (2013) bahwa konsep penghitungan NTP yang didasarkan kepada kuantitas yang tetap (*indeks Laspeyres*) belum sepenuhnya merupakan indikator kesejahteraan petani. Kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani. Kenaikan harga yang diterima petani justru mengindikasikan kelangkaan suplai/produksi pertanian. Konsep pengukuran NTP juga tidak mengakomodasikan perkembangan produktivitas, kemajuan teknologi dan pembangunan.

BAB 2

Belajar dari Pengalaman

A. Pengalaman pada Perencanaan Wilayah

Buku *Arah Baru dalam Teori Perencanaan* (Susan S. Fainstein) pada dekade terakhir ini, telah menjadi saksi sebuah penggambaran kembali diskusi secara teori di dalam disiplin perencanaan. Di ilhami oleh kritik kultur pos modernis dan gerakan para ahli filsafat dari logika positif menuju kesuatu perhatian yang mendasar dengan etika dan kebijakan publik. Teori perencanaan telah dipolakan lagi perdebatan dengan metode dan program meliputi isu-isu pembicaraan dan sejenisnya. Pada tahun 70-an dan 80-an analisis sains positif disokong perdebatan advokasi pada materi ekonomi politik. Meskipun bagian perdebatan mereka tetap berlanjut, isu lain yang nampak pada definisi mengarah pada akhir teori perencanaan. Saat ini perbedaan pendapat mengarah pada kegunaan dan penyampaian Mazhab Habermas secara rasional, dampak desain fisik pada manfaat sosial (sebuah perdebatan lama muncul lagi) dan menekankan pada pendekatan ekonomi politik pos-marsisme, dimana cakupannya lebih rumit dari sudut pandang struktur sosial dan manfaat sosial dari pada di impian dengan analisis materi.

Pada artikel ini, saya menelaah dan mengkritik teori perencanaan *contemporer* dalam hal ketidakgunaan. Dipetunjuk yang saya percayai menjadi pertanyaan, apakah mungkin penyebarluasan dan pengembangan kualitas hidup manusia secara sadar kedalam kontek ekonomi politik *capital global*? Saya menelaah ada tiga pendekatan sebagai awal dari tulisan ini yaitu:

1. Model Komunikasi

Model komunikasi diilustrasikan melalui dua pendekatan filsafat yaitu model komunikasi gaya Amerika secara pragmatis yang cukup maju melalui pemikiran Jhon Dewey dan Richard Rorty dan teori komunikasi rasional yang disusun oleh Jurgen Habermas, meskipun dua perbedaan pada metodologi mereka, *new prahmatis* cenderung mengarah pada pengalaman dengan contoh-contoh penerapan terbaik dalam perencanaan yang dapat digeneralisir.

Pertanyaan besar pada analisis pragmatis adalah bagaimana para praktisi merancang ruang-ruang bebas dimana perencanaan demokratis dapat dilembagakan. Gagasan untuk membuka contoh-contoh perencanaan baik dari sisi kompeten dan demokrasi, kemudian merambah pada siapa praktisi yang mengagasnya, tindakan apa yang mereka pilih membuat hal itu terwujud, dan kondisi kelembagaan yang bagaimana membantu atau menghalangi usaha mereka (Hoc 1996, p.42). Permulaan dari komunikasi rasional adalah pengganti dari preposisi abstrak. Menurut Healy

(1996, p.239) sebuah konsep komunikasi rasional mengganti (s) kesadaran pribadi secara otonomi menggunakan prinsip-prinsip logika dan formulasi ilmu pengetahuan sendiri untuk mengarahkan tindakan. Konsep baru ini, sebagai alasan pada upaya saling pengertian. Praktik perencanaan difokuskan pada tujuan kemungkinan temuan yang di komunikasikan.

Pragmatis dan rasional komunikasi muncul dari tradisi falsafah yang berbeda. Dimana pemikiran Dewey di ilhami oleh realitas filsafat Inggris dan empiris, pemikiran Habermas keaslian pendekatannya pada idealis hegelian dan analisis kritis marxisme juga akurasi penelitian bahasa Wirrgenstein. Walau bagaimanapun pragmatis dan komunikasi rasional setara ketika digunakan untuk menyiapkan petunjuk kegiatan para perencana. Petunjuk ini berlawanan dengan arahan pemikiran Daniel Burnhams “Bukan perencanaan kecil” nampaklah sebuah ambisi untuk meraih tujuan penghargaan perencanaan. Didalam teori komunikasi, awalnya fungsi perencana adalah mendengar cerita masyarakat dan melakukan pendampingan untuk mencapai konsensus diantara pandangan yang berbeda.

Judith Innes (1998, p.52) mengatakan bahwa “Apakah para perencana lebih banyak meluangkan waktunya pada dialog dan interaksi” dan kemudian pembicaraan ini menjadi pedoman praktik, tindakan komunikasi. Innes (1995, p.183) berpendapat bahwa model komunikasi yang dibentuk para

perencana sebagai perantara dan penengah diantara para pihak, diformulasi menjadi begitu luas. Munculnya paradigma teori perencanaan Healey (1997, p.29) diringkas dalam teori ini dimana penekanannya terdiri dari: (1) semua bentuk pengetahuan tersusun dengan baik; (2) pengetahuan dan alasan bentuknya dapat berbeda, termasuk ilustrasi cerita dan pernyataan subjektif; (3) pengembangan individu seperti wawasan melalui proses interaksi sosial; (4) masyarakat memiliki berbagai macam kepentingan dan harapan dimana simbol-simbol sosial ini bersifat materi; (5) kebijakan publik diperlukan kegunaan dan kemampuannya mejangkau secara luas pengetahuan dan menyerap pemikiran dari sumber yang berbeda.

2. Teori Terapan dan Kelemahannya

Teori komunikasi berperan sebagai satu kesatuan dari elemen diskusi. Kedua hal ini, dimana perencanaan berlanjut dan manfaat perencanaan memudahkan wawasan. Tidak seperti para perancang rasional, teori komunikasi subjektif dan sepertinya kurang objektif. Sementara dalam legal teori objek analisis memiliki hubungan dengan legal sistem dan kemasyarakatan serta dalam teori kedokteran berhubungan dengan tubuh manusia.

Para perencana harus secara rutin menyuarakan, tentang kemungkinan harapan masa depan secara praktis maupun politis. Mereka sungguh-sungguh namun tidak dipercaya, teliti namun tidak diapresiasi, tenang namun dibenci.

Dimana mereka bermaksud membantu, para perencana dapat mengganti prakarsa yang tidak mandiri dan dimana mereka bermaksud mengekspresikan keyakinan yang baik, mereka harus meraih harapan yang tidak realistis dengan konsekuensi kehancuran.

Namun masalah-masalah ini sulit terhindarkan. Ketika para perencana menerapkan dan mengomunikasikan kegiatan mereka, mereka dapat memikirkan strategi untuk menghindari masalah-masalah dan mengembangkan praktiknya secara baik (Forester 1989, pp.138-39).

Saat ini antara teori-teori perencanaan komunikasi adalah menghindari dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perencanaan, politik, dan pengembangan wilayah. Kebanyakan pekerjaan dalam teori perencanaan telah menitikberatkan pada penelusuran arti perencanaan, percakapan dengan para pengembang dan pegawai tata kota, merekonstruksi dokumen-dokumen perencanaan, dan mendengarkan uraian-uraian para perencana.

Tantangan yang kita hadapi sebagai perencana dan analisis kebijakan yang lebih luas adalah mendengar secara seksama pada uraian praktik (uraian praktik perencanaan) dan untuk memahami siapa yang melakukan apa, mengapa, dan bagaimana, situasi seperti apa, dan apa sebenarnya keseluruhan masalahnya. Tantangan ini bukan hanya kata-kata, namun kepedulian dan ketulusan kita, peluang dan tindakan kita, inisiatif kita, apa

yang sebenarnya dapat dan harus, dilakukan sekarang (Forester 1993, p.202).

Katha Pollitt (1999, p.35) suatu kecenderungan mengarah diantara penulis wanita, berpendapat bahwa “Seorang adalah politisi” bukan berarti bahwa testimoni seorang, ungkapan dan perasaan semuanya dibutuhkan pada argumentasi politik. Hal penting bagi kaum feminim merupakan pribadi yang tertutup. Simone de Beauvoir menggunakan lebih dari 700 halaman pada buku *The Second Sex*, analisis posisi kaum wanita yang mungkin nampak dalam masyarakat, pada aspek antropologi, ekonomi, sejarah, sastra, analisis psikologi, biologi, filsafat, hukum yang menerima kehidupannya.

Teori komunikasi perencanaan dipengaruhi oleh kaum wanita, telah menjadi interpretasi subjektif dalam mengidentifikasi masalah. ketidaklurusan, dan substansi manfaat (lihat Campbell dan fainstein 1996), kenyataannya, sisi lain penjelasan penelitian hilang keharmonisan atau secara keseluruhan salah penempatannya (Milroy 1991; Beauregard 1991). Asumsinya bahwa penjelasan mengalami reduksi. Meskipun demikian, jika kita menerima bahwa tujuan teori perencanaan secara sederhana menyampaikan kepada para perencana apa yang seharusnya mereka lakukan, pengetahuan tergantung pada akurasi penilaian pada situasi dimana perencana menemukan dirinya sendiri. Penjelasan teori menghendaki para pengamat untuk mengidentifikasi situasi sifat-sifat secara general, dan sifat-sifat ini tidak dapat

disimpulkan secara langsung diuji pada diskursus. (Yiftachel, 2001) Hal ini tak dapat dipungkiri tentang kegunaan dari pembelajaran percobaan atau analisis masalah untuk dipahami. Namun bukan berarti mengedepankan pengalaman individu, menempatkan masalah pada sebuah konteks, menjadi pembanding, dan analisisnya tidak terbatas pada penafsiran.

Healey (1997) menggunakan terminologi kolaborasi perencanaan untuk menggambarkan proses dimana peserta mencapai suatu kesepakatan tindakan dalam mengekspresikan diantara kepentingan mereka. Dia menyatakan secara struktural atau pendekatan politik ekonomi menempatkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya tertarik. Disisi lain, suatu struktur terpenting (e.g.,capital) tidak secara langsung menghasilkan suatu posisi kebijakan penting (e.g., penghapusan aturan).

Ketiadaan secara teori pada teori komunikasi membuka diri mereka pada terapan. Usaha penelitian yang cermat sebagai dasar perencanaan membuka dialog pada masalah-masalah yang serius diimplementasikan dan didominasi oleh penguatan yang berkelanjutan. Mungkin yang paling menarik pada contoh saat ini adalah usaha yang sadar dan berarti, inklusif, perencanaan yang memiliki konsensus adalah di Afrika Selatan seperti yang dijelaskan oleh Mary Tomson (1998, pp.144-45).

Tepuk tangan yang gempita “Kesepakatan” (kebijakan dewan) harapannya menyiapkan usulan

oleh para pihak di forum dewan nasional melalui tawar-menawar yang ketat diantara partai, kenyataannya hasil dari pembiayaan vital berbeda diantara mereka. Diperhadapkan dengan perdebatan visi di antara siapa yang lebih mengunggulkan strategi orientasi pasar yang digerakan oleh sektor swasta, dan siapa lebih membela “Kepentingan masyarakat” melalui pendekatan “Kemasyarakatan” akan menjadi pemain utama atau paling tidak menahan suatu veto-forum partai diantara pilihan, meskipun itu bukan dikompotensi mereka. Semua partai tiba-tiba memiliki orientasi kemasa depan. Namun beberapa juga menghendaki pemberdayaan, jadi diantara tujuannya sama meskipun pada kenyataannya mereka membuktikan perbedaannya mereka secara praktis.

Di implementasi tahun kedua, skema subsidi dewan konsensus persiapan usulan di forum dewan nasional tidak seperti kerangka yang diharapkan, keberhasilan yang diikat oleh kepentingan dewan pada kebijakan, beberapa faktor kunci bukan di garis partai dan lebih krusial kepentingan pribadi lebih diutamakan untuk mengekang hal itu kepentingan mereka yang sangat rumit, dan seperti itu tidak menghasilkan upaya yang mereka harapkan untuk dikembangkan.

Belajar dari implementasi perencanaan ekonomi di Afrika Selatan tepatnya di Western Cape, yaitu, masyarakat Cape Town perencanaan (dihasilkan oleh Forum Pengembangan Ekonomi

Cape Town) mungkin lebih baik diketahui dari sebelumnya itu seperti itu, selalu gemilang, dan meninggalkan selembar kertas perencanaan dan visi yang abstrak. Pada skala ke bawah, investasi swasta mengikuti arah wilayah logika mereka, dan pendapatan rumah tangga yang rendah meluas ke daerah pinggiran kota, dimana lahan murah tersedia. Persis menjadi tempat yang dihadiahkan bagi perencanaan rumah tangga berpendapatan rendah ditempatkan dengan fasilitas olahraga atau pasar swayan sementara lahan lain masih kosong.

Pada akhirnya ada sebuah potensi konflik diantara tujuan perencanaan komunikasi dan hasil proses pelibatan perencanaan jika pelaksanaan perencanaan kedalam batasan yang berkelok-kelok. Biasanya benturannya muncul kapan saja pada pengekangan pelibatan pada wilayah sosial yang homogen. Teori komunikasi disesuaikan keragaman perbedaan, namun ada sedikit kemungkinan bahwa manfaat pelibatan para pihak relatif di kota-kota kecil, pengelolaan perencanaan langsung di kota besar mengabaikan perbedaan tingkatan masyarakat, ras, dan suku proses keberadaan melampaui wilayah politik untuk menghindar dari batasan homogenitas oleh pemilahan spasial. Tantangan pelibatan warga pada perencanaan kota besar dan pelaksanaannya mengorbankan kekerabatan lokal adalah rasionalitas dari perencanaan yang melibatkan warga.

3. Gaya Hidup Urban

Gaya hidup urban adalah sebuah desain yang didalamnya terdapat berbagai model bangunan serba guna, pembauran perumahan berasal dari kelompok masyarakat yang berpenghasilan berbeda, dan penghormatan yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Unit kerangka dasarnya adalah lingkungan yang asri, dengan lahan fisik cukup terbatas, memiliki suatu penetapan yang baik, juga memiliki sebuah pusat yang terkonsentrasi. Kebutuhan sehari-hari dapat terjangkau dengan jalan kaki selama lima menit (Kunstler 1996, p.117). Dalam analisis ini, bertanggung jawab lebih dari pada pengaturan lalu lintas pada jalan bebas hambatan dan estetika tidak menuangkan penyamaan pembangunan. Juga kejahatan para produsen dan penyimpangan.

4. Ulasan

Kota bijak adalah identik dengan peningkatan volume penjualan produk, promosi dimana keadaan lingkungannya tidak sesuai yang mengarah pada ketidak sesuaian urutan perencanaan fisik. Harvey (1997, p.1) aspek yang ditonjolkan di kota bijak menekankan pada ruang publik, yang memper-timbangkan antara pekerjaan dan tempat tinggal, dari sudut pandang kualitas lingkungan. Namun demikian, keabsahannya meleset.

Harvey (1997) juga ragu bahwa kota bijak menekankan pada pembauran masyarakat “Sisi gelap” dari sudut pandang kemasyarakatan. Dia mengklaim bahwa masyarakat telah menjadi kunci

dari kontrol sosial dan tameng dari tekanan social. Sebagai konsekuensi dari beban dan perubahan sosial yang sangat cepat. Dia cukup prihatin bahwa kesepakatan blok-blok komunitas adalah kemajuan upaya kemajemukan dan konflik.

Aspek yang paling menarik pada teori perencanaan di kota baru adalah penjaminan kualitas hidup yang terbaik menjadi angan-angan sebuah perubahan sosial. Itu adalah angan-angan yang tidak sesuai dengan komunikasi perencanaan, dimana upayanya hanya sebatas proses. Model praktik perencanaan ini tidak menyentuh aspek perencanaan yang mendasar. Dan ditawarkan dengan ucapan yang ideal dengan advokasi yang mempercayainya namun melampaui keseimbangan. Pada semua kasus, manfaatnya dlebih-lebihkan. Namun ada suatu atraksi meyakinkan, keduanya karena harapan tempatnya dibangun dengan tampilan buat seseorang yang mengalami keletihan dari masyarakat yang monoton dan buta akan modernisasi.

5. Kota Bijak

Teori perkotaan terbagi dalam dua kategori yaitu demokrat radikal dan politik ekonomi. Awalnya dibedakan pada teori komunikasi didalamnya terdapat konsep radikal pelibatan para pihak termasuk didalamnya digerakkan ke masyarakat madani, dan mereka menerima pandangan yang berbeda tentang kemasyarakatan. Mereka percaya bahwa perubahan sosial hanya akibat dari

penerapan kekuatan oleh yang sebelumnya telah dimiliki.

Dalam formulasi kota bijak, demokrasi adalah norma yang tidak sederhana namun substansinya harus ada (Pitkin 1967). Aspek sosial yang menjadi utama dalam sistem, hal itu tak dapat diasumsikan bahwa pelibatan para pihak akan menjadi suatu cara transformasi untuk meningkatkan keadaan masyarakat pada umumnya. Secara konsekuen, kebebasan masyarakat madani bukanlah moral yang utama dalam pengambilan keputusan oleh negara. Hal itu adalah dua sisi pemerintah yang lazim, kemampuannya untuk memengaruhi kemunduran atau kemajuan perubahan sosial, yang harus diutamakan. (Yiftachel 1998, p.400).

Perspektif penerapan kota bijak, seharusnya seorang menduga hasilnya, dan selanjutnya seorang tidak dapat melupakan bahwa hal itu dapat dicapai melalui kebijakan publik dalam kerangka ekonomi. Meskipun para pelaku tidak peduli dengan manfaat ekonomi namun akhir dari diskriminasi atau pengembang kualitas lingkungan, kepentingan ekonomi memungkinkan menjadi bagian dari tindakan.

Negara-Negera berkembang telah banyak mengambil inisiatif untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi dengan pendekatan desentralisasi baik pada tingkatan masyarakat maupun di perencanaan wilayah. Alasan yang mendasar bahwa mobilisasi masyarakat dari desa ke kota sudah sulit dihindarkan lagi dengan hasrat

mendapatkan redistribusi ekonomi masyarakat kota terhadap para masyarakat lokal dan desa yang berpindah ke kota yang selama ini merasakan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Tahun 1971, masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah perdesaan berjumlah sekitar 98 juta jiwa (83%). Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2004, proporsi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan berjumlah hanya 57%. Proporsi jumlah masyarakat desa kota ini mempunyai tiga kemungkinan sebab: (1) semakin banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota; (2) semakin terkikisnya lahan-lahan pertanian akibat perkembangan kota; (3) kombinasi sebab 1 dan 2.

Sama halnya dengan fenomena global yang terjadi, pembangunan yang *urban bias* berdampak kepada ketimpangan desa kota yang mempunyai beberapa implikasi seperti, ketimpangan ekonomi dan pembangunan desa kota, semakin terabaikannya swasembada ketahanan pangan akibat terkikisnya lahan-lahan pertanian, keberadaan petani yang *status quo* (malah semakin menurun) secara ekonomi, kualitas sumber daya manusia, akses politik, informasi, dan beberapa lainnya.

Pada pendekatan perencanaan lain yakni adanya *pameo* berkembang bahwa pusat-pusat konsentrasi pemukiman penduduk menjadi titik awal pada aspek fungsi pemukiman dan pembangunan wilayah dan juga menjadi ajang promosi pembangunan pemukiman dan mengintegrasikan pengembangan usaha, dengan

masing-masing menyiapkan sarana dan parasarana wilayah (Randinelli dan Ruddle, 1978). Selanjutnya dikatakan bahwa untuk menerjemahkan dengan praktik di atas dengan lingkup persolan dengan tiga alasan mendasar: (1) masyarakat pendatang di asumsikan akan berdampak pada perbaikan-perbaikan kondisi lingkungan yang terus diterpa isu-isu tentang akses terhadap kesempatan bekerja meskipun kontrol dan status ekonomi tidak menjadi pertimbangan; (2) metode penempatan daerah tidak memiliki kejelasan (para pihak cenderung fokus pada pengembangan simbol-simbol daerah masing-masing).

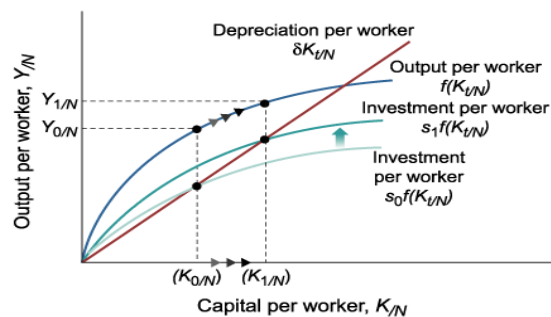
Menyimak jalan kedepan terhadap strategi perencanaan wilayah pada tingkat lokal, menjadi pembelajaran utama. Pertanyaan yang selalu ada dalam benak kita “Mengapa satu daerah/wilayah lebih maju dan daerah/wilayah lain tidak maju? Apakah kelembagaan, aturan pemerintah, kekuatan, politik, pewilayahan komoditas, distribusi pendapatan bermakna pada strategi pembangunan ekonomi wilayah? Studi tentang ekonomi wilayah merupakan suatu disiplin yang mencermati dan mengamati masalah-masalah sosial dalam dimensi pewilayahan dan spasial yang bertujuan untuk melengkapi dan memperjelas serta mempermudah para pihak memahami dan menerapkan dengan ukuran dan indikator ekonomi makro dan mikro juga ekonometrika.

Pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan proses

kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Sejak dicanangkannya program *Marshal Plan* (1949) kegiatan pembangunan di seluruh dunia mulai berkembang. Pelaksanaan pembangunan pada negara berkembang dengan strategi pertumbuhan ekonomi yang mempunyai sasaran peningkatan GNP tidak menjamin distribusi pendapatan nasional bahkan tidak menguntungkan sekelompok masyarakat miskin. Pembangunan Indonesia yang lebih berorientasi kepada *national growth* ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap tidak meratanya hasil-hasil pembangunan ke berbagai daerah. Secara ekonomi makro, faktor *growth* adalah salah satu indikator penting tetapi bukan berarti terpenting. Kegagalan Indonesia dalam menerapkan ekonomi ini lebih disebabkan karena belum adanya fundamental yang kuat sehingga *trickeling down effect* sebagai salah satu syarat terciptanya perekonomian yang merata tidak terjadi.

Sebuah negara niscaya akan selalu tumbuh dan berkembang yang dapat dilihat dengan pertumbuhan *national output* (Y). Tumbuh dan berkembangnya suatu negara tentunya harus diikuti oleh pertumbuhan *output per worker* (Y/N). Dalam model yang digambarkan oleh Olivier Blanchard (2003) disebutkan bahwa pertumbuhan *output per worker* ini akan mengalami *decreasing return*, yaitu

kondisi dimana tingkat pertumbuhannya semakin menurun dan pada akhirnya konstan. Pada suatu waktu ke depan, suatu negara akan mengalami *steady state* yaitu suatu kondisi dimana *depreciation* sama dengan *investment per worker*. Dalam kondisi *steady state*, pekerja suatu negara tidak bisa berinvestasi (termasuk menabung) karena dipakai untuk mengompensasi depresiasi. Kondisi *steady state* adalah kondisi yang sangat dihindari. Oleh karena itu semakin lama suatu negara mencapai titik *steady state*-nya, semakin baik kualitas hidup negara tersebut. Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan *investment per worker* atau dengan kata lain memperlama pencapaian *steady state*, yaitu peningkatan tingkat *saving*, pengembangan teknologi, dan *human capital* yang lebih baik.



Gambar 2.1 Dampak Investasi terhadap Pencapaian *Steady State*

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Masalah polarisasi desa kota sangat mengemuka di tahun 1950-1960an. Isu pembangunan ini terus melebar dalam dekade itu,

terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Suatu dekade yang mana peran kota atas desa mulai dipertanyakan, apakah peran kota lebih bersifat sebagai parasit, seperti yang dikemukakan Singer (1964) dalam Ernan et al (2005) ataukah mampu berperan sebagai pendorong pertumbuhan desa.

Di tahun 1970an, pandangan bahwa perkotaan lebih berperan sebagai penyebab dibandingkan solusi atas pembangunan perdesaan mendapatkan semakin banyak dukungan dan temuan. Lipton (1977) dalam Ernan et al (2005) mengenalkan istilah *urban bias* untuk memperjelas situasi hubungan seperti itu. Perdesaan secara politis, sosial, dan ekonomi cenderung memiliki posisi melayani atau membantu perkotaan di seluruh negara.

Oleh karena itu, pembangunan spasial tidak lagi melihat desa kota secara terpisah melainkan sebagai sebuah *unity* yang saling berkaitan. Friedman dan Douglas (1975) dalam Ernan et al (2005) memperkenalkan sebuah konsep “Agropolitan” sebagai sebuah pendekatan pembangunan perdesaan. Keduanya bahkan menekankan pentingnya pendekatan agropolitan dalam pengembangan perdesaan di kawasan Asia dan Afrika. Pendekatan agropolitan menggambarkan bahwa pengembangan atau pembangunan perdesaan (*rural development*) secara baik dapat dilakukan dengan mengaitkan atau menghubungkan perdesaan dengan

pembangunan wilayah perkotaan (*urban development*) pada tingkat lokal.

Selanjutnya penting untuk menelaah bahwa teknik analisis penentuan sektor unggulan dan komoditi inti selalu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi komoditas unggulan yang dikelompokkan atas; pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dihasilkan oleh masing-masing kecamatan.
- b. Analisis kuantitatif untuk setiap kecamatan dengan parameter *supply side* dan analisis lokasi dengan menggunakan analisis metode *location quotient* (LQ), koefisien lokalisasi (α) dan koefisien spesialisasi (β). Koefisien LQ ini digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu daerah. Keunggulan yang dihasilkan oleh metode ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan makro pembangunan daerah, terutama menyangkut sektor unggulan yang dijadikan sebagai basis ekonomi suatu daerah. Dengan metode LQ, keunggulan komparatif suatu daerah dapat diperoleh, dengan demikian dapat diketahui sektor mana yang dapat dikembangkan dan menjadi prioritas. Namun analisis LQ tersebut perlu didukung oleh analisis koefisien lokalisasi (α) dan koefisien spesialisasi (β) yang akan memperlihatkan keunggulan komparatif masing-masing komoditas di setiap wilayah. Koefisien

lokalisasi (α) akan memperlihatkan indeks relatif tingkat spesialisasi suatu daerah dalam menghasilkan suatu komoditas.

- c. Hasil analisis diklarifikasi pada fokus diskusi grup dengan berbagai *stakeholders* terkait, selanjutnya dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* ditetapkan komoditi inti daerah Kabupaten Pohuwato.

Dalam bukunya yang menarik dan provokatif, David Warsh (2006) menyatakan bahwa telah terjadi “Revolusi dalam ilmu ekonomi, yakni ilmu ekonomi baru”. Hal ini merupakan tanggapannya atas tulisan Paul Romer pada tahun 1990 yang menjadikan ilmu pengetahuan menjadi fokus perhatian setelah lebih dari dua abad hadir hanya secara informal dan ditempatkan di belakang isu lainnya. Namun pandangan ini dianggap mengandung ambivalensi karena pada bagian lain dikatakan sebagai *the invisible revolution* yang berimplikasi bahwa apa yang seharusnya secara revolutif berubah dalam cara berpikir. Pertanyaan tentang apa yang telah berubah sebagai hasilnya? dijawab sendiri dengan pernyataan “Tidak banyak atau paling tidak belum”.

Manicas Peter, T. (2006) mencoba mengupas ambivalensi tersebut dengan cara melihat kelanjutan dari sejarah ekonomi dan bagaimana menjawab pertanyaan teknis seperti di atas. Contoh paling terkenal dari Smith's adalah adanya kontradiksi yang tak terpecahkan yakni, spesialisasi yang dilakukan melalui pembagian pekerjaan telah

menghasilkan peningkatan dalam produktivitas. Perusahaan besar dengan cara demikian dan dengan kemampuannya akan mengalami *increasing return to scale*. Namun ketika perusahaan besar semakin memiliki skala usaha yang tambah besar dibandingkan perusahaan kecil, maka kecenderungan monopoli terjadi, dimana Marx menolaknya. Melalui metafor Smith's yakni *invisible hand* bagaimanapun diperlukan banyak kompetitor ketika tidak ada yang mengontrol pasar. Pada kondisi ini *return to scale* akan turun ketimbang naik. Ketika pertumbuhan terus berlangsung sepanjang waktu, lantas bagaimana mengatasi paradoks ini?

Sejarah tentang istilah revolusi dalam ekonomi pertama kali digunakan ketika terjadinya perubahan dari paham ekonomi klasik ke neo-klasik atau dari Smith ke J. S. Mill yang sering diistilahkan sebagai *marginalist revolution*. Berbagai asumsi klasik dibantah dan dibangun cara pandang baru serta *invisible hand* memperoleh penjelasan baru dalam kerangka ide mikro ekonomi. Revolusi kedua dalam penjelasan pertumbuhan terjadi pada tahun 1930 ketika publikasi Joan Robinson's *The Economics of Imperfect Competition* (1933) dan E.H. Chamberlin's *The Theory of Monopolistic Competition* (1933) muncul. Pandangannya bahwa ada elemen monopolistik dalam model kompetitif, karena perusahaan dapat melakukan diferensiasi produk seperti lokasi yang unik, nama dagang, perbedaan kualitas. Hal ini membuat variasi tingkat monopoli

yang memungkinkan terjadi *increasing return to scale*.

Namun beberapa pengamat ekonomi banyak yang kurang sepakat apa yang dilakukan kedua ekonom di atas sebagai revolusi dalam ekonomi, banyak hal yang dianggap lemah. Namun yang membuatnya terbenam adalah waktunya yang kurang tepat, karena pada waktu yang hampir bersamaan ada revolusi Keynes dimana ia menolak hukum Say. Seiring dengan waktu kemampuan deduktif dalam membangun model dan penggunaan matematika semakin penting karena kebutuhan untuk menjelaskan fenomena dan memprediksi masa depan semakin penting dalam ekonomi. Dalam kaitan ini perlu dicatat peran Samuelson (1947) lewat *Foundation of Economic Theory Analysis* yang menggunakan pendekatan matematika ekonomi dalam membangun modelnya, namun demikian jauh sebelum itu Augustin Cornot (1838) telah menggunakan simbol-simbol matematika dalam tulisannya.

Ide tentang *invisible hand* terus diulas dan Stiglitz menyatakan ada yang tidak realistis dalam model yang dibangun sebelumnya, asumsi paling krusial adalah menyatakan bahwa setiap individu adalah sama (identik). Asumsi ini memang terlalu menyederhanakan analisis, ketika asumsi ini dibuang maka *invisible hand* juga menjadi bagian yang tidak terlihat pula. Tulisan Avinash Dixit dan Joseph Stiglitz tentang hal ini sering pula disebut sebagai “Revolusi Kedua Kompetisi Monopolistik”

karena lebih mampu menjelaskan aspek-aspek penting dari model Chamberlin sebelumnya, tentunya melalui penggunaan matematika ekonomi. Dalam kerangka perkembangan sejarah ini dan apa yang menjadi hasilnya akan dilihat bagaimana posisi teori pertumbuhan endogenous yang saat ini telah menjadi arus utama teori pertumbuhan dalam pasar yang berkompetisi tidak sempurna namun masih memiliki banyak jarak dengan dunia nyata. Berikut adalah catatan ringkas tentang model Romer.

6. Kaitannya terhadap Pembangunan Wilayah

Lebih lanjut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu ekonomi yang datang lebih belakang ekonomi regional juga mencoba memanfaatkan teori pertumbuhan endogenous ini. Pertanyaan mendasar pernah diajukan oleh David S Landes (1990) dalam Ray Gautam "*Why are we so rich and they poor?*" apa yang dilakukan oleh pemerintah India sehingga bisa membuat pertumbuhan India tinggi seperti Mesir dan Indonesia?

Melalui pendekatan konvensional Ray et al (1999) menunjukkan bahwa pengetahuan negara kaya dan pengetahuan negara miskin tidak dapat digambarkan dalam teknologi produksi yang sama walaupun dalam jangka panjang. Teknologi produksi dari agregat ekonomi dalam ruang pengetahuan negara kaya mungkin berkarakteristik *non-convexities*, suatu hal yang berbeda pada negara miskin pengetahuan. Untuk lebih memperjelas teori pertumbuhan endogenous dalam konteks ekonomi regional maka dilakukan upaya modifikasi

modelnya. Sebagaimana diketahui model beranjak dari fungsi produksi:

$$Q = F(K, H, L, A)$$

Tanpa ada generasi yang hilang didefinisikan K adalah modal fisik dimana di dalamnya juga terdapat modal pengetahuan, H adalah modal manusia (*human capital*), L adalah tenaga kerja dan A sebagai *social capital* karena ekonomi dibangun berkaitan dengan sejarah masa lalu dan kondisi geografis. *Social capital* biasanya menjadi bagian eksogen yang terdiri dari kebudayaan, etos dan etika kerja, *morality*, nilai pendidikan, faktor geografis seperti iklim dan sumber daya alamiah lainnya, juga termasuk segmentasi sosial seperti kasta, suku, agama dan jenis kelamin. *Social capital* dapat bernilai positif dan negatif. *Social capital* adalah input dimana harganya tidak ditentukan oleh pasar.

Dalam model ini ekonomi terdiri atas dua bagian yakni, sektor swasta dan publik. Sektor swasta menghasilkan barang-barang kebutuhan pokok dan juga pengetahuan. Sementara sektor publik menyediakan sosial kapital seperti infrastruktur sosial ekonomi yang mampu meningkatkan akses individu pada barang pengetahuan. Sosial kapital adalah barang non-rival. Sektor pengetahuan memproduksi barang pengetahuan (*y* per kapita) dan komposit, atau kapital pengetahuan per kapita (modal kapital per kapita digunakan untuk memproduksi modal

pengetahuan) modal manusia per kapita dan modal sosial per kapita sebagai input.

Hasil penelitian Ray menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pendekatan ekonomi regional terdapat perbedaan fundamental antara dinamika pertumbuhan agregat ekonomi dari negara kaya pengetahuan dengan negara miskin pengetahuan. Inilah yang menyebabkan mengapa tidak terjadi konvergensi walaupun dalam jangka panjang. Ketika negara miskin pengetahuan terperangkap dalam pertumbuhan *steady state* nol, negara kaya pengetahuan mengalami *multiple equilibria*. Negara miskin tidak mempunyai biaya yang cukup untuk memulai pemanfaatan *human* dan *social capital*. Pada negara miskin akumulasi sosial kapital menjadi masalah kritis, karena sifatnya yang non-rival tidak ada agen swasta di negara miskin pengetahuan karena ketiadaan insentif mau melakukan investasi sosial kapital. Perdagangan bebas juga tidak mampu menolong negara miskin bahkan dapat kontra produktif karena kemungkinan tenaga kerja terampil bahkan bisa keluar dari negara miskin.

Aglomerasi ekonomi dan konsentrasi perkotaan dari modal manusia mungkin dapat menolong negara miskin untuk mencapai batas ambang tingkat yang harus dicapai untuk membangun modal pengetahuan. Diharapkan terjadi limpahan modal pengetahuan perkotaan pada bagian lain dari negeri khususnya pedesaan. Pada akhirnya tingkat produktivitas tenaga kerja

perdesaaan sama tingginya dengan tenaga kerja perkotaan. Konsekuensinya tingkat upah akan meningkat dan karenanya ada kesempatan untuk menabung dan melakukan investasi, inilah kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa saran yang diberikan agar negara miskin tidak masuk dalam perangkap kemiskinan adalah memperbaiki investasi dibidang pendidikan dan pembangunan fasilitas pedesaan terutama mengembangkan aktivitas berbasis pengetahuan.

7. Teknik Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berbagai pendekatan dan alat analisis telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, menggunakan beberapa kriteria teknis dan nonteknis, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahannya, sehingga dalam memilih metode analisis untuk menentukan komoditas unggulan ini perlu dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menginisiasi komoditas unggulan adalah metode *Location Quotient* (LQ).

Teknik *LQ* merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. *LQ* mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Untuk mengimplementasikan metode *LQ* dalam bahasan ini digunakan data areal panen tanaman perkebunan. sumber utama yang

digunakan adalah data sekunder dari statistik Indonesia yang tersedia di BPS tahun 2012-2016.

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi komoditas basis dan bukan basis komoditas subsektor pertanian pada suatu wilayah dalam perekonomian wilayah. Konsep tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Harun dan Canon, 2006):

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Keterangan:

LQ = besarnya koefisien lokasi komoditas

v_i = jumlah komoditas kelapa pada kecamatan i

v_t = jumlah (seluruh komoditas perkebunan) pada kecamatan i

V_i = jumlah komoditas kelapa pada tingkat kabupaten

V_t = jumlah total komoditas perkebunan tingkat kabupaten

Angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut:

a. $LQ > 1$, menunjukkan komoditas tersebut termaksud komoditas basis.

b. $LQ < 1$, menunjukkan komoditas tersebut termaksud komoditas non-basis.

8. Analisis LQ_{share} dan LQ_{shift}

Analisis LQ_{share} dan LQ_{shift} dikembangkan dari model analisis LQ . Analisis ini bersifat dinamis karena memperhatikan perkembangan sektor dalam dua titik waktu. Disamping itu analisis LQ_{share} dan LQ_{shift} dapat mengidentifikasi spesialisasi/konsentrasi dan

perkembangan sektor wilayah karena didasarkan atas konsep perhitungan yang sangat mirip, sehingga hasil perhitungannya saling mendukung terhadap penentuan kemajuan atau kemunduran relatif sektor wilayah. Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk penerapan skala prioritas pengembangan sektor.

Menurut Canon, (2006) untuk mengidentifikasi tingkat spesialisasi/konsentrasi sektor wilayah dalam dua titik (periode) waktu maka persamaan 2 diubah dalam formula rasio nilai rata-rata median, yaitu:

$$LQ_{Share} = \frac{\frac{(Q_{Rkn} + Q_{Rko})}{(Q_{Rn} - Q_{Ro})}}{\frac{(Q_{Nkn} - Q_{Nko})}{(Q_{Nn} - Q_{No})}}$$

Keterangan:

Q_{Rko} = indikator ekonomi k wilayah awal periode

Q_{Rkn} = indikator ekonomi sektor k wilayah akhir periode

Q_{Ro} = indikator ekonomi total sektor wilayah awal periode

Q_{Rn} = indikator ekonomi total sektor wilayah akhir periode

Q_{Nko} = indikator ekonomi sektor k wilayah acuan awal periode

Q_{Nkn} = indikator ekonomi sektor k wilayah acuan akhir periode

Q_{No} = indikator ekonomi total sektor wilayah acuan awal periode

Q_{Nn} = indikator ekonomi total sektor wilayah acuan akhir periode

$$\left(\frac{(Q_{Rkn} + Q_{Rko})}{(Q_{Rn} - Q_{Ro})} \right) = \text{komponen } share \text{ sektor k wilayah pengamatan}$$

$$\left(\frac{(Q_{Nkn} - Q_{Nko})}{(Q_{Nn} - Q_{No})} \right) = \text{komponen } share \text{ sektor k wilayah acuan}$$

- $LQ_{Share} > 1$, sektor dengan tingkat spesialisasi/kondentrasi lebih tinggi dari wilayah acuan.
- $LQ_{Share} < 1$, sektor dengan tingkat spesialisasi/konsentrasi lebih rendah dari wilayah acuan.
- $LQ_{Share} = 1$, sektor dengan tingkat spesialisasi/konsentrasi sama dengan wilayah acuan.

Untuk mendapatkan formula perkembangan/ daya saing wilayah dalam dua titik waktu (periode) maka persamaan 2 dirubah menjadi rasio nilai perubahan yaitu:

$$LQ_{Shift} = \frac{\frac{(Q_{Rkn} - Q_{Rkn})}{(Q_{Rn} - Q_{Ro})}}{\frac{(Q_{Nkn} - Q_{Nko})}{(Q_{Nn} - Q_{No})}}$$

Keterangan:

$$\left(\frac{(Q_{Rkn} - Q_{Rkn})}{(Q_{Rn} - Q_{Ro})} \right) = \text{komponen } shift \text{ sektor } k \text{ wilayah}$$

$$\left(\frac{(Q_{Nkn} - Q_{Nko})}{(Q_{Nn} - Q_{No})} \right) = \text{komponen } shift \text{ sektor } k \text{ wilayah acuan}$$

- $LQ_{Shift} > 1$, sektor dengan perkembangan/daya saing lebih tinggi dari wilayah acuan.
- $LQ_{Shift} < 1$, sektor dengan perkembangan/daya saing lebih rendah dari wilayah acuan.
- $LQ_{Shift} = 1$, sektor dengan perkembangan/daya saing sama dari wilayah acuan.

Penentuan posisi relatif sektor berdasarkan kriteria berikut ini:

- $LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \leq 1$ = sektor progresif. Tingkat spesialisasi/konsentrasi dan laju

perubahan/daya saing tersebut tinggi, sektor tersebut sangat berperan.

- $LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$ = sektor berkembang. Menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi/konsentrasi sektor tersebut masih rendah tetapi laju perubahannya relatif tinggi, sehingga sektor tersebut mempunyai prospek yang baik untuk berperan.
- $LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$ = sektor lamban. Menunjukkan bahwa spesialisasi/konsentrasi sektor tersebut tinggi akan tetapi dengan laju perubahan/daya saing yang rendah. Sektor tersebut tersaing oleh sektor yang sama dari wilayah lain.
- $LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$ = sektor mundur. Menunjukkan bahwa spesialisasi/konsentrasi sektor dan laju perubahan/daya saing sektor tersebut rendah, sektor tersebut mempunyai prospek yang kurang baik untuk berperan.

B. Teori Terapan

1. Wilayah

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi (Tarigan, 2005: 6). Glasson (2001:12) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan

objektif. Cara pandang subjektif daerah dipandang sebagai alat deskriptif, didefinisikan menurut kriteria tertentu, untuk tujuan tertentu. Dengan demikian terdapat banyak daerah sebanyak kriteria yang digunakan untuk mendefinisikannya. Dalam konteks ini konsep daerah melaksanakan suatu fungsi yang sangat bermanfaat dan menghindari fungsi yang ekstrim. Sedangkan pandangan objektif bahwa daerah itu benar-benar ada, dianut oleh banyak akademisi pada awal abad ke-20. Di dalam pandangan ini juga dinyatakan bahwa wilayah bias dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimiliki atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari ciri-ciri di atas.

Menurut Tarigan (2005:17) dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan.
- b. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogeneity*), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik, misalkan wilayah pertanian dengan wilayah industri dan wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan sosial budaya. Misalkan daerah-daerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.

- c. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi, perlu diterapkan terlebih dahulu pusat pertumbuhan (*growth pole* atau *growth centre*) yang kira-kira sama besarnya/rangkingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan atau tujuan khusus.

Sedangkan pembangunan menurut Sajogyo (2011:8) diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini tidak lain merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*). Ciri dan tujuan perencanaan pembangunan di atas sangat terkait dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak negara-negara lain terutama negara-negara sosialis, bahkan negara-negara maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan suatu perencanaan pembangunan.

Pembangunan ekonomi Irma Adelman (John P. Lewis & Valerina Kallab, 1987) menyarankan diterapkan pembangunan ekonomi yang

berorientasi pada pemerataan *equity* yang dikenal dengan pembangunan dengan strategi pemerataan sebelum adanya pertumbuhan *redistribution before growth* strategi pembangunan melalui pembagian seperti tanah *land reform* dan lain sebagainya. *Assets* secara merata kepada masyarakat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara yang menerapkan *strategi redistribution before growth* ini antara lain ialah India dan Taiwan akan tetapi hanya Taiwan yang berhasil mencapai pembangunan ekonomi yang dikenal dengan *Newly industrialized Country* (Panetto, 1990).

Hernando Desoto (2006) memiliki hasil kajian yang sama yaitu “disemua negara yang kami pelajari, kewirausahaan yang sesungguhnya dari orang-orang miskin telah menciptakan kesejahteraan dalam skala yang luas”. Kesejahteraan yang luas telah dibentuk oleh sumber daya kapital yang potensial untuk perkembangan. Aset-aset ini tidak hanya melampaui nilai properti pemerintah pada bursa saham lokal, dan investasi asing langsung, tetapi mereka jauh lebih besar dari bantuan negara-negara maju dan semua pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Selanjutnya dalam buku ini diungkapkan bahwa hasil kajian di empat negara yang kami pelajari dan memproyeksikannya keseluruh negara-negara dunia ketiga dan bekas komunis. Kami memperkirakan bahwa sekitar 85% lahan perkotaan di negara-negara ini dan antara 40% sampai 53% lahan pertanian, dimiliki sedemikian

rupa sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan capital. Dengan memberikan sebuah nilai kepada aset-aset ini maka secara tidak terhindarkan akan didapat angka yang tidak detail. Namun kami percaya bahwa perhitungan kami cukup akurat dan konservatif. Berdasarkan perhitungan kami totalkan nilai *real estate* yang dimiliki orang miskin secara illegal dinegara-negara dunia ketiga dan bekas komunis paling tidak adalah US\$ 9,3 triliun.

Ini adalah angka yang cukup matang dan patut dipikirkan US\$ 9,3 triliun hampir sama dengan dua kali total persediaan uang Amerika Serikat yang tersirkulasi. Ini hampir mendekati nilai total semua perusahaan yang tercantum pada bursa-bursa utama 20 negara paling maju di dunia New York, Tokyo, London, Frankfurt, Toronto, Paris, Milan, Nasdaq, dan selusin lainnya. Ini lebih dari 20 kali total investasi asing di negara-negara dunia ketiga dan bekas komunis dalam 10 tahun sejak 1989, 46 kali semua pinjaman dari Bank Dunia selama tiga dekade terakhir, dan 93 kali bantuan untuk pengembangan dari semua negara maju kepada dunia ketiga dalam periode yang sama.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat secara terus-menerus dan berlangsung dalam jangka panjang (Aliyah 2017: 22). Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Yesi 2012: 5).

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang di capai pada masa sebelumnya. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999: 145). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang, sejalan dengan argumen tersebut diatas. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang masih relatif mudah, akan tetapi pembangunan diberbagai sektor sudah berkembang pesat. Hal ini tidak lain adalah peran pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan segala usaha baik disektor pertanian, perikanan dan peningkatan sumber daya manusia.

Ketiga aspek ini menjadi sasaran pokok pemerintah provinsi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo secara komprehensif, dalam kaitan ini pula pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di

daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis pada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui usaha-usaha masyarakat yang dikelola secara baik.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang baik (BPS, 2016).

Pembangunan ekonomi juga sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumber daya yang diupayakan secara terencana. Biasanya peranan sektor pertanian akan turun untuk memberikan kesempatan bagi tampilnya sektor-sektor manufaktur dan jasa-jasa yang selalu diupayakan untuk berkembang (Todaro, 2000: 13).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan

ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat (Arsyad, 2010: 54).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Todaro, 2010: 44) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan,

perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia (Sukirno, 2006: 10).

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets dalam Irawan (2009: 32) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai tiga komponen: (1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; (2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat

Menurut Julian (2014: 115) bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain: (1) sumber daya alam; (2) jumlah dan mutu pendidikan penduduk; (3) ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) sistem sosial; (5) pasar. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang

berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari penambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia menurut Mazumder (2011: 5) ialah satu fenomena multidimensi dan bergantung kepada satu bilangan aspek-aspek bukan kewenangan dalam kehidupan (indikator-indikator sosial dalam pembangunan). Menurut Mulyadi. (2014: 101) menyatakan bahwa pembangunan manusia ialah konsep relatif dan ia perlu untuk dipahami dari pada satu perspektif antara disiplin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pendidikan, dan kehidupan yang layak (BPS, 2016). Untuk mengukur masing-masing dimensi IPM, dipresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat dipresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan dipresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah, serta dimensi kehidupan yang layak dipresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli.

Menurut Todaro (2006: 269) bahwa dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk

mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

- a. Tingkat kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH)

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

- b. Tingkat pendidikan diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- c. Indeks layak hidup diukur dengan tingkat pengeluaran.

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(Pengeluaran_{maks}) - \ln(Pengeluaran_{min})}$$

Rumusan umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$\sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran} \times 100\%}$$

Dimana:

I : Indeks Komponen

AHH : Angka Harapan Hidup

RLS : Rata Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Ketimpangan dan tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah atau negara dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, karena kemiskinan merupakan persoalan multikompleks di dalam masyarakat. Para ahli menyimpulkan bahwa ketimpangan dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pilihan antar pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan (*growth*) atau pembangunan ekonomi melalui pemerataan (*equity*). Masing pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, kependudukan, pendidikan, politik, kestabilan dan strategi yang dicanangkan oleh pemerintah di wilayah atau negara.

BAB 3

Masalah Kemiskinan dan Faktor Reduksi Kemiskinan

A. Diskursus

Kata-kata kemiskinan internasional dengan mudah membawa pikiran kita pada gambaran tentang pengemis-pengemis kekurangan yang tidur-tidur di tepi jalan Kalkuta dan anak-anak Afrika yang kelaparan di atas gurun pasir. Gambaran ini tentu saja nyata, jutaan saudara kita memerlukan dan berhak atas pertolongan kita, walaupun begitu gambaran yang paling ironis dari dunia ketiga tidaklah yang paling akurat. Lebih buruk lagi, hal ini menjauhkan perhatian dari prestasi melelahkan para wirausahawan-wirausahawan kecil, yang telah berhasil mengatasi semua halangan-halangan yang dapat dibayangkan untuk menciptakan kekayaan yang lebih besar dalam masyarakat mereka.

Gambaran yang lebih benar akan bercerita tentang seorang laki-laki dan perempuan yang membanting tulang untuk membangun sebuah rumah bagi mereka dan anak-anak mereka, dan mendirikan perusahaan yang tidak terbayangkan oleh siapapun dapat mereka dirikan. Mungkin pemikiran kita sama bahwa karakterisasi wirausahawan-wirausahwan heroik tersebut busan kontributor masalah kemiskinan

global, bahkan merupakan kapitalis-kapitalis baru yang sangat berakar kekuatannya terhadap hantaman krisis ekonomi saat ini.

Hernando Desoto (2006) sebelum tahun 1950, sebagian besar negara dunia ketiga merupakan masyarakat agraris yang tertata sedemikian rupa sehingga orang-orang Eropa dari abad 18 akan merasa seperti di rumah. Kebanyakan orang-orang bekerja di atas tanah yang dimiliki segelintir tuan-tuan tanah yang besar. Sebagian dari tuan tanah ini adalah penduduk asli, sementara sisanya adalah para kolonialis. Kota-kota berukuran kecil dan lebih sering berfungsi sebagai pasar dan pelabuhan dari pada pusat industri, kota-kota ini didominasi oleh kaum merkantilis kecil yang melindungi kepentingan mereka dengan selubung pelbagai ketentuan dan peraturan.

Setelah tahun 1950, dimulailah revolusi ekonomi di dunia ketiga yang mirip dengan kekacauan sosial dan ekonomi di Eropa tahun 1800. Mesin-mesin baru mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja daerah sementara obat-obatan dan metode kesehatan publik yang baru telah mengurangi angka kematian bayi dan memperpanjang tingkat harapan hidup. Segera saja ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan besar yang baru dibangun untuk menuju ke kota-kota seperti yang digambarkan dalam program antusias dalam radio. Hal ini sama seperti kehidupan orang-orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan ketika mereka dipisahkan oleh kebijakan apartheid.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai

macam sudut pandang. Dimensi kemiskinan mencakup empat hal pokok, yaitu kurang kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan (*low of capability*), kurangnya jaminan (*low-level of security*) dan ketidakberdayaan (*low of capacity or empowerment*). Kemiskinan juga dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (*vulnerability*), keterpurukan (*vioclessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*). Kemiskinan dapat pula dibedakan menurut tingkat keparahan yakni, kemiskinan *absolute* dan kemiskinan *relative*. Sifat kemiskinan yaitu kemiskinan sementara dan kemiskina kronis dan kesenjangan antar-golongan pendapatan, antar-sektor, maupun antar-daerah.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah peradaban, termasuk sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus tidak ada persoalan yang paling besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadikan jutaan anak-anak di dunia tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. Kesulitan membiayai kesehatan, tidak adanya tabungan, dan tidak adanya investasi, kurangnya akses kelayakan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatny arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah lagi ratusan juta rakyat memenuhi kebutuhan pangan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa

rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup (*safety life*) (James. C.Scot, 1981).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat yaitu: (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (5) hak rakyat untuk memperoleh atas kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) yang terjangkau; (6) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintah; (7) hak rakyat untuk berinovasi; (8) hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan (sesuai dengan ajaran agama yang dijamin oleh negara); (9) hak rakyat untuk berpartisipasi dan menata dan mengelolah pemerintahan dengan baik.

B. Permasalahan

Hingga saat ini para ahli ekonomi pembangunan masih diwarnai oleh dikotomi antarpertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Masih adanya pendapat atau silang pendapat atau kontroversi antar mana yang lebih dahulu untuk dilakukan atau untuk dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan yang disebabkan oleh penerapan strategi pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan. *Growth* dan pemerataan (*equity*) belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Strategi pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi

dikenal dengan strategi pertumbuhan (*growth strategy*). Pencetus dan pendukung strategi pembangunan ini yaitu Kuznets (Chenery, 1974). Menurut hipotesis kuznet adalah pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan cenderung akan membaik.

Hipotesis ini dikenal dengan kurva kuznets U terbalik. Kuvar U terbalik ini terjadi karena perubahan *longitudinal* (time series) dalam distribusi pendapatan. Menurut kuznets pada awal pembangunan, kelompok miskin cenderung lebih miskin dan baru tingkat pendapatan perkapita mencapai \$600-\$800 (tahun 1974) akan terjadi perbaikan ketimpangan. Dengan strategi pertumbuhan ini maka yang paling penting dan harus mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan terjadi efek penetesan kebawah (*trickle down effect*) dari hasil pembangunan tersebut. Artinya jika sudah banyak orang kaya dari hasil pembangunan tersebut, maka orang-orang miskin akan mendapatkan bagian atau tetesan dari kelebihan pendapatan orang-orang kaya. Hingga kini hipotesis Kuznets tersebut belum terbukti kebenarannya secara empiris. Kegagalan India dan keberhasilan Taiwan melaksanakan pembangunan dengan strategi *redistribution before growth* karena berhubungan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan stabilitas yang dimiliki. Bagi Indian yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia (882,6 juta pada tahun 1992) dengan kawasan yang amat luas (32,87.263

Km²) dan/atau (1.269.346 mil) dengan jumlah populasi 1,353 miliar (Bank Dunia 2018) dan 1,373.650.000 Maret 2021 populasi India berada pada urutan kedua saat ini setelah China. Hal ini memang sulit untuk melaksanakan pemerataan aset seperti *land reform* dibanding dengan Taiwan dengan jumlah penduduknya 23.539.588 juta (Kementerian dalam Negeri Taiwan 2020). Sedangkan Indonesia dengan total populasi 266.911.9 juta (2019) dan 269.603.4 juta (BPS 2021) dengan luas daratan 8.300.000 Km² dengan panjang garis pantai 108.000 Km dan luas wilayah yang mencapai 35,981 Km². Jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan telah dibakukan oleh PBB sebanyak 16.056 pulau (BPS 2021).

Karena itu setiap wilayah dan atau setiap negara mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Untuk itu agar pembangunan ekonomi dijalankan akan mencapai sasaran, maka setiap wilayah atau setiap negara harus melakukan perencanaan yang matang. Dengan adanya perencanaan yang matang dapat diketahui dengan baik-baik kekuatan dan kelemahan masing-masing agar pembangunan yang dijalankan berhasil dengan baik.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan ekonomi harus memiliki perencanaan yang matang, dengan perencanaan yang matang maka visi dan misi pembangunan dapat dicapai melalui strategi pembangunan yang dicanangkan melalui penciptaan *consensus* antar berbagai pihak termasuk rakyat di wilayah atau negara tersebut. Adapun tujuan

penulisan ini dapat diformulasi yaitu untuk mendeskripsikan ketidakmerataan dan kemiskinan yang cukup tinggi antarwilayah atau negara berdasarkan kajian dan pengalaman empiris serta kejadian di wilayah dan negara.

Irma Adelman (John P. Lewis & Valerina Kallab, 1987) menyarankan diterapkan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan *equity* yang dikenal dengan pembangunan dengan strategi pemerataan sebelum adanya pertumbuhan (*redistribution before growth*) strategi pembangunan melalui pembagian seperti tanah *land reform* dan lain sebagainya *assets* secara merata kepada masyarakat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Negara yang menerapkan *strategi redistribution before growth* ini antara lain ialah India dan Taiwan akan tetapi hanya Taiwan yang berhasil mencapai pembanguana ekonomi yang dikenal dengan *newly industrialialized country* (Panetto, 1990).

Hernando Desoto (2006) memiliki hasil kajian yang sama yaitu disemua negara yang kami pelajari, kewirausahaan yang sesungguhnya dari orang-orang miskin telah menciptakan kesejahteraan dalam skala yang luas. Kesejahteraan yang luas telah dibentuk oleh sumber daya *capital* yang potensial untuk perkembangan. Aset-aset ini tidak hanya melampaui nilai properti pemerintah pada bursa saham lokal, dan investasi asing langsung. Tetapi mereka jauh lebih besar dari bantuan negara-negara maju dan semua pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Selanjutnya dalam buku ini diungkapkan bahwa hasil kajian di empat negara yang kami pelajari dan memproyeksikannya keseluruhan negara-negara dunia ketiga dan bekas komunis. Kami memperkirakan bahwa sekitar 85% lahan perkotaan di negara-negara ini dan antara 40% sampai 53% lahan pertanian, dimiliki sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan *capital*. Dengan memberikan sebuah nilai kepada aset-aset ini maka secara tidak terhindarkan akan didapat angka yang tidak detail. Namun kami percaya bahwa perhitungan kami cukup akurat dan konservatif. Berdasarkan perhitungan kami totalkan nilai *real estate* yang dimiliki orang miskin secara illegal dinegara-negara dunia ketiga dan bekas komunis paling tidak adalah US\$ 9,3 triliun.

Ini adalah angka yang cukup matang dan patut dipikirkan US\$ 9,3 triliun hampir sama dengan dua kali total persediaan uang Amerika Serikat yang tersirkulasi. Ini hampir mendekati nilai total semua perusahaan yang tercantum pada bursa-bursa utama 20 negara paling maju di dunia seperti New York, Tokyo, London, Frankfurt, Toronto, Paris, Milan, Nasdaq, dan selusin lainnya. Ini lebih dari 20 kali total investasi asing di negara-negara dunia ketiga dan bekas komunis dalam 10 tahun sejak 1989, 46 kali semua pinjaman dari Bank Dunia selama tiga dekade terakhir, dan 93 kali bantuan untuk pengembangan dari semua negara maju kepada dunia ketiga dalam periode yang sama.

C. Pembahasan Provinsi Gorontalo

Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI). Indeks pembangunan manusia Indonesia yang merupakan hasil indikator masih relevan dan dipercayai oleh masyarakat dunia saat ini. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia masih sangat rendah, dibanding dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Gambaran mengenai jumlah penduduk, kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Penduduk, Kemiskinan & Ketimpangan di Provinsi Gorontalo

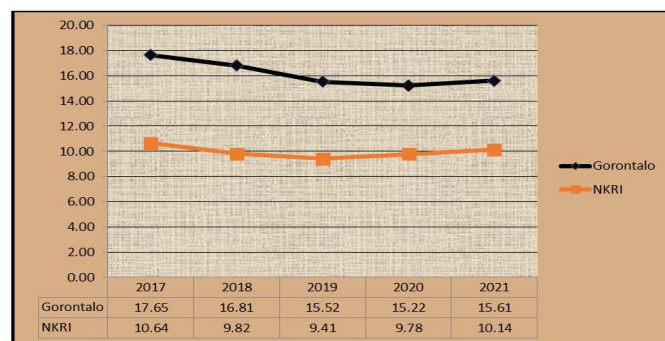
Aspek	Daerah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	Kota Gorontalo	210,782	215,086	219,399	198,539	199,788
	Kab. Gorontalo	374,923	377,048	378,527	393,107	395,635
	Kab. Boalemo	158,333	162,577	167,024	145,868	147,038
	Kab. Pohuwato	153,991	157,551	161,373	146,432	147,689
	Kab. Bone Bolango	157,186	159,194	161,236	162,778	164,277
	Kab. Gorontalo Utara	112,975	114,036	115,072	124,957	126,521
	Provinsi	1,168,190	1,185,492	1,202,631	1,171,681	1,180,948
Kemiskinan	Kota Gorontalo	5.70	5.57	5.45	5.59	5.93
	Kab. Gorontalo	20.55	19.84	18.06	17.56	17.89
	Kab. Boalemo	21.85	20.33	18.87	18.57	19.00
	Kab. Pohuwato	21.27	19.40	18.16	17.62	18.08
	Kab. Bone Bolango	17.81	17.40	16.12	15.81	16.30

Tabel 3.1 Penduduk, Kemiskinan & Ketimpangan di Provinsi Gorontalo

	Kab. Gorontalo Utara	19.23	18.54	16.95	16.88	17.23
	Provinsi	17.65	16.81	15.52	15.22	15.61
Kemiskinan Indonesia		10.64	9.82	9.41	9.78	10.14
Gini Ratio Gorontalo	Maret	0.430	0.403	0.407	0.408	0.408
	September	0.405	0.417	0.410	0.406	0.409
Gini Ratio Indonesia	Maret	0.393	0.389	0.380	0.381	0.384
	September	0.391	0.384	0.380	0.385	0.381

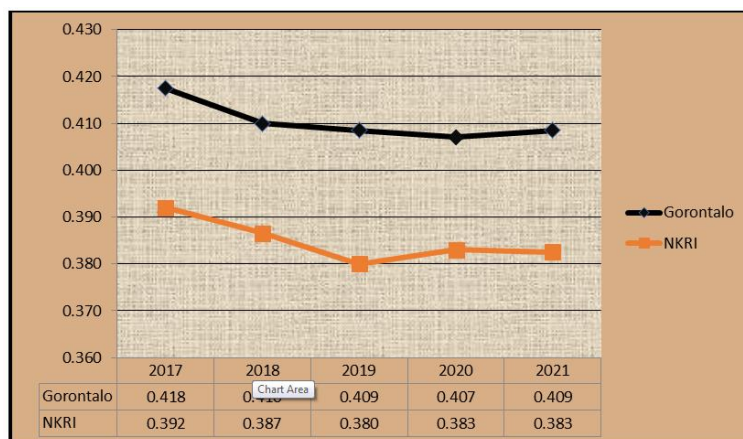
Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa penduduk di Provinsi Gorontalo cenderung naik, meski pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal menarik dari penduduk di Provinsi Gorontalo yakni pada Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang mengalami peningkatan sangat signifikan jumlah penduduk pada tahun 2019 ke tahun 2020, sementara untuk Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk yang sangat signifikan.



Gambar 3.1 Kemiskinan di Provinsi Gorontalo
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Adapun untuk kemiskinan dapat dilihat bahwa Provinsi Gorontalo mampu untuk menurunkan kemiskinan secara konsisten dari tahun 2017 ke tahun 2020, hal ini perlu diapresiasi karena pada tahun 2020 tersebut kemiskinan secara nasional meningkat dari 9,41% menjadi 9,78% namun untuk Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dari 15,52% menjadi 15,22%. Kemudian data kemiskinan pada tahun 2021, baik untuk Provinsi Gorontalo maupun nasional mengalami peningkatan. Secara keseluruhan bahwa kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih harus diperhatikan dan distimulus berbagai hal positif yang mampu menurunkan kemiskinan dan menurunkan rasio ketimpangan, terutama pada Kabupaten Pohuwato yang mengalami peningkatan rasio kemiskinan paling tinggi dari 2020 ke tahun 2021.



Gambar 3.2 Gini Ratio di Provinsi Gorontalo
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hal yang sama juga dapat dilihat rasio ketimpangan bahwa ketimpangan Provinsi Gorontalo

masih sangat tinggi dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Nasional. Namun hal yang perlu diapresiasi adalah pada tahun 2017 nilai Gini Ratio Provinsi Gorontalo berhasil ditekan dengan sangat signifikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan ini bisa dilakukan pada tahun 2022 ini, dengan adanya berbagai geliat ekonomi dan lapangan pekerjaan yang terbuka di Provinsi Gorontalo.

D. Faktor Reduksi Kemiskinan

Kemiskinan sangatlah krusial karena sangat terkait dengan kemajuan suatu daerah serta menjadi ukuran utama dalam makro ekonomi suatu daerah. Faktor yang tentu sangat krusial adalah derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari intervensi pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun berbagai hasil mengenai hal tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.2 DDF dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.22871	0.822234	25.81833	0.0000
DDF?	-0.037447	0.012208	-3.067468	0.0034
PE?	-0.422312	0.111577	-3.784947	0.0004
R-squared	0.976932	Mean dependent var		10.82569
Adjusted R-squared	0.973827	S.D. dependent var		14.96663
S.E. of regression	1.015095	Sum squared resid		53.58170
F-statistic	314.6059	Durbin-Watson stat		1.677255
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Pengolahan Data E-Views 9, 2022

Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program *E-Views* 9 di atas, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 21,228 - 0,037X_1 - 0,422X_2 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel di atas maka interpretasinya sebagai berikut ini:

1. Konstanta Sebesar 21,228 ($\alpha=21,228$)

Nilai tersebut merupakan nilai tetap kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang diamati selama periode penelitian tahun 2013-2017 apabila tidak terdapat pengaruh dari derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

2. *Unstandardized Coefficients* -0,037 ($\beta_1 = -0,037$)

Koefisien regresi variabel derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa setiap perubahan derajat desentralisasi fiskal sebesar 1% maka kemiskinan Provinsi Gorontalo akan mengalami penurunan sebesar 0,037%.

3. *Unstandardized Coefficients* -0,422 ($\beta_2 = -0,422$)

Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka kemiskinan Provinsi Gorontalo akan mengalami penurunan sebesar 0,422%.

Berdasarkan tabel di atas, didapat nilai F_{hitung} penelitian ini sebesar 314,606. Sedangkan nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dan df_1 yakni $N-k-1 = 6-2-1 = 3$ dan df_2 sebesar $nt-n-k = 60-6-2 = 52$ adalah sebesar 2,783. Jika dibandingkan nilai probabilitas atau *probability value* (*P-Value*) yang diperoleh lebih kecil

dari nilai α 0,05. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Nilai koefisien determinasi diambil dari *Adjusted R Square* karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Kemudian sebesar 97,38% besarnya kemiskinan di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan oleh derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Adapun kemampuan dari variabel lain dalam menjelaskan kemiskinan sebesar 2,62% (100%-97,38%). Variabel lain yang berdampak pada penurunan kemiskinan seperti dana transfer dari pusat untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, belanja modal, program pemerintah pusat yang berkaitan dengan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Provinsi Gorontalo.

Hasil pengujian pengaruh setiap variabel bebas derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel terikat yakni kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis, diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel derajat desentralisasi fiskal sebesar -3,067. Nilai *probability value* (P-Value) derajat desentralisasi fiskal lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0034 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Koefisien regresi yakni negatif menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kemiskinan. Dengan kata lain bahwa ketika variabel derajat desentralisasi fiskal semakin besar maka adanya alokasi yang besar dari pendapatan asli daerah untuk kepentingan pembangunan sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Peningkatan derajat desentralisasi fiskal harus terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian membuat sebuah kebijakan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh pajak serta aparat/petugas pemungut pajak yang tidak menyetorkan pajak dan retribusi secara benar. Kemudian paling penting melakukan koordinasi dan sinergitas dengan instansi lain atau organisasi lain, misalnya untuk masyarakat yang mengajukan pinjaman dipersyaratkan dokumen yang berkaitan dengan retribusi tertentu.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis, diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -3,785. Nilai *probability value* (P-Value) pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0004 <$

0,05). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Koefisien regresi yakni negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kemiskinan. Dengan kata lain, bahwa ketika variabel pertumbuhan ekonomi semakin besar maka terjadi penurunan pada kemiskinan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi tanda tingginya tingkat pendapatan masyarakat yang artinya dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

Hasil analisis ini sesuai dengan *Stakeholder Theory* sebagaimana yang diungkapkan oleh Novalistia (2016: 3), mengungkapkan bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai *stakeholder*. Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan. Dalam hal ini maka pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan ekonomi suatu daerah dengan harapan untuk menurunkan tingkat kemiskinan

daerah tersebut. Sehingga melalui hasil tersebut maka pemerintah perlu mengupayakan kemandirian masyarakat dengan bantuan modal usaha yang disertai dengan pendampingan kemudian melakukan pembangunan sarana publik sebagai mobilisasi untuk hasil-hasil pertanian dan kemudahan pemasaran berbagai produk IKM pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu berbagai kebijakan yang berdampak pada sosial ekonomi pemerintah daerah yang kemudian kebijakan ini tidak terbentur dengan berbagai program nasional atau saling mendukung antara pusat dan daerah.

E. Asimetri Unsur Pembentuk Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh unsur pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi sendiri terdiri atas 17 sektor PDRB atau PDB pembentuknya. PDRB yang tinggi tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi makin besar dan kemiskinan menurun. Adapun dampak dari setiap sektor PDRb tersebut disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 3.3 Sektor PDRB terhadap Kemiskinan Provinsi Gorontalo

Dependent Variable: KEMISKINAN?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/10/22 Time: 10:06
Sample: 1 10

Tabel 3.3 Sektor PDRB terhadap Kemiskinan Provinsi Gorontalo

Included observations: 10				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-44.16341	8.026485	-5.502211	0.0000
PDRB_A?	19.66510	1.254614	15.67422	0.0000
PDRB_B?	-0.011395	0.442128	-0.025772	0.9796
PDRB_C?	0.348502	0.407430	0.855365	0.3996
PDRB_D?	18.63117	15.22427	1.223781	0.2312
PDRB_E?	40.87236	10.53779	3.878647	0.0006
PDRB_F?	-0.076680	0.157025	-0.488327	0.6291
PDRB_G?	0.044122	0.096588	0.456806	0.6513
PDRB_H?	0.470589	0.223074	2.109568	0.0440
PDRB_I?	1.065326	0.668219	1.594276	0.1221
PDRB_J?	-0.348945	0.781208	-0.446674	0.6585
PDRB_K?	-0.251060	0.151683	-1.655162	0.1091
PDRB_L?	0.543449	0.424184	1.281164	0.2106
PDRB_MN?	17.34718	15.01885	1.155028	0.2578
PDRB_O?	0.214648	0.174636	1.229116	0.2293
PDRB_P?	-0.620763	0.324854	-1.910900	0.0663
PDRB_Q?	0.624668	0.411527	1.517926	0.1402
PDRB_RSTU?	-2.285986	1.402613	-1.629806	0.1143

Tabel 3.3 Sektor PDRB terhadap Kemiskinan Provinsi
Gorontalo

Fixed Effects (Cross)			
_KOTA--C	0.105484		
_GTLO--C	-1.509617		
_BLMO--C	1.696620		
_PHWT--C	-0.871401		
_BNBL--C	-0.534491		
_GORUT--C	1.113405		
R-squared	0.999789	Mean dependent var	16.84533
Adjusted R-squared	0.999556	S.D. dependent var	5.271157
S.E. of regression	0.111034	Akaike info criterion	-1.253440
Sum squared resid	0.345197	Schwarz criterion	-0.136456
Log likelihood	69.60320	Hannan-Quinn criter.	-0.816526
F-statistic	4288.461	Durbin-Watson stat	3.031446
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Pengolahan Data E-Views 9, 2022

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB terdiri atas 17

sektor yakni: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) *real estate*; (13) jasa perusahaan; (14) *business activities*; (15) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (16) jasa pendidikan; (17) jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Setiap sektor PDRB akan memberikan kontribusi nyata dalam upaya untuk reduksi kemiskinan, dimana dalam hal ini PDRB yang diolah adalah proporsi PDRB dalam total PDRB Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil di atas ditemukan bahwa proporsi PDRB yang mampu untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah (2) pertambangan dan penggalian, (6) konstruksi, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (16) jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keenam sektor tersebut memberikan dampak yang baik untuk lebih menurunkan kemiskinan, dimana semakin besar proporsi sektor tersebut akan semakin besar kemungkinan terjadinya reduksi kemiskinan.

Meski demikian, terjadi asimetri yang cukup krusial dimana sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar penduduk miskin malah

cenderung membuat kemiskinan makin tinggi apabila proporsi dari sektor pertanian ini semakin besar. Hal ini berarti pekerjaan di bidang pertanian belum mampu menjadi faktor katalisator bagi penurunan kemiskinan karena selama ini petani masih cenderung belum sejahtera dan terlebih lagi pertanian sebagai *leading sector* di Provinsi Gorontalo lebih banyak dinikmati oleh para pemilik modal bahkan para penampung usaha tani dibandingkan petani itu sendiri sehingga margin pemasaran untuk usaha tani tidak dirasakan oleh petani dengan baik.

Kemudian dilihat untuk setiap kabupaten/kota terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango adalah kabupaten yang mampu untuk menurunkan kemiskinan melalui optimalisasi sektor-sektor PDRB. Untuk Kabupaten Gorontalo terjadi peningkatan pada sektor pendidikan dan jasa keuangan lainnya, sementara untuk Kabupaten Pohuwato yang menjadi primadona untuk penurunan kemiskinan adalah sektor pertambangan dan konstruksi. Sementara untuk Kabupaten Bone Bolango yakni pertambangan, pendidikan dan jasa lainnya.

F. Simpulan

1. Simpulan

Ketimpangan dan tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah atau negara dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, karena kemiskinan merupakan persoalan multikompleks di dalam masyarakat. Para ahli menyimpulkan bahwa

ketimpangan dan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pilihan antarpembangunan ekonomi melalui pertumbuhan (*growth*) atau pembangunan ekonomi melalui pemerataan (*equity*). Masing pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, kependudukan, pendidikan, politik, kestabilan dan strategi yang dicanangkan oleh pemerintah di wilayah atau negara.

2. Saran

Pendekatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara seyogianya mengutamakan kondisi geografis, kependudukan, pendidikan, politik, kestabilan dan strategi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut akan memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan ekonomi sehingga mencapai target dan tujuan.

BAB 4

Daya Saing Sektor Pertanian

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi Gorontalo

Menurut Bhegawati (2019: 39) bahwa PDRB merupakan sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilih atas faktor produksi. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selama ini untuk melihat kemakmuran pada suatu daerah, maka alat ukur yang sering digunakan adalah PDRB yang mencerminkan pendapatan regional sebuah daerah. Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam penelitian ini, yang akan dilihat adalah nilai produksi barang-barang hasil pertanian yang diproduksi dalam suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Dalam teori pertumbuhan ekonomi terdapat fungsi Cobb-Douglas yang menjelaskan bahwa

pendapatan dipengaruhi oleh stok modal dan banyaknya tenaga kerja. Pendapatan dalam kajian ini adalah PDRB sektor pertanian dimana perubahannya dipengaruhi oleh pengeluaran sektor pertanian oleh pemerintah, dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan (Julia, 2016: 19).

Output pertanian berdasarkan Budiyanto dalam Julia (2016: 19) ditentukan oleh faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi pertanian. Dijelaskan pula bahwa *output* pertanian merupakan fungsi dari luas lahan, kapital, tenaga kerja, dan teknologi. Semakin luas lahan pertanian, semakin banyak kapital dan tenaga kerja, serta semakin maju teknologi, akan menyebabkan peningkatan *output* pertanian. Dengan demikian bisa dipastikan, jika belanja pemerintah untuk sektor pertanian dinaikkan (belanja langsung untuk publik) akan berdampak pada peningkatan *output* pertanian.

Menurut Soebagyo (2017: 179) bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian di satu daerah atau provinsi. Perhitungan PDRB yang sering juga disebut pendapatan regional dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian satu daerah. Perhitungan PDRB menurut pengeluaran diperinci menjadi 6 kelompok yaitu: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga swadaya yang tidak mencari keuntungan; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) pembentukan modal tetap bruto (investasi); (5) perubahan stok dan (6) *net ekspor* (ekspor dikurangi impor).

1. Analisis *Location Quotient* (LQ) PDRB

Hasil perhitungan mengenai *Location Quotient* (LQ) untuk menilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) PDRB

No.	Lap. Usaha	Rata-Rata LQ	Kategori
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.717	Unggulan
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.151	Bukan Unggulan
3.	Industri Pengolahan	0.197	Bukan Unggulan
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.067	Bukan Unggulan
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.839	Bukan Unggulan

Tabel 4.1 Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) PDRB

6.	Konstruksi	1.004	Unggulan
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.004	Unggulan
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.096	Unggulan
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0.841	Bukan Unggulan
10.	Informasi dan Komunikasi	0.791	Bukan Unggulan
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.964	Bukan Unggulan
12.	Real Estate	0.665	Bukan Unggulan
13.	Jasa Perusahaan	0.048	Bukan Unggulan
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.968	Unggulan
15.	Jasa Pendidikan	1.286	Unggulan
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.138	Unggulan
17.	Jasa Lainnya	0.827	Bukan Unggulan

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh bahwa dari 17 sektor PDRB Provinsi Gorontalo yang menjadi basis adalah; (1) sektor pertanian; (2) konstruksi; (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (4) transportasi dan pergudangan; (5) administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan sosial wajib; (6) jasa pendidikan; dan (7) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa ketika 7 sektor tersebut terus dioptimalkan maka akan memberikan dampak positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

2. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} PDRB

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai LQ_{Share} dan LQ_{Shift} PDRB di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift}

No.	Lap. Usaha	Nilai LQ_{Share}	Nilai LQ_{Shift}	Kategori
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.677	2.321	Sektor Progresif
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.137	0.050	Sektor Mundur
3.	Industri Pengolahan	0.199	0.398	Sektor Mundur
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.068	0.196	Sektor Mundur
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.811	1.260	Sektor Berkembang
6.	Konstruksi	1.024	0.393	Sektor Lamban
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.843	1.296	Sektor Berkembang
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.140	4.777	Sektor Progresif
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0.858	3.337	Sektor Berkembang
10.	Informasi dan Komunikasi	0.779	0.831	Sektor Mundur

Tabel 4.2 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift}

11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.564	1.533	Sektor Berkembang
12.	<i>Real Estate</i>	0.658	0.506	Sektor Mundur
13.	Jasa Perusahaan	0.049	0.017	Sektor Mundur
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.026	0.928	Sektor Lamban
15.	Jasa Pendidikan	1.305	2.230	Sektor Progresif
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.024	2.402	Sektor Progresif
17.	Jasa Lainnya	0.852	0.288	Sektor Mundur

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai LQ_{Share} dan nilai LQ_{Shift} dapat dijabarkan bahwa dari 7 sektor yang memiliki keunggulan, hanya terdapat 4 sektor yang berada dalam kategori progresif yakni; (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) transportasi dan pergudangan; (3) jasa pendidikan; dan (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ke empat sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan secara komparatif. Sementara itu, sektor lainnya berada dalam kategori sektor berkembang, sektor lamban bahkan terdapat sektor mundur.

3. Analisis Lokalisasi, Spesialisasi dan Basis PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai lokalisasi, spesialisasi dan basis PDRB kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.3:

Tabel 4.3 Hasil Analisis Lokalisasi, Spesialisasi dan Basis PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	PDRB	Lokalisasi	Spesialisasi	Kabupaten/ Kota Basis
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.1946	0.5243	Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.2689	0.0182	Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara
3.	Industri Pengolahan	0.1121	0.0317	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.1620	0.0004	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.4417	0.0012	Kota Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango
6.	Konstruksi	0.1352	0.0567	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Bone Bolango
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.1030	0.0716	Kota Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango
8.	Transportasi dan Pergudangan	0.2557	0.0581	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo

Tabel 4.3 Hasil Analisis Lokalisasi, Spesialisasi dan Basis PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0.2478	0.0270	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara
10.	Informasi dan Komunikasi	0.2050	0.0312	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.2567	0.0506	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo
12.	<i>Real Estate</i>	0.2906	0.0296	Kota Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara
13.	Jasa Perusahaan	0.1845	0.0009	Kota Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.1823	0.0858	Kota Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara
15.	Jasa Pendidikan	0.1825	0.0402	Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.1116	0.0280	Kota Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara
17.	Jasa Lainnya	0.1267	0.0119	Kota Gorontalo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 ditemukan bahwa koefisien lokalisasi semua sektor PDRB kabupaten/kota cenderung menyebar karena seluruh sektor PDRB memiliki nilai kurang dari *cut off* (standar). Hal ini menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Gorontalo cenderung memiliki tren data yang stabil untuk setiap kabupaten/kota. Kemudian untuk analisis spesialisasi

ditemukan bahwa semua sektor PDRB cenderung tidak spesial yang menunjukkan bahwa sumber-sumber PDRB di Provinsi Gorontalo Gorontalo memiliki potensi yang hampir sama sehingga pemerintah memiliki potensi yang besar dalam peningkatan seluruh sektor pembentuk PDRB dalam upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan Provinsi Gorontalo. Dari 17 aspek PDRB yang paling tinggi nilainya yakni sektor pertanian yang artinya bahwa pertanian masih memiliki dominasi dalam struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Kemudian hasil analisis basis ditemukan bahwa PDRB sektor pertanian menjadi basis utama di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk 2 kabupaten/kota lainnya (Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango) tidak menjadi basis utama, karena daerah tersebut memiliki perkembangan yang pesat sehingga banyak lahan pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami alih fungsi lahan sehingga pertanian bukan lagi menjadi sumber utama yang sangat diandalkan dalam peningkatan PDRB.

B. Pertanian dan Peternakan di Provinsi Gorontalo

Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan proses pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian sangat berperan penting, antara lain: potensi sumber daya alam yang banyak dan beragam, besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup

terhadap sektor pertanian dan perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Indonesia sebagai negara berkembang dikenal dengan sebutan negara agraris, yaitu negara dimana sebagian besar masyarakat bekerja dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Simanjutak dan Bhakti, 2018: 2). Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor (Mardikanto, 2007: 3). Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara. Kedua tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan

dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB. Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya, sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan (Latumaresa, 2015: 308). Pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Menurut Van Aarsten pertanian digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut (Oktavia, dkk 2017: 51)

Menurut Pratomo (2014: 57) bahwa sumbangan atau jasa sektor pertanian pada pembangunan

ekonomi terletak dalam hal (1) menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat, (2) meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier, (3) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus, (4) meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi pemerintah dan (5) memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

1. Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo

a. Analisis *Location Quotient (LQ)* Keunggulan

Komoditas hortikultura di Provinsi Gorontalo

Hasil perhitungan mengenai *Location Quotient (LQ)* untuk menilai keunggulan komoditas hortikultura di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.4:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo

No.	Tanaman	Nilai LQ					Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Bawang Merah	0.176	0.154	0.082	0.083	0.065	Bukan Unggulan
2.	Cabe Rawit	2.164	3.197	3.144	3.087	3.223	Unggulan
3.	Tomat	0.054	0.530	0.720	0.793	0.919	Bukan Unggulan
4.	Petsai	0.006	0.002	0.003	0.005	0.007	Bukan Unggulan

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh bahwa dari 4 komoditas yang diuji untuk melihat

keunggulannya ditemukan bahwa hanya cabe rawit yang menjadi sektor unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas cabe rawit mampu untuk meningkatkan tujuan dari suatu usaha pertanian yakni meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Baiknya produksi dari komoditas tersebut di Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan wilayah acuan (provinsi lainnya di Indonesia) harus senantiasa diperhatikan oleh pemerintah untuk lebih menstimulus sektor ini dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat petani. Hasil yang masuk dalam kategori basis yang dominan karena komoditas tersebut memiliki tren yang baik dan progresif dibandingkan dengan komoditas lainnya di provinsi lainnya.

b. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan

Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai LQ_{Share} dan LQ_{Shift} menilai keunggulan komoditas hortikultura di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.5:

Tabel 4.5 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo

No.	Tanaman	Nilai LQ_{Share}	Nilai LQ_{Shift}	Keterangan	Kategori
1.	Bawang Merah	0.125	0.084	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
2.	Cabe Rawit	2.629	0.584	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Lamban

Tabel 4.5 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Hortikultura di Provinsi Gorontalo

3.	Tomat	0.388	0.748	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
4.	Petsai	0.006	0.000	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 nilai LQ_{Share} dan nilai LQ_{Shift} dapat dijabarkan bahwa seluruh komoditas yang masuk dalam kategori bukan unggulan menjadi komoditas yang cenderung mundur. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas tersebut tidak memiliki keunggulan secara kompetitif maupun komparatif. Kemudian untuk cabe rawit cenderung kurang baik meskipun dalam kategori unggulan karena dalam analisis masuk dalam kriteria yang lamban. Hal ini berarti bahwa cabai rawit memiliki spesialisasi/konsentrasi sektor tersebut tinggi akan tetapi dengan laju perubahan/daya saing yang rendah. Sektor tersebut tersaing oleh sektor yang sama dari wilayah lain dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo

2. Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo

a. Analisis *Location Quotient (LQ)* Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo

Hasil perhitungan mengenai *Location Quotient (LQ)* untuk menilai keunggulan komoditas tanaman pangan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.6:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Keunggulan Komoditas
Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo

No.	Tanaman Pangan	Nilai LQ					Rata-Rata	Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Padi	0.521	0.462	0.500	0.499	0.541	0.505	Bukan Unggulan
2.	Jagung	4.295	4.316	4.356	3.803	4.037	4.162	Unggulan
3.	Kedelai	0.317	0.531	0.682	0.503	0.409	0.488	Bukan Unggulan
4.	Kacang Tanah	0.177	0.205	0.220	0.216	0.154	0.194	Bukan Unggulan
5.	Kacang Hijau	0.080	0.090	0.107	0.060	0.063	0.080	Bukan Unggulan
6.	Ubi Kayu	0.031	0.020	0.023	0.013	0.015	0.020	Bukan Unggulan
7.	Ubi Jalar	0.031	0.020	0.023	0.013	0.015	0.020	Bukan Unggulan

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh bahwa dari 7 komoditas yang diuji untuk melihat keunggulannya ditemukan bahwa untuk tanaman pangan, jagung masih menjadi komoditas pertanian yang masuk dalam kriteria unggulan. Sementara yang lainnya bukan merupakan unggulan. Hal ini karena jagung merupakan komoditas yang telah lama diintervensi dalam sebuah kebijakan agropolitan.

b. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai LQ_{Share} dan LQ_{Shift} menilai keunggulan komoditas tanaman pangan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.7:

Tabel 4.7 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Gorontalo

No.	Tanaman Pangan	Nilai LQ_{Share}	Nilai LQ_{Shift}	Keterangan	Kategori
1.	Padi	0.532	0.613	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
2.	Jagung	4.159	1.976	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
3.	Kedelai	0.366	0.965	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
4.	Kacang Tanah	0.166	0.268	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
5.	Kacang Hijau	0.072	0.120	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
6.	Ubi Kayu	0.023	0.150	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
7.	Ubi Jalar	0.110	1.148	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Berkembang

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 nilai LQ_{Share} dan nilai LQ_{Shift} dapat dijabarkan bahwa jagung menjadi komoditas yang progresif yang artinya jagung memiliki tingkat spesialisasi/konsentrasi dan laju perubahan/daya saing sektor tersebut tinggi, sektor tersebut sangat berperan dan berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kemudian untuk ubi jalar masuk dalam kriteria berkembang karena komoditas ini mulai banyak diminati menjadi produk olahan pangan. Hasil berkembang menunjukkan bahwa ubi jalar memiliki tingkat spesialisasi/konsentrasi sektor tersebut masih rendah tetapi laju perubahannya relatif tinggi, sehingga sektor tersebut mempunyai prospek yang baik untuk berperan dalam meningkatkan pendapatan petani.

Sementara itu komoditas lainnya masuk dalam kategori mundur.

3. Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo

a. Analisis *Location Quotient (LQ)* Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo

Hasil perhitungan mengenai *Location Quotient (LQ)* untuk menilai Keunggulan Komoditas tanaman perkebunan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.8:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo

		Nilai LQ						
No.	Tanaman Perkebunan							Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata	
1.	Kelapa Sawit	0.004	0.091	0.094	0.058	0.059	0.061	Bukan Unggulan
2.	Kelapa	8.340	8.120	8.623	9.051	9.519	8.731	Unggulan
3.	Kopi	0.154	0.104	0.106	0.052	0.054	0.094	Bukan Unggulan
4.	Kakao	3.043	2.504	2.369	1.887	2.020	2.365	Unggulan
5.	Tebu	5.825	9.427	9.674	9.548	8.939	8.682	Unggulan

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh bahwa dari 5 komoditas yang diuji untuk melihat keunggulannya ditemukan bahwa kelapa dalam, kakao dan tebu yang menjadi sektor unggulan. Hal ini menjadi gambaran bahwa ketiga komoditas ini bisa menjadi ciri khas tanaman perkebunan di Provinsi Gorontalo dengan upaya peremajaan yang masif dilakukan pemerintah.

b. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai LQ_{Share} dan LQ_{Shift} menilai keunggulan komoditas tanaman perkebunan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.9:

Tabel 4.9 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Tanaman Perkebunan di Provinsi Gorontalo

No.	Tanaman Perkebunan	Nilai LQ_{Share}	Nilai LQ_{Shift}	Keterangan	Kategori
1.	Kelapa Sawit	0.037	0.153	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
2.	Kelapa	8.737	1.576	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
3.	Kopi	0.095	0.196	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
4.	Kakao	2.450	2.219	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
5.	Tebu	7.627	19.187	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.9 nilai LQ_{Share} dan nilai LQ_{Shift} dapat dijabarkan bahwa seluruh komoditas yang masuk dalam kategori unggulan menjadi komoditas yang progresif. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komoditas tersebut mampu bersaing dengan komoditas sejenis di Provinsi lainnya di Indonesia.

4. Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo

a. Analisis *Location Quotient (LQ)* Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo

Hasil perhitungan mengenai *Location Quotient (LQ)* untuk menilai keunggulan komoditas peternakan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.10:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo

No.	Ternak & Unggas	Nilai LQ					Rata-Rata	Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Sapi Potong	4.687	7.834	7.724	7.428	7.876	7.110	Unggulan
2.	Kuda	1.704	2.747	2.487	1.885	1.929	2.150	Unggulan
3.	Kambing	1.797	3.035	2.848	2.842	3.043	2.713	Unggulan
4.	Babi	0.459	0.781	0.623	0.754	0.791	0.682	Bukan Unggulan
5.	Ayam Kampung	1.666	2.873	3.153	3.935	4.048	3.135	Unggulan
6.	Ayam Petelur	0.780	0.823	0.828	0.647	0.649	0.745	Bukan Unggulan
7.	Ayam Pedaging	0.780	0.823	0.828	0.647	0.649	0.745	Bukan Unggulan
8.	Itik	0.414	0.600	0.570	0.719	0.764	0.613	Bukan Unggulan

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh bahwa dari 8 komoditas peternakan, terdapat 4 komoditas yang masuk dalam kategori unggulan yakni sapi potong, kuda, kambing dan ayam kampung (ayam buras). Hal ini menunjukkan bahwa keempat komoditas ini menjadi

primadona untuk diopimalkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Provinsi Gorontalo.

b. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan

Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai LQ_{Share} dan LQ_{Shift} menilai keunggulan komoditas peternakan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.11:

Tabel 4.11 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Peternakan di Provinsi Gorontalo

No.	Ternak & Unggas	Nilai LQ_{Share}	Nilai LQ_{Shift}	Keterangan	Kategori
1.	Sapi Potong	6.304	71.013	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
2.	Kuda	1.921	56.735	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
3.	Kambing	2.426	40.370	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
4.	Babi	0.624	-17.881	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
5.	Ayam Kampung	2.757	391.614	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
6.	Ayam Petelur	0.685	0.890	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
7.	Ayam Pedaging	0.767	-0.932	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
8.	Itik	0.588	7.526	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Berkembang

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 nilai LQ_{Share} dan nilai LQ_{Shift} dapat dijabarkan bahwa dari 4 sektor yang memiliki keunggulan, semua komoditas peternakan tersebut masuk dalam kriteria yang progresif. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif

dan keunggulan secara komparatif. Sementara itu, sektor lainnya berada dalam kategori berkembang dan kategori mundur.

5. Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo

a. Analisis *Location Quotient (LQ)* Keunggulan

Komoditas perikanan di Provinsi Gorontalo

Hasil perhitungan mengenai *Location Quotient (LQ)* untuk menilai keunggulan komoditas perikanan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.12:

Tabel 4.12 Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo

No.	Perikanan	Nilai LQ				Kategori
		2019	2020	2021	Rata-Rata	
1.	Cakalang	3.718	4.618	4.842	4.393	Unggulan
2.	Tongkol	3.616	2.749	3.617	3.327	Unggulan
3.	Tuna	13.605	14.927	11.527	13.353	Unggulan
4.	Udang Laut	0.000	0.009	0.000	0.003	Bukan Unggulan
5.	Patin	0.003	0.002	0.008	0.004	Bukan Unggulan
6.	Lele	0.545	0.377	0.549	0.490	Bukan Unggulan
7.	Nila	0.545	0.377	0.549	0.490	Bukan Unggulan
8.	Ikan Mas	0.089	0.065	0.176	0.110	Bukan Unggulan
9.	Kakap	0.129	0.000	0.157	0.095	Bukan Unggulan
10.	Bandeng	3.848	2.513	3.816	3.392	Unggulan

Tabel 4.12 Hasil Analisis Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo

11.	Rumput Laut	0.148	0.172	0.153	0.158	Bukan Unggulan
12.	Kerapu	0.626	0.265	0.789	0.560	Bukan Unggulan
13.	Udang Budidaya	2.152	1.941	1.877	1.990	Unggulan

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh bahwa dari 13 komoditas yang diuji untuk melihat keunggulannya ditemukan bahwa cakalang, tongkol, tuna, bandeng dan udang budi daya yang menjadi sektor unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan yang unggulan tersebut mampu memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

b. Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan

Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo

Secara keseluruhan hasil analisis mengenai LQ_{Share} dan LQ_{Shift} menilai keunggulan komoditas perikanan di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 4.13:

Tabel 4.13 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo

No.	Perikanan	Nilai LQ_{Share}	Nilai LQ_{Shift}	Keterangan	Kategori
1.	Cakalang	4.235	0.732	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Lamban
2.	Tongkol	3.603	0.249	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Lamban

Tabel 4.13 Hasil Analisis LQ_{Share} dan LQ_{Shift} Keunggulan Komoditas Perikanan di Provinsi Gorontalo

3.	Tuna	12.667	10.983	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
4.	Udang Laut	0.000	0.000	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
5.	Patin	0.005	0.005	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
6.	Lele	0.547	1.404	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Berkembang
7.	Nila	0.905	0.019	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
8.	Ikan Mas	0.130	2.120	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Berkembang
9.	Kakap	0.141	0.017	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
10.	Bandeng	3.832	6.586	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif
11.	Rumput Laut	0.151	0.162	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
12.	Kerapu	0.697	0.065	$LQ_{Share} < 1$ dan $LQ_{Shift} < 1$	Sektor Mundur
13.	Udang Budidaya	2.018	3.465	$LQ_{Share} \geq 1$ dan $LQ_{Shift} \geq 1$	Sektor Progresif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 nilai LQ_{Share} dan nilai LQ_{Shift} dapat dijabarkan bahwa dari 5 komoditas yang masuk dalam kategori unggulan, hanya 3 komoditas yang masuk dalam kriteria progresif yakni tuna, bandeng dan udang yang menjadi gambaran bahwa komoditas tersebut memiliki keunggulan bersaing secara kompetitif maupun komparatif pada skala nasional. Sementara itu 2 komoditas lainnya yang masuk kategori unggulan namun masuk dalam kriteria lamban adalah

cakalang dan tongkol, yang artinya cakalang dan tongkol memiliki spesialisasi/konsentrasi sektor tersebut tinggi akan tetapi dengan laju perubahan/daya saing yang rendah. Sektor tersebut tersaing oleh sektor yang sama dari wilayah lain dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

BAB 5

Kebijakan Fiskal Sektor Pertanian

A. Kebijakan Fiskal

Fiskal menjadi hal yang digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan, yang dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan untuk pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Akhmad, dkk (2013: 10) mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal sektor pertanian, dapat meningkatkan PDRB sektor pertanian dan pendapatan petani. Sementara belanja modal non-pertanian dapat mendorong investasi swasta. Selanjutnya investasi swasta dapat mendorong peningkatan produk domestik regional non pertanian. Disamping itu investasi swasta juga dapat menurunkan angka pengangguran. Sementara kemiskinan dapat diturunkan seiring dengan peningkatan produk domestik regional bruto

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan penajaman prioritas, pembangunan sektor pertanian masih memerlukan dukungan keberpihakan dan komitmen dari para penentu kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penajaman prioritas ini pada gilirannya harus tercermin dalam alokasi pendanaan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran merupakan cerminan dari keberpihakan dan komitmen para pengambil kebijakan dalam memajukan sektor pertanian di suatu daerah. Dinamika kebijakan fiskal dan kinerja sektor pertanian merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan pembangunan pada suatu daerah (Jabuddin, 2019: 1).

Menurut Darsono dalam Dinda Julia (2016: 10), kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran memiliki tiga fungsi, yaitu: (1) fungsi alokasi (*allocation function*); (2) fungsi distribusi (*distribution function*); dan (3) fungsi stabilisasi (*stabilization function*). Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang sosial atau proses penggunaan sumber daya keseluruhan yang dibagi diantara barang privat dan barang sosial serta kombinasi barang sosial yang dipilih. Fungsi distribusi berkaitan dengan pembagian pendapatan dan kekayaan yang lebih adil dan merata dikalangan masyarakat, dimana fungsi ini terkait dengan kesetaraan atau pemerataan distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi adalah salah satu fungsi kebijakan fiskal untuk mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi (*high employment*), stabilitas tingkat harga-harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sesuai.

Fungsi-fungsi tersebut seluruhnya berpengaruh pada neraca perdagangan dan pembayaran. Pada prinsipnya kebijakan tersebut mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

B. Kebijakan Fiskal dalam Peningkatan PPDRB Sektor Pertanian

1. Arah Kebijakan Investasi Sektor Pertanian dalam Rangka Pembangunan Pertanian dan Peningkatan PDRB Sektor Pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Hasil analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Hasil Analisis ICOR Provinsi Gorontalo

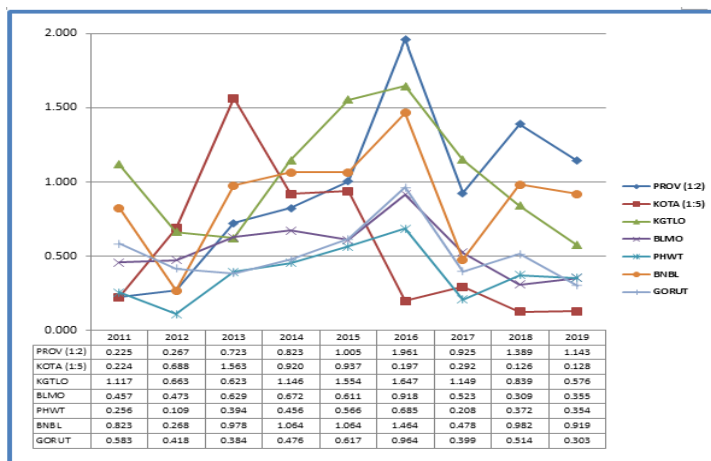
No.	Tahun	ICOR Provinsi Gorontalo		
		I	ΔY	ICOR
1.	2011	167,371,343,389	371,792,788,972	0.450
2.	2012	195,058,021,611	365,554,315,320	0.534
3.	2013	678,166,241,917	468,740,000,000	1.447
4.	2014	766,458,417,315	465,730,000,000	1.646
5.	2015	655,860,087,016	326,290,000,000	2.010
6.	2016	2,023,012,590,225	515,750,000,000	3.922
7.	2017	1,432,498,378,022	774,010,000,000	1.851
8.	2018	1,965,593,374,486	707,680,000,000	2.778
9	2019	1,448,008,413,386	633,520,000,000	2.286

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel analisis *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Provinsi Gorontalo dapat diketahui bahwa pada tahun 2011-2016 nilai

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Gorontalo terus mengalami kenaikan yang berarti bahwa kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan *output* dari investasi yang dilakukan cenderung kurang optimal. Nilai ICOR tahun 2013-2019 untuk Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori yang tidak efisien yang artinya investasi dalam bidang pertanian dari pemerintah Provinsi Gorontalo belum memberikan efek yang setara dengan peningkatan nilai PDRB. Untuk itu kedepannya Provinsi Gorontalo harus terus meningkatkan nilai investasi baik oleh pemerintah maupun swasta karena investasi yang dilakukan sangatlah layak karena jumlah nilai investasi lebih kecil daripada kenaikan nilai *output* atau nilai-tambah yang dihasilkan, namun untuk hasil yang lebih baik maka investasi dari pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dan perlu untuk pendataan kembali secara menyeluruh terutama bagi mereka yang memperoleh bantuan bibit dan lainnya berdasarkan dana dekonsentrasi namun tidak memiliki lahan lagi sehingga bibit hanya dijual.

Sementara itu, untuk hasil yang lebih detail maka dioptimalkan dengan analisis ICOR dari tiap kabupaten/kota. Hasil dari ICOR Provinsi Gorontalo beserta kabupaten/kota disajikan dalam grafik sebagai berikut ini:



Gambar 5.1 ICOR Provinsi Gorontalo Beserta Kabupaten/Kota

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Pengaruh Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Bidang Pertanian, Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Bidang Pertanian dan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian terhadap PDRB Sektor Pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

Hasil analisis dengan bantuan program *E-Views* 9 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: LN_PDRBP?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/25/20 Time: 06:35

Sample: 1 10

Included observations: 10

Cross-sections included: 6

Total pool (balanced) observations: 60

Tabel 5.2 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.12118	0.824300	30.47577	0.0000
LN_DAU?	0.097002	0.018375	5.279095	0.0000
LN_DAK?	0.013443	0.032686	0.411287	0.6826
LN_TP?	0.006531	0.001982	3.295911	0.0018
Fixed Effects (Cross)				
_KOTA--C	-1.131958			
_KGTLO--C	0.851026			
_BLMO--C	0.251471			
_PHWT--C	0.504375			
_BNBL--C	-0.289846			
_GORUT--C	-0.185068			
R-squared	0.974234	Mean dependent var		27.66050
Adjusted R-squared	0.970192	S.D. dependent var		0.814243
F-statistic	241.0420	Durbin-Watson stat		0.840011
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews versi 9, 2020

a. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,970192. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 97,019% variabilitas produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan oleh alokasi Dana Alokasi Umum

(DAU) dalam bidang pertanian, Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pertanian, dan dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Pertanian. Sedangkan sisanya sebesar 2.981% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pendapatan perkapita petani, tingkat harga komoditas pertanian, dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan peran petugas di lapangan yang membuat investasi lebih tepat sasaran.

b. Hasil Pengujian Serempak

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga hipotesis diterima. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bidang pertanian, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pertanian, dan dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

C. Pengujian Parsial

1. Pengaruh Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Bidang Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bidang pertanian lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_{a1} yang menyatakan bahwa

alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bidang pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (*alpha* 0,05) alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bidang pertanian berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif bermakna bahwa semakin besar investasi dalam bidang pertanian oleh pemerintah melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bidang pertanian akan memberikan efek baik dalam meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

2. Pengaruh Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Bidang Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pertanian lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,6826 > 0,05$), maka H_{a2} yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pertanian berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (*alpha* 0,05)

alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pertanian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pertanian yang diperuntukan bagi sektor pertanian maka akan membuat produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan namun dengan hasil *output* yang masih fluktuasi.

3. Pengaruh Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi dana tugas pembantuan (TP) kementerian pertanian lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $(0,0018 < 0,05)$, maka H_{a3} yang menyatakan bahwa dana tugas pembantuan (TP) kementerian pertanian berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) dana tugas pembantuan (TP) kementerian pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif

menunjukkan bahwa semakin besar stimulus kementerian pertanian dalam bentuk dana tugas pembantuan (TP) maka akan membuat pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo makin meningkat yang pada akhirnya akan berdampak baik bagi pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

D. Keuangan Daerah dan Rasio Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Di dunia bisnis maupun di organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Bahkan, di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Menurut Elmi (2007: 16), bahwa penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan

sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah adalah gambaran hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien serta untuk melihat kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu dalam kurun waktu tertentu.

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan mengenai efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 5.3:

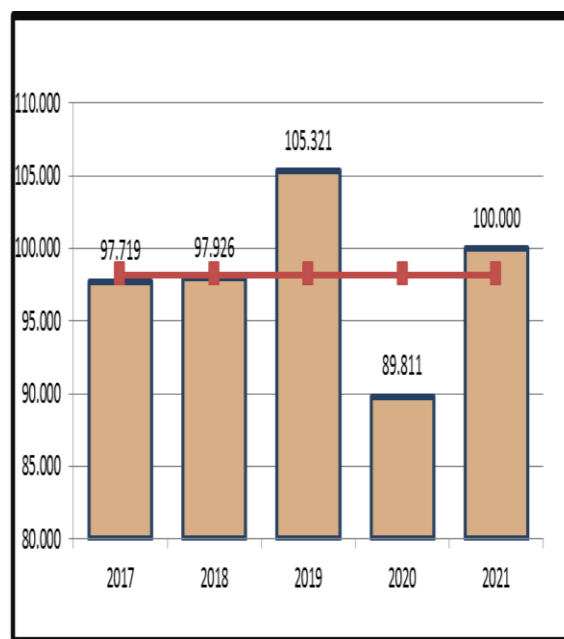
Tabel 5.3 Hasil Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD	
			(%)	Kriteria
2017	356,398,685,000	348,267,663,013	97.719	Efektif
2018	392,576,085,811	384,435,306,403	97.926	Efektif
2019	411,531,175,256	433,427,781,399	105.321	Sangat Efektif
2020	461,928,720,750	414,861,588,272	89.811	Cukup Efektif
2021	405,055,721,419	405,055,721,420	100.000	Efektif
Rata-Rata			98.155	Efektif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.3 diperoleh bahwa rata-rata efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 98,155% yang berada pada kriteria yang

efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mampu dalam mencapai target PAD yang telah ditentukan, dimana dengan PAD yang tinggi ini maka kemandirian daerah akan semakin baik. Nilai efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) cenderung fluktuatif dengan nilai capaian efektivitas terendah yakni pada tahun 2020 dengan kategori cukup efektif.



Gambar 5.2 Rasio Efektivitas PAD
Sumber: Dokumentasi Pribadi

2. Efektivitas Pajak Daerah

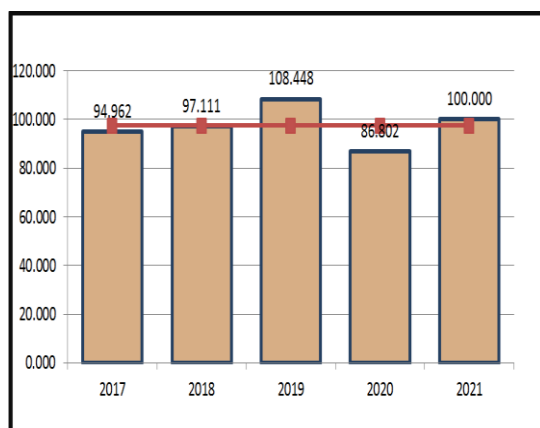
Hasil perhitungan mengenai efektivitas pajak daerah di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 5.4:

Tabel 5.4 Hasil Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	
			(%)	Kriteria
2017	326,098,685,000	309,671,369,999	94.962	Efektif
2018	360,849,905,661	350,425,924,306	97.111	Efektif
2019	357,224,194,342	387,400,916,778	108.448	Sangat Efektif
2020	405,719,555,999	352,171,235,900	86.802	Cukup Efektif
2021	343,683,585,030	343,683,585,030	100.000	Efektif
Rata-Rata			97.465	Efektif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.4 diperoleh bahwa rata-rata efektivitas pajak daerah sebesar 97,465% yang berada pada kriteria yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah mencapai hasil yang baik dalam optimalisasi pajak yang dilihat dari kemampuan dalam mengoptimalkan pajak daerah untuk tingkatan provinsi tersebut.



Gambar 5.3 Rasio Efektivitas Pajak Daerah
Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Efektivitas Retribusi Daerah

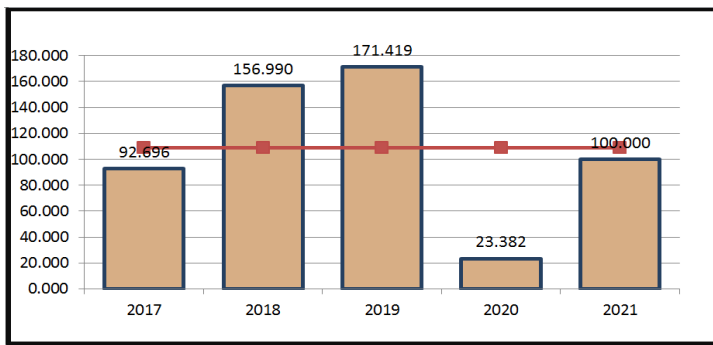
Hasil perhitungan mengenai efektivitas retribusi daerah di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 5.5:

Tabel 5.5 Hasil Efektivitas Retribusi Daerah

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi (Rp)	Rasio Efektivitas Retribusi Daerah	
			(%)	Kriteria
2017	6,000,000,000	5,561,754,786	92.696	Efektif
2018	7,325,000,000	11,499,494,159	156.990	Sangat Efektif
2019	13,000,000,000	22,284,470,358	171.419	Sangat Efektif
2020	27,782,347,079	6,496,155,533	23.382	Tidak Efektif
2021	11,098,089,991	11,098,089,990	100.000	Efektif
Rata-Rata			108.897	Sangat Efektif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.5 diperoleh bahwa rata-rata efektivitas retribusi daerah sebesar 108.897% yang berada pada kriteria yang sangat efektif. Meski dalam kategori efektif rata-ratanya, namun pada tahun 2020 mengalami hasil yang tidak efektif karena adanya pandemi Covid-19. Optimalisasi retribusi ini yakni dengan kemudahan perizinan agar lebih baik lagi di Provinsi Gorontalo dan optimalisasi berbagai jenis retribusi lainnya.



Gambar 5.4 Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Sumber: Dokumentasi Pribadi

4. Efisiensi

Hasil perhitungan mengenai efisiensi di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 5.6:

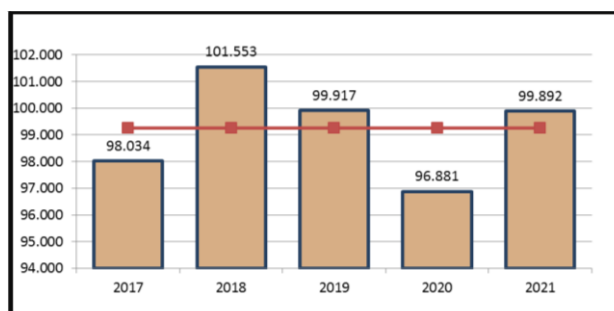
Tabel 5.6 Hasil Efisiensi

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	
			(%)	Kriteria
2017	1,738,195,528,213	1,773,047,305,717	98.034	Efisien
2018	1,828,164,979,480	1,800,201,701,297	101.553	Tidak Efisien
2019	1,939,458,991,539	1,941,076,769,546	99.917	Efisien
2020	1,804,550,378,713	1,862,646,444,966	96.881	Efisien
2021	1,912,519,212,780	1,914,589,120,420	99.892	Efisien
Rata-Rata			99.255	Efisien

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh bahwa rata-rata efisiensi sebesar 99,25% yang berada pada kriteria yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo mampu menjaga stabilitas belanja dan pendapatannya agar tidak terjadi defisit pada anggaran. Adanya berbagai

progres pembangunan dan investasi menjadi potensi bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya baik dari sumber daya alam sendiri maupun dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.



Gambar 5.5 Rasio Efisiensi
Sumber: Dokumentasi Pribadi

5. Rasio keserasian

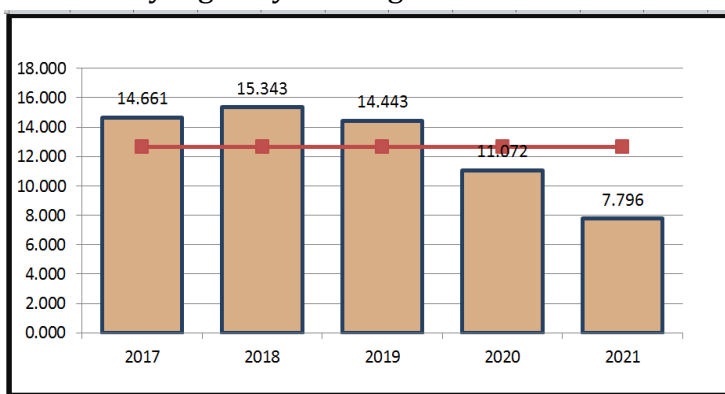
Hasil perhitungan mengenai Rasio keserasian di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 5.7:

Tabel 5.7 Hasil Rasio Keserasian

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Keserasian
2017	254,842,224,955	1,738,195,528,213	14.661
2018	280,499,513,763	1,828,164,979,480	15.343
2019	280,120,727,914	1,939,458,991,539	14.443
2020	199,795,684,855	1,804,550,378,713	11.072
2021	149,095,156,390	1,912,519,212,780	7.796
Rata-Rata			12.663

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.7 diperoleh bahwa rata-rata rasio keserasian sebesar 12,663%. Rasio ini tidak memiliki kriteria yang pasti namun semakin besar maka akan semakin baik karena pembangunan sarana dan prasarana untuk berbagai kemudahan kegiatan ekonomi makin baik. Hasil tabel di atas cenderung rendah yang artinya pemerintah Provinsi Gorontalo masih harus melakukan peningkatan pada belanja modalnya terutama dalam penanganan jalan-jalan di Provinsi Gorontalo yang banyak mengalami kerusakan.



Gambar 5.6 Rasio Keserasian
Sumber: Dokumentasi Pribadi

6. Rasio kemandirian

Hasil perhitungan mengenai rasio kemandirian di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 5.8:

Tabel 5.8 Hasil Rasio Kemandirian

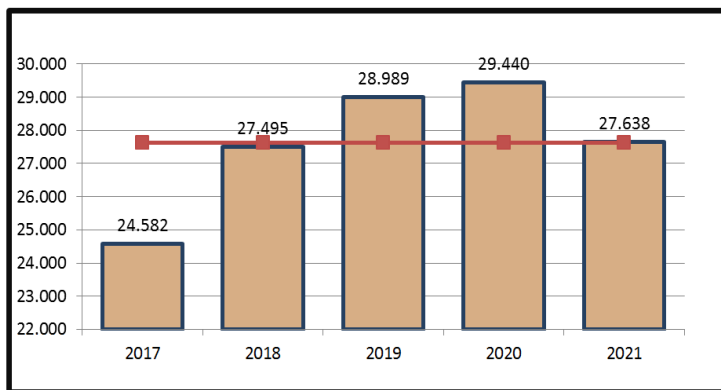
Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian	
			(%)	Kriteria
2017	348,267,663,013	1,416,764,276,967	24.582	Konsultatif
2018	384,435,306,403	1,398,182,154,507	27.495	Konsultatif

Tabel 5.8 Hasil Rasio Kemandirian

2019	433,427,781,399	1,495,154,617,824	28.989	Konsultatif
2020	414,861,588,272	1,409,195,376,886	29.440	Konsultatif
2021	405,055,721,420	1,465,550,080,000	27.638	Konsultatif
Rata-Rata			27.629	Konsultatif

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5.8 diperoleh bahwa rata-rata rasio kemandirian sebesar 27,629% yang berada pada kriteria yang rendah atau pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kriteria yang konsultatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo masih sangat mengalami ketergantungan terhadap aspek fiskal pada pemerintah pusat. Besarnya ketergantungan ini karena pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah secara nominal memang meningkat namun hanya karena nilai waktu uang yang meningkat bukan pada berbagai potensi yang berhasil dengan efektif untuk dikembangkan. Sehingga kedepannya perlu adanya intervensi kebijakan yang dibarengi dengan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan investasi di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.



Gambar 5.7 Rasio Kemandirian
Sumber: Dokumentasi Pribadi

E. Reduksi Gini Ratio melalui PDRB, Belanja Modal Fungsi Ekonomi dan Belanja Modal Fungsi Pariwisata dan Budaya

Gini ratio merupakan rasio ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah, dimana hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang dipilih dalam hal ini adalah faktor yang secara teori dan fakta lapangan mampu benar-benar bisa dioptimalkan untuk mereduksi rasio ketimpangan tersebut. Faktor tersebut yakni PDRB yang dalam hal ini peneliti lakukan 1 tahun, dimana PDRB tahun $t-1$ akan berpengaruh pada gini ratio pada tahun t . Sementara faktor lainnya yakni belanja modal yang difokuskan pada fungsi stimulus ekonomi dan fungsi pariwisata dan budaya. Adapun hasil reduksi gini ratio melalui PDRB, belanja modal fungsi ekonomi & belanja modal fungsi pariwisata dan budaya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.9 Pengaruh PDRB, Belanja Modal Fungsi Ekonomi dan Belanja Modal Fungsi Pariwisata dan Budaya terhadap Gini Ratio

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.412	.590		4.090	.001
PDRB	-.045	.017	-.561	-2.598	.019
1 Belanja Modal (Ekonomi)	-.024	.010	-.666	-2.510	.023
Belanja Modal (Pariwisata)	-.003	.004	-.215	-.773	.451
F hitung: 3,996		P Value F hitung: 0,027			
R² : 0,428			Adjusted R² : 0,321		

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 5.9 ditemukan bahwa secara parsial PDRB dan belanja modal fungsi ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap gini ratio tahun 2017-2021. Sementara untuk belanja modal fungsi pariwisata dan budaya berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap gini ratio tahun 2017-2021. Hasil koefisien negatif menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu untuk mereduksi gini ratio atau ketimpangan di Provinsi Gorontalo, sehingga kedepannya pemerintah Provinsi Gorontalo perlu untuk mengoptimalkan PDRB terutama yang menjadi unggulan dan progresif yakni: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (2) transportasi dan pergudangan; (3) jasa pendidikan; dan (4) jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kemudian perlu pula

meningkatkan belanja modal terutama yang berkaitan dengan stimulus ekonomi serat pariwisata dan budaya karena hal ini akan berdampak pada adanya pengembangan integrasi UMKM dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Secara simultan, hasil ketiga variabel juga signifikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 42,80%.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka peruntukkan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2012). Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, adanya korelasi yang kuat antara *share* belanja investasi dengan tingkat desentralisasi.

Peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah hingga meningkatkan belanja modal dari suatu daerah. Pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan

pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Hal tersebut karena dengan infrastruktur yang berdampak baik bagi usaha petani dan lainnya maka akan berdampak pada pertumbuhan dan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat sehingga pendapatan perkapita menjadi naik yang dampak akhirnya yakni pada naiknya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat kemiskinan.

F. Kesenjangan Sektor Ekonomi tersebut terhadap Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten/Kota Kawasan Teluk Tomini

Analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari aspek senjangan ekonomi terhadap daya saing daerah, dimana senjangan ekonomi diukur dari *Williamson Indeks*. Data diklasifikasikan per provinsi agar dapat diketahui bahwa daerah di provinsi mana yang terbaik terlebih lagi proporsi kabupaten/kota di Kawasan Teluk Tomini untuk 3 provinsi relatif sama yakni Sulawesi Utara sebanyak 6 kabupaten/kota, Sulawesi Tengah sebanyak 6 kabupaten/kota dan Gorontalo sebanyak 5 kabupaten/kota. Selanjutnya dalam membuktikan dampak variabel kesenjangan sektor ekonomi tersebut terhadap peningkatan daya saing daerah maka akan dilakukan kajian lebih lanjut berdasarkan statistik inferensial yang digunakan yaitu model analisis regresi data panel yang dibantu oleh alat *software eviws* 9.

1. Hasil Analisis Regresi

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesenjangan ekonomi terhadap daya saing daerah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan *E-views* 9 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Hasil Analisis Regresi Model *Fixed*

Dependent Variable: LQ?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 03/29/22 Time: 11:03				
Sample: 1 13				
Included observations: 13				
Cross-sections included: 3				
Total pool (balanced) observations: 39				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.794063	0.391956	12.23112	0.0000
IW?	-41.57260	4.406934	-9.433452	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_GTLO--C	-0.921593			

Tabel 5.10 Hasil Analisis Regresi Model *Fixed*

_SULTENG--C	0.535975		
_SULUT--C	0.385618		
Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.929472	Mean dependent var	1.096754
Adjusted R-squared	0.923427	S.D. dependent var	0.089846
S.E. of regression	0.024862	Akaike info criterion	4.454044
Sum squared resid	0.021634	Schwarz criterion	4.283423
Log likelihood	90.85387	Hannan-Quinn criter.	4.392827
F-statistic	153.7532	Durbin-Watson stat	1.104492
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Olahan E-Views 9, 2022

Dari hasil analisis diatas maka model regresi antara kesenjangan ekonomi terhadap daya saing daerah adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}=4,794 - 41,573X$$

Adapun interpretasi dari model regresi di atas yakni:

a. Nilai Konstanta Keseluruhan

Nilai konstanta sebesar 4,794 merupakan nilai konstan yang berarti bahwa apabila pengaruh

dari variabel kesenjangan ekonomi diabaikan, maka nilai pada variabel daya saing daerah sebesar 4,794 satuan. Hal ini memiliki makna bahwa ketika tidak terjadi senjangan ekonomi maka daya saing daerah dalam kategori yang unggul (basis) karena nilai LQ pada konstanta lebih besar dari standar (*cut off*) angka 1 satuan.

b. Koefisien Regresi

Nilai Koefisien dari variabel kesenjangan ekonomi sebesar -41,573 menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi yang mengalami kenaikan akan menurunkan daya saing daerah di regional Sulawesi. Sehingga peningkatan kesenjangan ekonomi sebesar 1% diikuti dengan penurunan daya saing daerah sebesar -41,573%.

c. Perbandingan Hasil Tiap Provinsi

Penelitian ini menggunakan model *fixed* sehingga dalam penelitian ini terdapat nilai-nilai konstanta dari tiap provinsi. Hasil pada tabel di atas diperoleh konstanta untuk kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Gorontalo sebesar -0.921593, kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0.535975, dan kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0.385618. Dari hasil ini maka dapat diketahui bahwa kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan nilai konstanta tertinggi dengan nilai yang positif yang berarti bahwa daya saing daerah di kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini

Provinsi Sulawesi Tengah yang dinilai dari tiap item PDRB akan mengalami kenaikan ketika tidak adanya intervensi pengaruh dari kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Utara dengan konstanta positif yang berarti bahwa kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Utara memiliki progres daya saing yang baik apabila tidak terjadi berbagai fenomena senjangan ekonomi. Sementara untuk kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Gorontalo diperoleh hasil yang negatif bahwa kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Gorontalo, mengalami penurunan daya saing meskipun tidak adanya pengaruh dari kesenjangan ekonomi yang dalam hal ini daya saing kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Gorontalo dapat meningkat dan menurun bukan hanya dipengaruhi oleh senjangan ekonomi.

2. Pengujian Hipotesis

Adapun hasil pengujian hipotesis dengan bantuan program *E-Views* 9 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Hasil Uji Hipotesis

Model	t-Hitung	Sig	tTabel	Keterangan
Constant	12.23112	0.0000		
Kesenjangan ekonomi	-9.433452	0.0000	2,026	Negatif & Signifikan

Sumber: Data Olahan E-Views 9, 2022

Hasil analisis pada tabel 5.11 menunjukkan hasil pengujian hipotesis yakni nilai t -hitung untuk kesenjangan ekonomi terhadap daya saing daerah adalah sebesar -9,433. Sedangkan nilai t -tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas $n-k-1$ atau $39-1-1=37$ sebesar 2,026. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t -hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t -tabel ($9,433 > 2,026$). Selain itu apabila kita membandingkan nilai signifikan (P_{value}), maka dapat dilihat bahwa nilai P_{value} (0,0000) dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Sehingga kesenjangan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap daya saing daerah di regional Sulawesi. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan kesenjangan ekonomi akan berdampak kurang baik bagi daya saing daerah dimana daya saing daerah akan mengalami penurunan.

Adapun hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh kesenjangan ekonomi pada setiap subsektor LQ PDRB dapat dilihat pada tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12 Hasil Uji Hipotesis Tiap Subsektor

No.	Model	t -Hitung	Sig	Hasil	Keterangan (Prov Terbaik)		
					GTLO	SULTENG	SULUT
1.	IW -> LQ_SS1	3.654186	0.0011	Positif & Signifikan	1	2	3
2.	IW -> LQ_SS2	-3.939636	0.0005	Negatif & Signifikan	3	1	2
3.	IW -> LQ_SS3	-6.382416	0.0000	Negatif & Signifikan	3	2	1

Tabel 5.12 Hasil Uji Hipotesis Tiap Subsektor

4.	IW -> LQ_SS4	-3.218616	0.0034	Negatif & Signifikan	2	3	1
5.	IW -> LQ_SS5	-2.608298	0.0149	Negatif & Signifikan	3	1	2
6.	IW -> LQ_SS6	-1.458774	0.1566	Negatif Tidak Signifikan	2	3	1
7.	IW -> LQ_SS7	-3.568414	0.0014	Negatif & Signifikan	3	2	1
8.	IW -> LQ_SS8	-2.720097	0.0115	Negatif & Signifikan	2	3	1
9.	IW -> LQ_SS9	5.190642	0.0000	Positif & Signifikan	1	3	2
10.	IW -> LQ_SS10	0.851268	0.4024	Positif Tidak Signifikan	3	2	1
11.	IW -> LQ_SS11	-2.695486	0.0122	Negatif & Signifikan	1	3	2
12.	IW -> LQ_SS12	8.242872	0.0000	Positif & Signifikan	3	2	1
13.	IW -> LQ_SS13	-4.586476	0.0001	Negatif & Signifikan	2	1	3
14.	IW -> LQ_SS14	0.192329	0.8490	Positif Tidak Signifikan	1	3	2
15.	IW -> LQ_SS15	4.22822	0.0003	Positif & Signifikan	2	1	3
16.	IW -> LQ_SS16	-2.229483	0.0346	Negatif & Signifikan	2	3	1
17.	IW -> LQ_SS17	0.983688	0.3343	Positif Tidak Signifikan	1	3	2

Sumber: Data Olahan *E-Views* 9, 2022

Hasil analisis pada tabel 5.12 menunjukkan hasil untuk setiap subsektor bahwa terdapat 10 subsektor yang terdapat dampak negatif ketika terjadi peningkatan kesenjangan ekonomi di wilayah kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota kasawan Teluk Tomini Provinsi

Gorontalo. Sementara itu untuk 7 subsektor lainnya memiliki dampak positif karena subsektor tersebut menjadi tanda adanya perbaikan kesenjangan atau menjadi alternatif dalam kegiatan ekonomi apabila terjadi sebuah kesenjangan dalam ekonomi pada suatu wilayah.

3. Interpretasi Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,9295. Nilai ini berarti bahwa sebesar 92,95% daya saing daerah di regional Sulawesi dijelaskan oleh kesenjangan ekonomi. Sementara itu sebesar 7,05% menjadi variabilitas variabel lain terhadap daya saing daerah seperti variabel kebijakan fiskal daerah, progresivitas potensi ekonomi dan perencanaan strategis daerah yang tepat.

BAB 6

Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Barometer Perguruan Tinggi

Penelitian tentang efektivitas pengelolaan perguruan tinggi di beberapa negara menunjukkan bahwa mutu kepemimpinan dan manajemen merupakan variabel terpenting untuk membedakan antara perguruan tinggi yang berhasil dan tidak (Sammon et, al. 1994). Temuan ini merefleksikan bahwa manajemen tidak boleh lagi dianggap sebagai suatu aspek pendidikan yang pasif dan tidak dapat disesuaikan dengan dinamika perguruan tinggi saat ini. Manajemen yang berkualitas akan menampakkan perbedaan antara perguruan tinggi yang baik dan tidak.

Peningkatan kualitas manajemen pendidikan tinggi seperti di Amerika Serikat, Eropa dan Australia telah menjadi ukuran para pihak dan masyarakat dunia untuk menentukan preferensi mereka dimana mereka akan memilih kelurganya untuk melanjutkan studi. Hal ini sebagai bagian dari keinginan pemerintah untuk menyerahkan sepenuhnya manajemen pendidikan tinggi di negara-negara tersebut. Tanggung jawab tersebut mencakup manajemen keuangan, dan aspek-

aspek manajemen lain yang berkaitan erat dengan interaksi lembaga pendidikan tinggi.

Bingkai dari keseluruhan aktivitas yang tertuang dalam strategi pengelolaan perguruan tinggi haruslah sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan martabat bangsa dimana tujuan utamanya adalah mencapai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang tidak dibatasi oleh kepentingan kelompok haruslah menjadi tuntutan para pihak untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Pendekatan holistik di atas bukan hanya mempertimbangkan aspek dalam sistem manajemen pendidikan, namun juga mempertimbangkan aspek keragaman beragama dengan penghayatan akhlak paripurna tadi akan menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan, berperan sebagai penyelesaian masalah (*problem solver*) bukan bagian dari masalah (*part of the problem*), dari pembangunan umat beragama seperti itu juga akan menjadi bagian dari masyarakat multikultur Indonesia, yang bersedia hidup berdampingan dengan damai bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air dalam budaya inklusifisme tapi penuh toleransi dan kerukunan sejati.

Manajemen pendidikan yang berorientasi jangka panjang tidak cukup merespons peristiwa atau fenomena saat ini, namun secara khusus strategi manajemen pendidikan tinggi membutuhkan waktu dan periode tertentu yang direfleksikan dalam perencanaan pembangunan pendidikan untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh para pihak yang

bertanggung jawab terhadap manfaat yang diimplementasikan bagi setiap *output* perguruan tinggi dalam masyarakat yang lebih luas.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar tentang pandangan kita terhadap perguruan tinggi yaitu penciptaan titik ekuilibrium antara input, proses, *output* dan *outcome* dalam dunia akademis yang merupakan kejadian institusionalisasi mekanisme pasar yang dibentuk oleh proses akulturasi masyarakat dalam menilai dan menelaah suatu perguruan sebagai bagian dari para pihak penentu arah kemana perguruan tinggi berkembang.

Walau bagaimanapun tekanan para pihak untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi menjadi suatu keharusan untuk dituangkan dalam konsensus pengembangan perguruan tinggi kedepan dalam perspektif titik ekuilibrium agar tradisi perguruan tinggi sebagai dapurnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan pokok dari setiap para pihak dalam pengalokasian sumber daya yang semakin langka sehingga dapat memperkecil kegagalan asumsi-asumsi dasar penerapan ilmu pengetahuan sebagai respons balik dari fenomena-fenomena dan permasalahan terkini.

Dalam lingkungan yang cukup bersaing, kebutuhan akan kemampuan manajemen dalam mencapai target keberhasilan pengelolaan perguruan tinggi juga sebagai tolok ukur meyakinkan para pihak menjadi wajib hukumnya. Mengapa? Karena perguruan tinggi identik dengan multiproduk dalam kinerja organisasi yang dikatkan dengan tuntutan dan peran

saat ini terutama hubungannya dengan ilmu ekonomi dan sosial, meskipun *core* usahanya tetap dalam wilayah pengajaran dan penelitian. Batasan peran perguruan tinggi perlu dihadirkan dalam suatu dimensi baru kehidupan perguruan tinggi sehingga tidak terjebak dalam kritikan dan tekanan para pihak bahkan secara signifikan bahwa manajemen perguruan tinggi dapat memainkan peran.

Kejadian yang begitu banyak tentang kondisi perguruan tinggi saat ini yang diidentikan dengan suatu pemaksaan kehendak terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian keberhasilan perguruan tinggi pada sisi lain dalam operasionalisasi dalam meningkatkan kinerja usaha juga sebagai bagian dari kontrol sosial dalam peran yang lebih luas. Selanjutnya perguruan tinggi mengasumsikan bahwa para pihak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam manajemen. Tidak terdapat suatu nilai manajemen utama diperguruan tinggi melainkan proses pengajaran dan penelitian yang bermutu sebagai jawaban dari agenda lingkungan yang berkembang dalam permasalahan dan solusi. Bangsa ini sangat membutuhkan lebih banyak lagi perguruan tinggi yang sukses terutama perguruan tinggi yang tidak lagi melihat status, karena model pengelolaan perguruan tinggi secara total berdampak pada perbaikan kinerja perguruan tinggi.

Posisi sistem dalam pengajaran dan penelitian berkontribusi positif terhadap pengembangan mutu *output* sebagai bentuk persaingan dalam lingkungan perguruan tinggi. Signal untuk menunjukkan kekuatan

sistem terformulasi dalam setiap skema yang diarahkan oleh pimpinan dalam radius yang wajar dan terukur. Meskipun demikian dalam dunia yang sangat maju ini, untuk mencapai tujuan dalam berbagai aspek dan agenda perguruan tinggi yang luas kembali tercermin dari setiap input yang diproses.

B. Landasan Teori

Cohen dan March (1974) dalam Curry (2002) menggunakan sudut pandang teori perilaku organisasi menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak hanya inkonsisten dalam tujuannya tetapi juga banyak diwarnai konflik internal. Mereka menyebut PT sebagai *organized anarchies*, sebuah organisasi yang dalam sudut pandang operasional tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Terlepas dari setuju atau tidak dengan pernyataan ini, bekerja sebagai administrator (termasuk sebagai rektor) di PT menjadi sangat menantang. Metafor yang paling tepat untuk menggambarkan situasi ini adalah seperti memimpin pelayaran dengan kapal layar yang memanfaatkan kekuatan angin dan ombak, dan bukan seperti memimpin kapal mesin. Angin dan ombak adalah ibarat kekuatan dari bagian-bagian dan anggota organisasi yang harus disinergikan bukan diseragamkan untuk mencapai tujuan.

Dari sudut pandang yang lain, PT oleh Brookes (2003) disebut sebagai industri *quasi-commercial*. Di satu sisi PT ingin memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, tetapi di pihak lain, prinsip-prinsip manajemen industri komersial harus dijalankan untuk

mendapatkan dana guna mendukung keberlangsungan hidupnya. Menurut Brookes, PT harus memberikan batas demarkasi tanggung jawab, peran, aturan main yang jelas antara wilayah yang harus dikelola dengan prinsip komersial dan wilayah yang disediakan untuk akademik. Jika ini tidak dilakukan, banyak konflik kepentingan yang muncul ke permukaan. Dari perspektif yang berbeda, Lovelock (1983) mengidentifikasi lima karakteristik yang melekat pada sebuah institusi pendidikan:

1. Sifat Pelayanan (*the nature of the service act*)

Layanan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan lebih mengarah kepada hal yang bersifat intangible *people based* daripada hal-hal yang bersifat fisik *equipment based*. Dalam proses pelayanan juga melibatkan aksi-aksi yang intangible. Hubungan dengan konsumen (*the relationship with the customer*). Layanan pendidikan melibatkan hubungan dengan konsumen yang berlangsung lama dan bersifat formal serta dilakukan terus-menerus (*continuous*). Mahasiswa sebagai konsumen mempunyai hubungan keanggotaan (*membership relationship*) dengan pihak Universitas. Hal ini memungkinkan terbentuknya loyalitas konsumen yang tinggi (pihak mahasiswa) dan peningkatan kualitas layanan terhadap konsumen (pihak Universitas).

Tingkat kustomisasi dan penilaian pelayanan (*the level of customization and judgement in service delivery*). Tingkat kustomisasi pendidikan sangat bervariasi. Tutorial dengan peserta sedikit atau

bimbingan individual akan lebih mudah dikustomisasi daripada pendidikan dengan banyak peserta. Semakin terkustomisasinya layanan yang ditawarkan menjadikan konsumen memiliki tingkat pengharapan yang tinggi terhadap kualitas layanan, terutama terkait dengan kualitas staf pengajar. Jika demikian, masalah yang akan muncul adalah kemungkinan adanya hubungan antara kualitas dan tingkat keragaman.

Prof. Ki Supriyoko dalam tulisannya (2003) menyatakan bahwa *Theodore Brameld* dalam karyanya *Cultural Foundation of Education* (1957) menyatakan adanya keterkaitan yang erat antara pendidikan dengan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama, dalam hal ini ialah pengembangan nilai. Sementara itu Edward B. Tylor dalam karyanya *Primitive Culture* (1929) menulis apabila kebudayaan mempunyai tiga komponen strategis, yaitu sebagai tata kehidupan (*order*), suatu proses (*process*), serta bervisi tertentu (*goals*), maka pendidikan merupakan proses pembudayaan. Masih menurut Tylor, tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa adanya masyarakat, sebaliknya tidak ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa adanya pendidikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas kita dapat memposisikan pendidikan dengan kebudayaan di dalam tata hubungan yang saling memengaruhi (*reciprocalrelationship*) atau pendidikan merupakan variabel yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan di dalam tata hubungan

asimetris di mana suatu variabel memengaruhi variabel yang lainnya (*causal asymetrical relationship*). Terhadap pembangunan nasional, hubungan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Paradigma yang pertama, pembangunan nasional adalah variabel bebas (*independent variable*) sedangkan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional merupakan variabel tergantung (*dependent variable*). Sementara itu paradigma kedua, pembangunan nasional merupakan variabel bebas (*independent variable*), kebudayaan nasional adalah variabel antara (*intervening variable*) sedangkan pendidikan nasional merupakan variabel tergantung (*dependent variable*). Baik kita mengaplikasi paradigma pertama maupun paradigma kedua, keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan amat ditentukan oleh sejauh mana kita dapat mengembangkan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Kalau kita dapat mengembangkan pendidikan nasional serta kebudayaan nasional secara memadai maka keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan akan dapat dicapai lebih baik lagi .

Perguruan tinggi pada dasarnya adalah jasa. Menurut Daulat P. Tampubolon dalam buku *Perguruan Tinggi Bermutu* (2001) bahwa produk perguruan tinggi yang sepenuhnya adalah jasa pendidikan tinggi yang terdiri atas jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa pengabdian pada masyarakat, jasa administrasi, dan jasa ekstrakurikuler. Lulusan

perguruan tinggi adalah produk parsial. Dalam buku ini dinyatakan bahwa perguruan tinggi adalah suatu sistem, yaitu struktur yang terdiri dari berbagai komponen yang berkaitan erat satu sama lain secara fungsional, sehingga merupakan keterpaduan yang sinergis. Dalam komponen-komponen itu terjadi proses-proses yang sesuai dengan fungsi masing-masing, tetapi tidak eksklusif atau sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan, saling mendukung dan saling memengaruhi satu sama lain.

Pemahaman tentang mutu dalam buku ini yaitu mutu berkenaan dengan sifat dari suatu yang baik. Sifat yang baik itu terdiri dari kecantikan, keindahan, kelezatan makanan, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran. Pemahaman baru tentang mutu perguruan tinggi yaitu sebagai kesesuaian sifat produknya dengan kebutuhan pelanggan, terutama mahasiswa (pelanggan primer) dan dunia kerja (pelanggan tersier) dimana keseluruhan terpadu dalam perhatian penentuan mutu. Karena seluruh sistem, proses, serta produk perguruan tinggi harus memenuhi kebutuhan pelanggan, terutama mahasiswa dan dunia kerja. Maka pelanggan dengan kebutuhan mereka harus diidentifikasi serta diketahui secara objektif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Simon Marginson dan Mark Considine dalam buku *The Enterprise University (2000)* yaitu *"University mission and governing bodies start to take on a distinctly corporate character (drawn not so much from*

business itself as from an 'ideal form' corporation modelled in public sector reform), marketing mediates much of the relationship with the world outside, and performance target are superimposed on scholarly honorifics". Pengertian dari definisi ini yaitu misi dan sistem Universitas memiliki sifat dan orientasi yang berbeda dengan misi dan sistem yang berlaku di usaha publik dimana hubungannya dengan dunia luar terpola dalam capaian supremasi dan kehormatan keilmuan.

Selanjutnya dalam buku ini ditegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki definisi kualitas yaitu *"Definition of quality and line of accountability are drawn less from traditional public sector and political culture, and more from private sector and the culture of economic consumption, where expressed through university-student relations, universities industry relation or university-government relations".* Pengertian tentang definisi kualitas sebuah Universitas yaitu bertalian dengan tanggung jawab tercermin dari tradisi sektor publik dan kultur politik, terlebih lagi dari sektor swasta dan kultur sektor ekonomi yang terungkap pada hubungan langsung antar mahasiswa dengan Universitas, Universitas dengan industri atau hubungan Universitas dengan pemerintah.

Selanjutnya pemahaman tentang *good governance* dalam buku yang sama difokuskan pada pengertian atau definisi *governance* yaitu *"Here is Governance is broadly defined to encompass internal relationship, external relationship and the*

intersection between them. Institution such as universities are double structured, by internal configuration of power, and by their intersection with out side interest". Pengertian definisi *governance* untuk mengarahkan hubungan internal dan eksternal serta interaksi antar mereka. Lembaga seperti Universitas digandakan strukturnya kekuatan konfigurasi internal dan interaksi mereka dengan kepentingan luar.

Secara rinci dalam buku ini *governance* dibagi dalam lima prinsip yaitu: *First, there is a new kind of executive power characterized by a will to manage and, in some respects a freedom to act greater then was the case. Second, there are structures innovations, the remaking or replacement of collegial of democratic forms of governance with structures that operationalise executive power and create selective mechanisms for participation, consultation and internal market research. Third, we find an enhanced flexibility of personal and resources, of means of communication, and of the very location of power and outhority.* Pengertian tiga prinsip dasar *governance* di Universitas yaitu: (1) terdapat suatu jenis kekuatan baru yang diperankan oleh keinginan mengelola dan menghargai kebebasan untuk melakukan tindakan yang lebih besar dibanding dengan masalahnya; (2) terdapat inovasi terstruktur bahwa kekuatan eksekutif yang dijalankan dan menciptakan mekanisme yang terukur untuk partisipasi, konsultasi dan pasar penelitian internal; (3) kita menemukan suatu

upaya personal dan sumber daya yang fleksibel, arti dari sebuah komunikasi, kewenangan dan tempat yang sangat kuat.

Dalam laporan UNDP “*Human Development Report 1999*” (1999) disebutkan secara jelas ciri-ciri globalisasi sebagai berikut: (1) *ethic*, adapun maksudnya ialah tuntutan untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM; (2) *inclusion*, maksudnya ialah adanya tuntutan untuk memperkecil perbedaan-perbedaan antarbangsa; (3) *human security*, yaitu adanya tuntutan sanggup mengeliminasi instabilitas sosial; (4) *sustainability*, yaitu adanya tuntutan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan; serta (5) *development*, adanya kesanggupan untuk berusaha mengakhiri kemiskinan dan deprivasi.

Jiwa dari globalisasi itu sendiri, adalah informasi yang tidak terbatas (*borderless information*). Di dalam situasi yang seperti ini terjadilah proses lintas budaya (*trans cultural*) serta silang budaya (*cross cultural*) yang kemudian mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lainnya. Pertemuan nilai-nilai budaya, atau disebut kontak budaya (*cultural contact*), dapat menghasilkan dua kemungkinan. Pertama, pertemuan tanpa menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna disebut dengan asimilasi (*assimilation*). Serta kedua, pertemuan yang membuahkan nilai-nilai baru yang bermakna disebut akulturasi (*acculturalization*).

C. Permasalahan

Wujud dari pengelolaan perguruan tinggi melalui standar manajemen yang baik dan terpercaya saat ini yaitu nampak pada capaian peringkat yang dinilai dan diproses oleh suatu lembaga pendidikan tinggi internasional yang dikenal dengan nama *World University Ranking*. Lembaga ini secara independen memberikan penilaian dan pelaporan secara resmi tentang keadaan perguruan tinggi seluruh dunia. Dari peringkat yang ada, terdapat beberapa Universitas di Indonesia yang berhasil masuk dalam peringkat dunia, meskipun peringkat tersebut berada di antara 200-300 Universitas terbaik dunia yaitu pada tahun 2005 Universitas Gadjah Mada mencapai rangking 341, Institut Teknologi Bandung mencapai rangking 408 dan Universitas Indonesia mencapai rangking 420.

Capaian prestasi ini cukup memukau pada tahun 2006 dimana Universitas Gadjah Mada mencapai rangking 270, Institut Teknologi Bandung mencapai rangking 258, dan Universitas Indonesia mencapai rangking 250 serta Universitas Diponegoro berada pada peringkat 495. Namun tahun 2007 capaian rangking tersebut mengalami penurunan yaitu Universitas Gadjah Mada turun pada rangking 360, Institut Teknologi Bandung turun ke rangking 369 dan Universitas Indonesia turun ke peringkat 395 dan diikuti Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga berada pada peringkat 400-5000. Upaya perbaikan peringkat kembali tercapai pada tahun 2008 yaitu Universitas Gadjah Mada di peringkat 316, Institut Teknologi Bandung di peringkat 315 dan Universitas

Indonesia berhasil memperbaiki peringkat ke 287 Universitas terbaik dunia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia ternyata peringkat Indonesia berada dibawahnya. Oleh karena HDI terbangun atas indikator ekonomi pendidikan, kesehatan, dan kependudukan hal itu berarti bahwa tingkat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kependudukan manusia Indonesia berada di bawah Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia.

Dalam era yang serba materialistik seperti sekarang ini daya kompetisi ekonomi juga dapat dipacu untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Implikasinya negara yang daya kompetisi ekonominya tinggi mengindikasikan keberhasilan pembangunan yang tinggi. Sebaliknya, negara yang daya kompetisi ekonominya rendah mengindikasikan keberhasilan pembangunan yang rendah pula. Selanjutnya dari laporan *World Economic Forum* (WEF), suatu badan internasional yang berbasis di Geneva, di dalam dokumennya berjudul "*Global Competitiveness Report 2000*" (2000), menunjukkan demikian rendahnya peringkat Indonesia di dalam hal daya kompetisi ekonomi tersebut.

Tabel 6.1 Peringkat Kampus Versi Webometrics

No.	Tanaman Pangan	Jenis PT	Peringkat	
			Nasional	Internasional
1.	Poltekes Gorontalo	PTN	225	8,104
2.	Universitas Negeri Gorontalo	PTN	243	8,396
3.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	PTN	319	10,066
4.	Univ. Muhammadiyah Gorontalo	PTS	440	12,702
5.	Univ. Gorontalo	PTS	525	14,171
6.	Politeknik Gorontalo	PTS	894	19,917
7.	Univ. Ichsan Gorontalo	PTS	907	20,053
8.	Univ. Bina Mandiri Gorontalo	PTS	1,749	27,525
9.	STIMIK Ichsan Gorontalo	PTS	1,845	28,067
10.	STIA Bina Taruna Gorontalo	PTS	2,005	28,779
11.	STITEK Bina Taruna Gorontalo	PTS	2,094	29,175

Sumber: Webometrics, 2022

Pada indeks peringkat saing global indonesia tahun 2001 hanya berada pada peringkat 44 sementara itu Singapura, Malaysia, Republik Korea, Thailand, dan Filipina masing-masing sudah ada di peringkat 2, 25, 29, 31 dan 37 dan tahun 2007-2008 terus mengalami penurunan yaitu beradar di peringkat 54 dengan skor 4,24 diantara 57 negara. Dengan indikator yang serupa bahkan *International Institute for Management Development* (2001) telah memosisikan Indonesia di peringkat 49 dari 49 negara. Dalam hal ini negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya,

semua berada di atas peringkat Indonesia.

Keadaan ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi kita memang lebih rendah dibanding tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Dalam skala mikro belum maksimal atas keberhasilan pembangunan kita di bidang pendidikan dapat dicermati dari kegagalan delegasi Indonesia di forum *International Mathematic Olympic (IMO)* yang diselenggarakan secara kontinu di setiap tahunnya. Demikian juga dengan hasil kompetisi siswa Indonesia pada forum *The Third International Mathematic and Science Study (TIMSS)* yang tidak pernah memuaskan.

Ramon Mohandas di dalam laporan penelitiannya dengan titel "*Report On TheThird International Mathematics and Science Study (TIMSS): Indonesian Student Achievement in Mathematics and Science Compared to Other Countries*" (2000) menuliskan buruknya prestasi matematika dan sains siswa Indonesia di dalam forum dunia tersebut. Dalam bidang matematika siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 39 dari 42 negara partisipan. Sedangkan untuk bidang sains siswa Indonesia hanya berhasil menempati peringkat 40 dari 42 negara partisipan. Baik di dalam bidang matematika maupun sains ternyata prestasi siswa Indonesia berada di bawah prestasi siswa dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya.

Sementara itu, dalam hal kemampuan membaca, siswa Indonesia juga tidak berhasil memperlihatkan prestasi terbaiknya. Laporan World Bank dalam

"Education in Indonesia: From Crisis to Recovery" (1988) telah mengutip hasil penelitian Vincent Greanary yang menyatakan bahwa kemampuan membaca (*reading ability*) anak-anak Indonesia berada pada peringkat paling bawah dibandingkan dengan anak-anak Asia pada umumnya. Dalam hal ini kemampuan membaca anak-anak Indonesia berada di bawah anak-anak Filipina, Thailand, Singapura, serta Hong Kong. Tabel dibawah ini merupakan bagian penting atau titik awal dalam proses pendidikan tinggi secara nasional dimana potret pendidikan dapat menjadi bagian penting dalam merespons pertanyaan di atas.

Formula yang lazim digunakan untuk mengetahui keadaan pendidikan termasuk di perguruan tinggi yaitu melalui penerapan model angka partisipasi kasar (APK) dimana penduduk yang berumur 20 tahun dibagi dengan jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan tinggi sehingga selisi tersebut menjadi patokan bagi pemerintah mengetahui keadaan penduduk yang sedang mengikuti pendidikan tinggi pada tahun tertentu. Jika kita telaah pada tabel di atas nampak mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai tahun 2008, yang sangat menarik bahwa angka partisipasi perempuan untuk mengikuti pendidikan diperguruan tinggi melampaui angka partisipasi laki-laki meskipun pada tahun 2008 nampak terjadi peningkatan pada angka partisipasi laki-laki untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Aspek lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja sistem perguruan tinggi yaitu

pembukaan perguruan tinggi baru dengan menggunakan asumsi bahwa di daerah tersebut memiliki angka partisipasi kasar yang tinggi. Namun dapatlah dilihat pada bagan dibawah ini bahwa daerah yang memiliki keterkaitan antara pertumbuhan angka partisipasi kasar dengan pembukaan perguruan tinggi baru hanya terdapat di dua daerah yaitu Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewah Yogyakarta dan Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah III Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya diikuti oleh Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah I Sumatra Utara dan Nangro Aceh Darussalam dan Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah IX Sulawesi. Sementara Wilayah lain dapat dikategorikan hampir tidak memiliki keterkaitan antara pembukaan perguruan tinggi baru dengan angka partisipasi kasar di wilayah tersebut.

Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa perguruan tinggi swasta sangat mendominasi kuantitasnya di setiap wilayah di Indonesia dan belum diikuti oleh peningkatan jumlah angka partisipasi kasar. Sehingga itu kinerja perguruan tinggi dalam meningkatkan angka partisipasi kasar masih rendah dan belum memiliki keterkaitan dengan pembukaan perguruan tinggi baru di seluruh Wilayah Indonesia. Selanjutnya kita dapat menelaah dari disparitas *output* pendidikan yang terserap dalam dunia kerja, nampak seperti pada tabel di bawah masih didominasi oleh *ouput* berpendidikan SLTA dan *ouput* yang berpendidikan SLTP berada pada urutan kedua, selanjutnya pada urutan ketiga yaitu SD, sedangkan

untuk *output* diploma dan Universitas berada pada urutan ke empat atau terakhir. Selanjutnya dapat kita lihat di tabel di bawah ini tentang penyerapan *output* lembaga pendidikan di pasar tenaga kerja.

Keadaan jumlah tenaga kerja atau tren dari tahun ke tahun pada umumnya didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu 3695504 tahun 2004, tahun 2005 naik menjadi 5106915 namun pada tahun tahun 2006 mengalami penurunan yaitu 4156708, dan terus menurun pada tahun 2007 yaitu 4070553 dan sampai Februari 2008 tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan SLTA berjumlah 3369959. Disusul tenaga kerja yang berpendidikan SLP pada tahun 2004 mencapai 2690912 dan mengalami kenaikan pada tahun 2005 yaitu 3151231, namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu 27730045 selanjutnya pada tahun 2007 terus menurun yaitu 2264198 dan pada Februari 2008 berjumlah 2166619.

Hal yang cukup mengembirakan yaitu tenaga kerja yang berpendidikan Diploma dan Universitas terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2004 tenaga kerja berpendidikan Diploma 237251 meningkat menjadi 308522. Pada tahu 2005 dan tahun 2006 mengalami penurunan 278074 namun tahun 2007 kembali mengalami kenaikan 397191 serta tahun 2008 519867. Tenaga kerja yang berpendidikan Universitas terus mengalami kenaikan yaitu 348107 tahun 2004, terus naik pada tahun 2005 mencapai 395538 dan tahun 2006 terus naik yaitu 395554 begitu juga tahun 2007 naik mencapai 566588, dan tahun 2008 mencapai 626602. Nampak bahwa tenaga

kerja berpendidikan Diploma dan Universitas terus mengalami kenaikan sedangkan tenaga kerja berpendidikan SLTA dan SLTP terus mengalami penurunan.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada plot area di bawah tentang keadaan pendidikan tenaga kerja Indonesia nampak fluktuatif namun cukup landai, meskipun pada tahun 2005 mengalami kenaikan namun pada tahun 2006 sampai 2008 nampak semakin menurun seiring dengan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang banyak sekaligus didukung oleh penciptaan program pendidikan yang lebih variatif baik untuk tingkat pendidikan SLTA maupun tingkat pendidikan Universitas.

Hal ini dapat dilihat pada plot data di bawah, dimana tenaga kerja dimasing-masing tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu tenaga kerja yang berpendidikan SLTA, diikuti oleh tenaga kerja yang berpendidikan SLTP yang bersaing dengan jumlah tenaga kerja berpendidikan SD, untuk tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Diploma/Akademi berada pada urutan keempat dari bawah, selanjutnya terakhir yaitu tenaga kerja yang berpendidikan tinggi.

Posisi *output* perguruan tinggi yang berada pada urutan terakhir nampak menjadi tantangan bagi perguruan tinggi dimana pendidikan saat ini sudah lebih diarahkan pada industri jasa yang manual produknya dalam bentuk kurikulum pendidikan untuk ditransformasi kepada konsumen dalam bentuk proses belajar dan mengajar antar-guru/dosen dan

mahasiswa. Agar konsumen semakin tertarik dengan produk kurikulum tersebut penting adanya filosofi ini diaktualisasikan dalam bentuk peningkatan sistem pengelolaan pendidikan sehingga mutu *output* pendidikan diperguruan tinggi akan semakin terserap didunia usaha. Di bawah ini merupakan fakta tentang kinerja *output* pendidikan secara nasional dalam orientasi penyerapan tenaga kerja dan disparitasnya pada masing-masing *output* lembaga pendidikan dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas, Akademi dan Universitas.

Sehingga dapatlah kita menggaris bawahi bahwa tenaga kerja yang berpendidikan SD dan SLTP masih cukup tinggi di Indonesia meskipun sedikit mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana tenaga kerja ini lebih banyak terserap di sektor-sektor informal dan sektor pertanian. Kapasitas pendidikan dari jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SD dan SLTP berpengaruh langsung terhadap permintaan tenaga kerja karena lapangan pekerjaan saat ini semakin melirik tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup, sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja tenaga kerja juga memengaruhi pendapatan para tenaga kerja dan jelas akan memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. Berdasarkan uraian masalah di atas akan memformulasi beberapa pertanyaan yaitu: (1) apakah efektif sistem kelembagaan pendidikan tinggi nasional?; (2) bagaimana proses penerapan sistem manajemen kelembagaan nasional pendidikan tinggi?; (3) sejauh mana *output* pendidikan nasional mengembangkan

kinerja dan *good governance*.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo

Konsep pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat komponen di atas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan kemampuan manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan di tempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas (UNDP 2001 dalam Sulaiman, 2012).

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun nonfisik (mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.

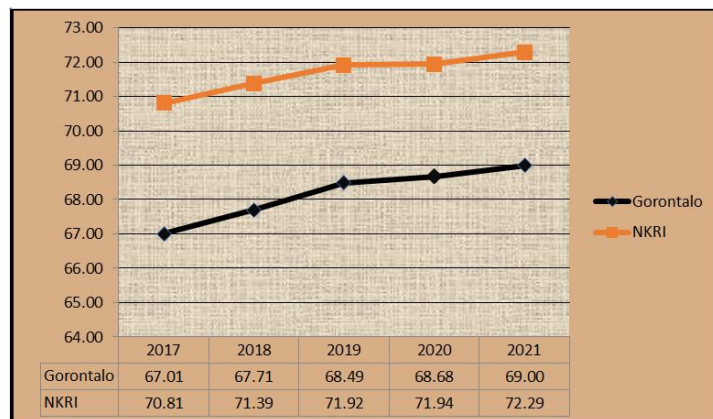
Gambaran mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo disajikan pada tabel 6.2:

Tabel 6.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Daerah	IPM (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Gorontalo	76.09	76.53	77.08	77.13	77.41
2.	Kab. Gorontalo	64.95	65.78	66.69	66.92	67.34
3.	Kab. Boalemo	64.22	64.99	65.53	65.91	66.42
4.	Kab. Pohuwato	63.88	64.44	65.27	65.37	65.80
5.	Kab. Bone Bolango	68.11	69.06	69.63	69.98	70.25
6.	Kab. Gorontalo Utara	63.52	64.06	64.52	64.86	65.21
7.	Provinsi	67.01	67.71	68.49	68.68	69.00
8.	Indonesia	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29

Sumber: Data olahan, 2022

Berdasarkan tabel 6.2 diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo selama 2017-2021 cenderung dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dimana kabupaten yang masih cenderung rendah nilai IPM-nya yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Kabupaten lainnya ini perlu belajar dari Kabupaten Bone Bolango yang pada tahun 2021 sudah berada dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Kemudian data Provinsi Gorontalo ini jika dibandingkan dengan data nasional, masih lebih rendah kecuali untuk Kota Gorontalo yang sudah baik sekali dan untuk Bone Bolango menunjukan tren yang sangat baik.



Gambar 6.1 IPM di Provinsi Gorontalo

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Ramirez, 2018). Pembangunan manusia dikelilingi oleh manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan (Yunita, 2012). Pada tingkat makro, angka harapan hidup lahir dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode berakibat penurunan umur harapan hidup (BPS, 2018). Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara.

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator dalam mengukur pembangunan manusia melalui indeks pendidikan, kesejahteraan masyarakat akan berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga angka harapan lama sekolah akan semakin meningkat. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin meningkat produktifitas seseorang sehingga akan meningkatkan pendapatan baik individu maupun secara nasional. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Faturrohimin, 2011).

E. Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Pertanian di Provinsi Gorontalo

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya dalam pendapatan nasional (Simanjuntak, 1998). Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah/banyaknya orang yang bekerja sebagai petani tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo.

Menurut Sumarsono (2009), faktor-faktor yang memengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain: (1)

kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal; (2) elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan; (3) proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi; (4) elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya. Jadi, semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap, maka akan semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja (Simanjuntak, 1998). Pada industri kecil, permintaan akan tenaga kerja tidak dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap barang yang akan diproduksi, dengan kata lain hanya berorientasi *supply*, sehingga berapapun jumlah tenaga kerja yang digunakan tidak tergantung pada berapa target *output* yang harus dihasilkan. Pada kondisi ini pengusaha dapat menjual berapa saja produksinya dengan harga yang berlaku. Dalam memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dapat dipekerjakannya.

1. Persamaan Regresi Berganda

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, tahap selanjutnya dilakukan pemodelan data untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis dengan bantuan program SPSS ditampilkan pada tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: PTKP
Method: Least Squares
Date: 08/01/22 Time: 06:51
Included observations: 32

Tabel 6.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.64782	3.378554	5.815453	0.0000
NTP	-0.071560	0.033043	-2.165692	0.0390
PDRB_P	0.586332	0.553983	1.058394	0.2989
PP	-0.508465	0.469315	-1.083419	0.2879
R-squared	0.246735	Mean dependent var		15.48881
Adjusted R-squared	0.166028	S.D. dependent var		0.966700
S.E. of regression	0.882811	Akaike info criterion		2.705057
Sum squared resid	21.82194	Schwarz criterion		2.888274
Log likelihood	-39.28092	Hannan-Quinn criter.		2.765789
F-statistic	3.057167	Durbin-Watson stat		0.408616
Prob(F-statistic)	0.044593			

Sumber: Eviews versi 9, 2022

Berdasarkan angka pada kolom *Unstandardized Coefficients*, maka persamaan regresi berganda yakni sebagai berikut ini:

$$\hat{Y} = 19,647 - 0,071X_1 + 0,586X_2 - 0,508X_3 + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Variabel Konstanta ($\alpha = 19,647$)

Nilai konstanta sebesar 19,647 menunjukkan jika tidak terdapat pengaruh dari variabel nilai tukar petani, *share* PDRB sektor pertanian, dan pembiayaan pertanian, maka nilai penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo akan mengalami peningkatan sebesar 19,647%.

b. Variabel X_1 ($\beta_1 = -0,071$)

Nilai koefisien regresi variabel X_1 (nilai tukar petani) sebesar 0,071 menunjukkan setiap peningkatan nilai tukar petani sebesar 1% akan menurunkan (karena tanda -) penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo sebesar 0,071%. Dengan asumsi variabel *share* PDRB sektor pertanian dan pembiayaan pertanian dengan nilai yang konstan atau *ceteris paribus*.

c. Variabel X_2 ($\beta_2 = 0,586$)

Nilai koefisien regresi variabel X_2 (*share* PDRB sektor pertanian) sebesar 0,586 menunjukkan setiap peningkatan jumlah *share* PDRB sektor pertanian sebesar 1% akan meningkatkan (karena tanda +) penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo sebesar 0,586%. Dengan asumsi variabel nilai tukar petani dan pembiayaan pertanian dengan nilai yang konstan atau *ceteris paribus*.

d. Variabel X3 ($\beta_3 = -0,508$)

Nilai koefisien regresi variabel X₃ (pembiayaan pertanian) sebesar -0,508 menunjukkan setiap peningkatan pembiayaan pertanian sebesar 1% maka akan menurunkan (karena tanda -) penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo sebesar 0,508%. Dengan asumsi variabel nilai tukar petani, dan *share* PDRB sektor pertanian dengan nilai yang konstan atau *ceteris paribus*.

2. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai F_{hitung} penelitian ini sebesar 3,057. F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dan df_1 sebesar $k = 3$ dan df_2 sebesar $N-k-1=32-3-1=28$ adalah sebesar 2,947. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F_{hitung} yang diperoleh jauh lebih besar F_{tabel} kemudian nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,044 < 0,05$) sehingga hipotesis diterima. Artinya nilai tukar petani, *share* PDRB sektor pertanian, dan pembiayaan pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo juga dapat meningkatkan nilai PDRB sektor pertanian karena memberikan pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja karena dengan meningkatnya nilai PDRB ataupun jumlah ekspor sektor pertanian akan lebih membuka peluang pekerjaan pada sektor ini. Perlunya bagi pemerintah untuk membuat sebuah

kebijakan yang menjaga stabilitas harga dari tiap komoditas pertanian agar tidak membuat petani enggan untuk menanam dan beralih pada usaha lain atau bahkan menjual lahannya untuk kepentingan tertentu. Kemudian terus memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pertanian agar hasil pertanian lebih melimpah dan menambah pendapatan perkapita dari petani. Kemudian perlunya bagi petani untuk melakukan pemanfaatan lahan tidur untuk menggenjot jumlah produksi. Kemudian bekerja sama dengan pemerintah yang melakukan transformasi struktural ekonomi dan mengurangi pemanfaatan jumlah tenaga kerja yang besar di sektor pertanian namun tetap mempertahankan produksi dengan penggunaan teknologi yang memadai dan terjangkau bagi petani.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,166028. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 16,603% variabilitas penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan oleh nilai tukar petani, *share* PDRB sektor pertanian, dan pembiayaan pertanian. Sedangkan sisanya sebesar 83.397% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti ketersediaan lapangan kerja dalam bidang pertanian, kompetensi dan keterampilan petani, pendapatan perkapita petani, dorongan lingkungan sekitar dan tingkat harga komoditas pertanian.

Kemampuan dari nilai tukar rupiah dalam menjelaskan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo sebesar 28,328%. Kemudian untuk *share* PDRB sektor pertanian sebesar 15,497% serta untuk pembiayaan pertanian sebesar 11,843%. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang paling krusial dalam menaikkan dan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo yakni nilai tukar petani yang merupakan ukuran kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo.

Penyerapan tenaga kerja khususnya dalam bidang pertanian di Provinsi Gorontalo pada dasarnya mengalami sebuah dilema tersendiri, dimana ada peralihan yang dilakukan oleh tenaga kerja pertanian. Misalnya dapat dilihat pada Kabupaten Gorontalo yang petaninya rata-rata bekerja sebagai petani jagung namun karena masuknya HTI di kabupaten tersebut, banyak petani yang beralih menjadi tenaga kerja di tempat tersebut. Adapula petani atau sebagian besar kawula muda yang kurang memiliki *skill* dalam usaha tertentu misalnya untuk IKM, sehingga beralih menjadi petani. Hal-hal inilah yang menyebabkan data mengenai penyerapan tenaga kerja dalam bidang pertanian cenderung kurang stabil. Kinerja perekonomian Provinsi Gorontalo yang digambarkan oleh perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini terjadi di semua sektor perekonomian. Dimana dari segi kontribusinya,

maka sektor pertanian di Provinsi Gorontalo masih yang paling dominan dengan nilai PDRB yang terus menunjukkan angka yang positif.

4. Pengujian Parsial

a. Pengaruh Nilai Tukar Petani terhadap Penyerapan tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel nilai tukar petani sebesar -2,165. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang sebesar 2,048. Maka t_{hitung} yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} . Nilai signifikansi nilai tukar petani lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,0390 < 0,05$), maka H_{a1} yang menyatakan bahwa nilai tukar petani berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo diterima. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) nilai tukar petani berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilai tukar petani dalam hal ini. Bagi petani dengan status kepemilikan lahan sebagai pemilik atau pemilik penggarap maka menandakan adanya tingkat kesejahteraan petani yang kemudian mengubah pola pikir petani untuk mencoba usaha lain diluar sektor pertanian yang dirasakan lebih menguntungkan.

Adanya preferensi pada hal-hal yang lebih prestise oleh petani ketika petani tersebut sudah

merasa sejahtera. Misalnya ada seorang petani yang sudah sukses dengan usaha tani yang digeluti kemudian akan tertarik untuk menjadi pengumpul atau distributor sarana produksi untuk pertanian yang kemudian bisa saja tertarik lagi pada hal lain yang jauh dari kaitannya dengan pertanian, misalnya menjadi seorang kontraktor. Hal ini karena pertanian dalam suatu strata sosial masyarakat dipandang kurang prestise sehingga jika sudah sukses ada orang-orang yang berpandangan untuk melakukan diversifikasi usaha.

Sementara itu dari aspek lain juga dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan petani yang sudah merasa sejahtera untuk lebih memilih untuk menggunakan teknologi sehingga hal ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang akan digunakan untuk proses pengolahan tanah hingga panen. Misalnya peralatan yang digunakan yakni alat bantu tanam yang kemudian dapat mengurangi penggunaan tenaga kerja yang disebut dengan regu tanam. Sehingga dengan fenomena dan hasil ini dapat dikatakan bahwa semakin sejahtera petani khususnya yang berstatus sebagai pemilik lahan atau pemilik penggarap maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja pertanian dalam hal ini yakni buruh tani.

Penurunan juga ini terjadi bukan hanya karena adanya kesejahteraan petani namun ada dukungan hal lain yang membuat buruh tani yang

tadinya bekerja sebagai petani akan berpindah sebagai buruh bangunan karena akhir-akhir ini Gorontalo memiliki tingkat pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat. Hal ini jika dibiarkan maka akan berdampak pada kelangkaan tenaga kerja pertanian di Gorontalo yang sebagai contohnya pada tukang panjat kelapa yang sudah mulai sulit untuk ditemukan dan walaupun ada tarifnya sudah mulai mahal.

b. Pengaruh Share PDRB Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Share PDRB sektor pertanian sebesar 1,058. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang sebesar 2,048. Maka t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Nilai signifikansi *share* PDRB sektor pertanian lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,2989 > 0,05$), maka H_{a2} yang menyatakan bahwa *share* PDRB sektor pertanian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) *share* PDRB sektor pertanian berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien positif menunjukkan bahwa semakin besar *share* PDRB dari sektor pertanian maka akan membuat pemerintah memprioritaskan pertanian yang

akhirnya akan menambah penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian.

Hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan dari Biki, dkk (2016) bahwa peranan sektor pertanian dalam perekonomian di Provinsi Gorontalo sangatlah besar dari tahun ke tahun jika dilihat dari nilai PDRB. Akan tetapi jika dilihat dari segi kontribusinya, sektor pertanian mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sektor-sektor lain semakin berkembang. Walaupun kontribusi sektor pertanian setiap tahunnya menurun namun sektor pertanian masih merupakan sektor basis. Peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja Provinsi Gorontalo tergolong cukup besar dan stabil setiap tahunnya. Dari aspek tenaga kerja sektor pertanian merupakan sektor basis, multiplier tenaga kerja sektor pertanian relatif stabil. Hal lain yang menyebabkan tidak signifikannya *share* PDRB dari sektor pertanian karena sasaran dari berbagai program pemerintah yang kurang tepat serta bantuan pertanian yang tidak dilakukan pengawasan hingga sampai kepada petani dengan sebaik-baiknya.

Elastisitas tenaga kerja cenderung naik kemudian tren PDRB dan tenaga kerja juga naik. Peranan sektor pertanian Provinsi Gorontalo dilihat dari aspek PDRB dan tenaga kerja sangat besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Masih besarnya peran sektor pertanian dalam

menyerap tenaga kerja yang ada saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah perlu menempatkan sektor ini sebagai sektor penting untuk lebih dikembangkan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat hendaknya memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian. Perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah terhadap perkembangan sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada sektor pertanian.

c. Pengaruh Pembiayaan Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan analisis diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pembiayaan pertanian sebesar -1,083. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang sebesar 2,048. Maka t_{hitung} yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t_{tabel} . Nilai signifikansi pembiayaan pertanian lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $(0,2879 > 0,05)$, maka H_{a5} yang menyatakan bahwa pembiayaan pertanian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo ditolak. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) pembiayaan pertanian berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Gorontalo. Hasil koefisien negatif menunjukan bahwa semakin besar alokasi untuk pembiayaan pertanian kepada petani maka akan membuat

petani lebih memilih untuk mengedepankan teknologi dan sewa alat dibandingkan menggunakan tenaga kerja yang besar sehingga penyerapan tenaga kerja dalam pertanian akan mengalami penurunan.

Pembiayaan yang hasilnya negatif dan tidak signifikan ini tidak lepas dari aspek perilaku dari petani itu sendiri. Petani yang menerima pembiayaan akan cenderung lebih hemat dalam penggunaan tenaga kerja atau berusaha lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Selain itu perilaku petani dalam usaha tani juga menjadi sorotan terutama bagi petani yang telah menerima bantuan pembiayaan atau investasi pemerintah dalam bentuk bibit dan subsidi pupuk atas tanaman yang dibudi daya. Sebagaimana menurut Pujiharto dan Wahyuni (2017) bahwa sikap menghindari risiko pada petani umumnya dilakukan dengan menggunakan benih bersertifikat dengan harapan produktivitasnya lebih tinggi, penggunaan pupuk organik dalam jumlah yang banyak dan pupuk phonska untuk melengkapi kebutuhan NPK, hal ini untuk mengurangi risiko karena menurunnya kesuburan lahan akibat erosi permukaan tanah dan kemiringan lahan, melakukan penyiraman tanaman pada saat musim kemarau dan melakukan pengendalian hama penyakit secara terjadwal untuk mengurangi risiko serangan hama penyakit. Petani akan bersikap konsisten akan hal ini

karena akan berupaya untuk membayar pembiayaan yang disalurkan tersebut melalui hasil panen yang maksimal, namun tidak jarang juga ada petani yang mulai menggunakan teknologi atau bantuan alat. Logikanya petani yang telah memiliki biaya atas manfaat pembiayaan yang diperoleh akan cenderung memiliki etos kerja tinggi, sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja luar keluarga (lebih banyak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga atau bahkan memforsir kerjanya) kemudian juga dengan dana yang ada petani akan membeli alat pertanian sehingga dapat mengurangi penggunaan buruh tani.

F. Solusi Alternatif

Dalam membangun daya saing perguruan tinggi hendaknya sistem lebih diarahkan pada, (1) nilai-nilai filosofis pendidikan dan penyelenggaraan, (2) visi dan misi yang telah ditetapkan dalam proses rekonsiliasi antar pihak, (3) usaha memperkuat perguruan tinggi lain dalam membangun sinergi perguruan tinggi secara nasional dan internasional. Dalam era yang serba materialistik seperti sekarang ini daya kompetisi ekonomi juga dapat diacu untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Implikasinya negara yang daya kompetisi ekonominya tinggi mengindikasikan keberhasilan pembangunan yang tinggi. Sebaliknya, negara yang daya kompetisi ekonominya rendah mengindikasikan keberhasilan pembangunan yang rendah pula.

Di dalam konteks kebudayaan nasional, globalisasi itu bukan sesuatu yang menakutkan namun justru membuka peluang untuk menciptakan kemajuan kebudayaan yang positif, meski globalisasi itu sendiri tidak bebas dari unsur-unsur negatif. Untuk mengantisipasi itu bangsa Indonesia memiliki pedoman yang disebut teori Trikon, yang terdiri dari tiga komponen yakni: (1) kontinuitas, melanjutkan budaya para leluhur bangsa yang mengandung nilai-nilai positif; (2) konvergensi, membuka peluang bagi budaya mancanegara untuk berakulturasi dengan budaya Indonesia; dan (3) konsentrisitas, hasil pertemuan budaya mancanegara dengan budaya Indonesia hendaknya dapat menghasilkan budaya (nilai-nilai) baru yang bermakna.

Heterogenitas terbesar di dunia merupakan identitas permasalahan di Indonesia baik dari aspek geografis, kependudukan, bahasa, kebudayaan, agama, kepercayaan, tingkat kemajuan pendidikan dan kehidupan ekonomi. Negara kepulauan terbesar di dunia ini yang tersebar dari Sabang sampai Marauke dengan jumlah pulau kurang lebih 13 ribu pulau. Heterogenitas dalam artian perbedaan tingkat kemajuan pendidikan dapat dilihat dari kemajuan tingkat penduduk diseluruh wilayah Indonesia. Keberagaman ini akan semakin kompleks seiring dengan arus informasi yang tidak batas lagi dalam konteks kehidupan global sehingga berdampak pada dinamika dan fenomena sosial di masyarakat dengan motif seperti ketimpangan pendapatan ekonomi yang berakibat pada terbatasnya kapasitas masyarakat

menengah ke bawah untuk mendapatkan akses pekerjaan dan yang paling sensitif adalah perbedaan agama yang sering dimunculkan menjadi alat pemecah belah kerukunan antarumat beragama.

Sekarang bangsa Indonesia sudah berada dalam era globalisasi, satu era yang ditandai dengan menciutnya dunia disebabkan berkembangnya teknologi informasi. Dalam era ini dunia yang sebenarnya luas terkesan menjadi sempit karena daya jangkau informasi yang semakin panjang, semakin luas, dan semakin cepat sehingga membuka kemungkinan sistem aksesabilitas yang makin sempurna.

Secara umum kehidupan sosial demikian relatif terjadi selama pembentukan bangsa, terutama karena adanya toleransi dari kelompok mayoritas agama dan penghargaan dari kelompok minoritas agama. Kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia pernah dijadikan model dan rujukan oleh masyarakat internasional, dan di banyak daerah di Indonesia kerukunan hidup memang tetap hidup. Namun, tidak perlu ditutup-tutupi bahwa potensi konflik tetap ada, dan kerukunan semu akibat menutup-nutupi masalah SARA dapat menjadikan bom waktu pertentangan dan perpecahan.

Disisi lain pola kepemimpinan nasional pada masa Orde Baru yang lebih mengarah pada penerapan demokrasi terpimpin masa itu masih belum langsung hilang dari *mindset* masyarakat dalam melakukan apresiasi pemikiran saat ini sehingga memerlukan proses penyesuaian dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan *recovery* pemikiran dalam konteks

reformasi dalam kerangka pendidikan nasional. Namun yang paling penting bagi Indonesia yaitu bagaimana cara yang terbaik mengelolah bangsa ini dalam kontek keberagaman dan heterogenitas dapat menjadi kekuatan yang bersinergi untuk dimaksimalkan potensi kekuatan itu kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di bidang pendidikan agama dalam pengembangan hidup antarumat beragama perlu ditingkatkan baik kedalaman maupun keeluasaan. Kerukunan hidup antarumat beragama perlu diarahkan kepada terwujudnya kerukunan sejati, bukan kerukunan basabasi dalam bentuk keberbaikan semu di tingkat elit umat beragama, tetapi di tingkat akar rumput terjadi ketegangan karena adanya faktor-faktor konflik yang terabaikan. Diantara faktor-faktor ketidakrukunan itu adalah penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan penerimaan bantuan asing, serta perebutan hegemoni dalam kehidupan politik dan ekonomi antara berbagai kelompok umat beragama yang tidak mengindahkan kode etik (faktor-faktor ini jika tidak dicegah tidak mustahil menimbulkan konflik antarumat beragama yang mengganggu integrasi nasional). Gejala fundamentalisme, eksklusivisme, komunalisme ekstrim di kalangan semua umat beragama (baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha) berkembang karena faktor-faktor yang tidak bersifat teologis, tetapi sosial, ekonomi, dan politik. Kerukunan hidup antarumat beragama perlu didorong dalam bentuk

dialogis (*dialogical dialogue*) di antara umat beragama, yaitu dialog yang bertumpu atas kesejatan, ketulusan ketebukaan dan keseterusan.

Semua kebijakan dalam pembangunan bidang agama perlu memberi ruang yang seluas-luasnya kepada umat-umat beragama dan perguruan tinggi sebagai bagian tugas pokok pengabdian pada masyarakat itu sendiri. Karena perlu juga diingat bahwa penyerahan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di antara mereka sendiri, jika tidak tersedia toleransi yang memadai dan masih adanya kecenderungan merebut hegemoni, maka justru akan menimbulkan konflik. Dalam kaitan inilah, tanpa memasuki wilayah keyakinan keagamaan negara harus tampil berperan mengatur dan mengelola aspek sosial dari kehidupan antarumat beragama melalui model pendidikan yang tepat. Peran negara seperti ini adalah bukan intervensi, apalagi kekerasan negara (*state violence*), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan kehidupan rakyat yang ada dimensi perbedaan dan potensial pertentangan. Dalam banyak teori politik, negara dibentuk untuk menjalankan hukum, dan masyarakat warga (*civil society*) adalah masyarakat yang walaupun mereka telah memberikan hak sekundernya kepada negara untuk menegakkan hukum dalam rangka mengatasi konflik yang mungkin timbul di antara mereka.

Hal ini mungkin berpangkal pada paradigma pendidikan yang terlalu menekan modernisasi, dalam arti pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia,

dan kurang berorientasi humanisasi yaitu pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan mengabaikan humanisasi pendidikan kehilangan arah dan makna, dan berubah menjadi dehumanisasi, yang menimbulkan krisis kemanusiaan dan pada giliran berikutnya memunculkan berbagai krisis kehidupan manusia.

G. Strategi

Seluruh input yang diproses menjadi *out put* secara bertahap harus menerapkan model kurva normal yaitu setiap 1 (satu) input dalam 1 (satu) periode harus menjadi *out put* pada periode tersebut sehingga rantai nilai (*value chain*) dalam sistem lembaga perguruan tinggi terhindar dari persoalan *trade off*.

Era otonomi daerah dan globalisasi menuntut setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan daya saingnya masing-masing jika tidak ingin tertinggal dalam pembangunan wilayahnya.

Salah satu jalan keluarnya adalah membangun kerja sama profesional antarperguruan tinggi dalam membangun sektor-sektor unggulan berdasarkan prinsip *value chain* atau kerja sama fungsional yang saling menguntungkan, akibat banyaknya keterbatasan masing-masing perguruan tinggi jika melaksanakan sendiri pengembangan perguruan tingginya.

Model pertumbuhan ekonomi produksi *solow* bahwa akumulasi kapital fisik tidak menjelaskan pertumbuhan *out put* perkapita maupun perbedaan-perbedaan *out put* per kapita secara geografis sehingga membutuhkan interfensi *human capital* dalam bentuk

knowledge ilmu pengetahuan sebagai investasi dalam penguasaan teknologi akan menumbuhkan inovasi.

Model kerja sama pengembangan perguruan tinggi ini telah berlangsung di negara lainnya, seperti Eropa khususnya sejak tahun 60-an, yang dikenal dengan model *regional education managemen*.

1. Perlu Isu Pokok Investasi di Perguruan Tinggi untuk Meningkatkan Kerja Sama Pengembangan Perguruan Tinggi

Tidak dapat dihindari lagi bahwa kegiatan investasi adalah faktor stimulus dan perekat utama perguruan tinggi yang seharusnya dengan prinsip *value chain*.

Pada prinsipnya investasi perlu diartikan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu segala upaya pendayagunaan sumber daya yang ada untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dimasa depan. Investasi bukanlah produk melainkan proses. Diartikan sebagai proses, karena investasi menunjukkan adanya upaya untuk mengubah sesuatu, menjadi sesuatu yang lain dan mempunyai nilai guna lebih tinggi (*value added*) sehingga ringkasnya investasi adalah setiap kegiatan yang dapat menggerakkan dinamika aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan roh dan semangat prinsip pendidikan, yaitu "*Education is a Process*".

Dalam praktiknya investasi di perguruan tinggi perlu memiliki 3 (tiga) tahapan dasar, yaitu: (1) politik isu adalah menyerap dan mengembangkan *multy stake holder participation* dalam semangat dan nuansa pendidikan di perguruan tinggi; (2)

social value adalah investasi di perguruan tinggi perlu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan menjadi *problem solver* pada persoalan dan fenomena sosial seperti *jobless/unemployee, poverty, narkoba, HIV/AIDS* dan persoalan sosial lainnya; (3) *economy value* adalah investasi di perguruan tinggi lebih diarahkan pada pengembangan kawasan industri pendidikan (*Industrial Education Estate*) yaitu suatu kawasan yang dibangun dengan memiliki kelengkapan pendidikan tinggi seperti gedung perkuliahan lengkap dengan unsur penunjang, lahan praktik lengkap dengan pabrikasi produk dari lahan praktik yang telah berorientasi pasar sehingga memiliki nilai ekonomi.

BAB 7

Daya Saing dan Ekosistem Industri UMKM Unggulan

A. Kriteria Pemilihan Industri Unggulan

Hasrat untuk mewujudkan program pembangunan pembangunan menjadi kebutuhan mendasar, pertanyaannya adalah bagaimana program tersebut dapat tercapai? Instrumen apa dan asumsi ekonomi yang mana yang relevan digunakan untuk mengukur capaian pembangunan? Adakan kajian dan telaah ilmiah yang memutuskan program mana yang dibutuhkan untuk menjadi skala prioritas? Jawabannya adalah pembangunan industri yang berbasis komoditas unggulan dan memiliki nilai strategis yang tinggi dan berdaya saing ekonomi pada pasar dan pemasaran produk olahan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan industri provinsi provinsi gorontalo (sebagaimana ditetapkan pada subbab 3.3) dilakukan dengan strategi dan tahapan yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan provinsi dan tahapan pembangunan yang didukung dengan program pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antarpemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan

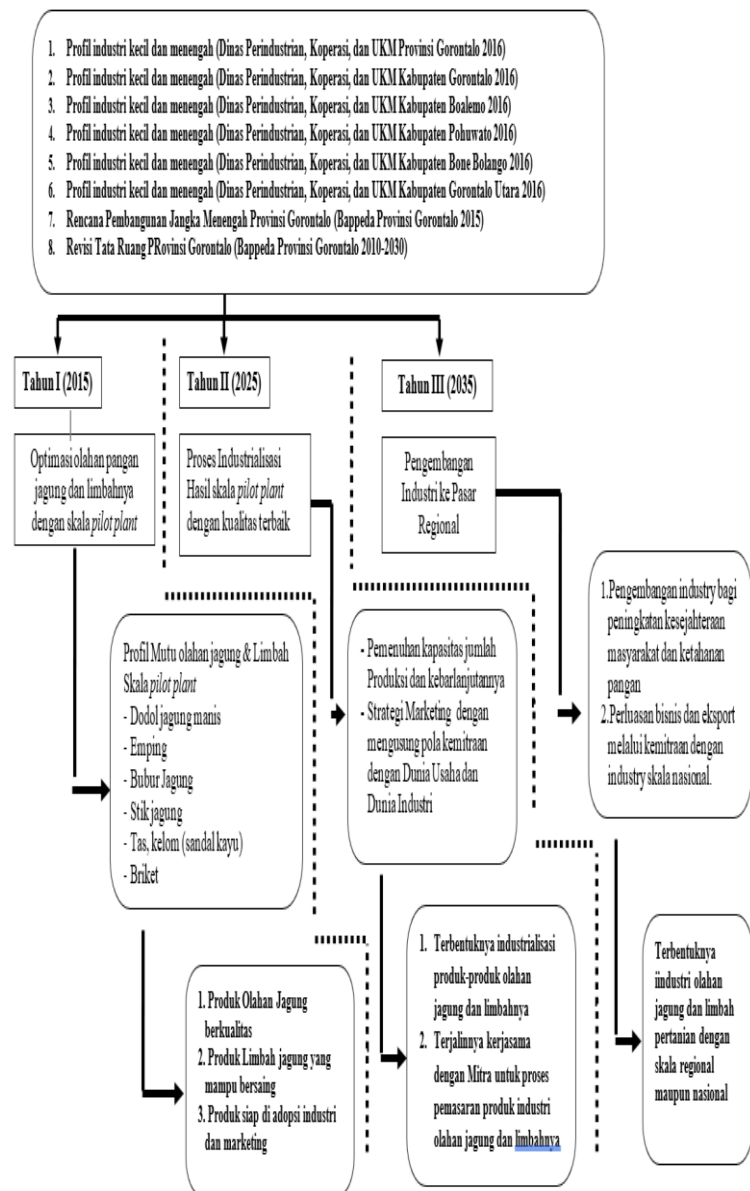
perwilayahan industri, pemberdayaan IKM, dan penciptaan iklim usaha yang menunjang pembangunan industri.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2015: 41). Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Industri pengolahan nonmigas yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi industri unggulan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Industri berdasarkan *past performance*: industri pengolahan nonmigas yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah minimal dalam 3 tahun terakhir. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
 - a. Nilai *output*
 - b. Pertumbuhan *output*
 - c. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja

- d. Kontribusi terhadap ekonomi daerah
- 2. Industri prioritas yang terdapat di Provinsi Gorontalo dengan kriteria:
 - a. Potensi bahan baku daerah untuk industri prioritas;
 - b. Pertumbuhan produksi bahan baku industri prioritas;
 - c. Pangsa pasar produk industri prioritas;
 - d. Nilai tambah industri prioritas.
- 3. Industri unggulan provinsi adalah industri di luar kelompok industri prioritas. Industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
 - a. Potensi bahan baku unggulan provinsi;
 - b. Pertumbuhan produksi bahan baku unggulan provinsi;
 - c. Pangsa pasar produk olahan;
 - d. Nilai tambah industri.
- 4. Industri yang menunjang visi misi pembangunan industri di Provinsi Gorontalo yang ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.



Gambar 7.1 Road Map LIPI Provinsi Gorontalo 2017-2028-2028-2017
 Sumber: Dokumentasi Pribadi

B. Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Berdasarkan kriteria penetapan industri unggulan provinsi, berikut adalah industri unggulan provinsi yang terpilih.

Tabel 7.1 Industri Unggulan Provinsi Gorontalo

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Elektronika dan Telematika	
2.	Industri Pembangkit Energi	
3.	Industri Alat Transportasi	Industri Perkapalan Industri <i>Rancang Bangun Becak Motor</i>
4.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan Industri Rumput Laut Industri Kelapa Industri Sagu Industri Pengolahan Tapioka Industri Pengolahan Pisang Industri Pengolahan Beras Industri Pengolahan Jagung
5.	Industri Hulu Agro	Industri Karet Industri Kelapa Sawit Industri Gula
6.	Industri Kimia Dasar	Industri Petrokimia Hulu Industri Kimia Organik
7.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Emas Industri Tembaga Industri Perak Industri Kapur Industri batu Akik

C. Tahapan Pembangunan Industri

Pembangunan industri unggulan provinsi dilakukan secara bertahap. Pentahapan ini dilakukan dalam periode 2017-2027 dan 2028-2037. Tahapan pembangunan industri unggulan Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

No.		Industri Unggulan	Jenis Industri	
			2017-2027	2028-2037
1.	Industri Elektronika dan Telematika			
2.	Industri Pembangkit Energi			
3.	Industri Alat Transportasi	• Kapal laut • Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) • Perawatan kapal	• Kapal laut • Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) • Perawatan kapal	
Industri Olahan Ikan				
		• Ikan asin • Ikan beku • Ikan fillet	• Ikan asin • Ikan beku • Ikan fillet • Tepung • Minyak Ikan • Ikan Kaleng	
Industri Rumput Laut				
		• Agar • Alginat	• Agar • Alginat • Karaginan	
Industri Kelapa				
4.	Industri Pangan	• Tepung kelapa kering • Santan dalam kemasan • Kopra • Parutan kelapa	• <i>Desiccated Coconut</i> • Nata Decoco • Tepun • Santan • Minyak goreng kelapa • VCO	
Industri Jagung				
		• Tepung Jagung, • Milu siram instan • Beras jagung	• Tepung jagung • Milu siram instan • Beras jagung • Bubur jagung kemasan • Beras jagung kemasan • Tepung jagung Kemasan	
Industri Olahan Jagung				
		• Dodol jagung • Stik jagung • Emping jagung • Tepung jagung	• Dodol Jagung manis • Stik jagung kemasan • Stik jagung	

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2017-2027	2028-2037
			rasa udang danau limboto Kemasan • Emping jagung kemasan
		Industri Olahan Pisang	
		• Keripik pisang • Selai pisang	• Keripik pisang • Selai pisang • Tepung pisang
		Industri Olahan Kelapa	
			• Minyak kelapa kemasan • Santan kelapa kemasan • VCO kemasan • Tepung kelapa kemasan • Bungkil kelapa kemasan • Sabut kelapa kemasan • Kopra • Arang kelapa • Air kelapa
		• Minyak kelapa • Santan kelapa • VCO • Tepung kelapa • Bungkil kelapa • Sabut kelapa • Kopra • Arang kelapa • Air kelapa	• Minyak kelapa kemasan • Santan kelapa kemasan • VCO kemasan • Tepung kelapa kemasan • Bungkil kelapa kemasan • Sabut kelapa kemasan • Kopra • Arang kelapa kemasan • Air kelapa kemasan
		Industri Olahan Ikan	
			• Ikan asap kemasan • Ikan asin kemasan • Nugget ikan tuna kemasan • Bakso ikan tuna kemasan • Ikan nike kalengan • Kepiting air tawar kalengan • Ikan gabus kalengan • Ikan belut kalengan • Udang air tawar kalengan
		• Ikan asap • Ikan asin • Nugget ikan tuna • Bakso ikan tuna • Ikan nike • Kepiting air tawar • Ikan gabus • Ikan belut • Udang air tawar	• Ikan asap kemasan • Ikan asin kemasan • Nugget ikan tuna kemasan • Bakso ikan tuna kemasan • Ikan nike kalengan • Kepiting air tawar kalengan • Ikan gabus kalengan • Ikan belut kalengan • Udang air tawar kalengan
		Industri Olahan Pepaya	
		• Manisan • Keripik	• Manisan • Keripik

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	
		2017-2027	2028-2037
5.	Industri Hulu Agro	<i>Ribbed smoked sheet rubber</i> <i>Crumb rubber</i> - Lateks pekat	- Ekstrak - Buah kalengan
			Industri Karet
			<i>Ribbed smoked sheet rubber</i> - Lateks pekat - Sarung tangan karet - Benang karet - Produk karet rumah tangga - Otomotif dan iindustri
			Industri Sozo
6.	Industri Kimia Dasar		
			Industri Kimia Pupuk
7.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam		Industri Emas
			- Smelter Grade Emas - Smelter Grade Emas Chemical Grade
			Industri Tembaga
			- Smelter Grade Tembaga - Chemical Grade Tembaga
			Industri Pengolahan Klinker
			- Bahan Baku Klinker - Indsutri Cemen
			Industri Batu Granit

1. Industri Elektronik dan Telematika

Tabel 7.2 memuat rencana program pembangunan industri elektronik dan telematika.

Tabel 7.3 Program Pembangunan Industri Elektronik dan Telematika

Sasaran		
Periode 2015 - 2025		Periode 2026 - 2035
a)	a)	
Strategi		
a) Memperkuat dan mengembangkan klaster elektronika; b) Menumbuhkan dan mengembangkan industri komponen/pendukung berbasis ICT/digital; c) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research and development</i> ; d) Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan <i>safety standard</i> ; e) Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM; f) Meningkatkan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik; g) Menarik investor asing.		
Rencana Aksi		
Periode 2015-2025		Periode 2026 - 2035
a)	a)	
Lokasi pengembangan: Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo utara		

2. Industri Pembangkit Energi

Tabel 7.4 memuat rencana program pembangunan industri pembangkit energi.

Tabel 7.4 Program Pembangunan Industri Pembangkit Energi

Sasaran		
Periode 2015 - 2025		Periode 2026 - 2035
a) Mengembangkan industri pembangkit energi berbasis tenaga surya;	a)	Produk pembangkit energi mulai dikembangkan ke arah komponen pembangkit tenaga surya;
b) Terjaminnya <i>supply</i> bahan baku untuk meningkatkan produksi komponen pembangkit energi	b)	Meningkatnya kolaborasi guna memanfaatkan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait untuk mengembangkan industri pembangkit energi yang inovatif;
c) Tumbuhnya investasi industri pembangkit energi;	c)	Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja pembangkit energi;
d) Tumbuhnya pusat pelatihan tenaga kerja pembangkit energi.	d)	Produk pembangkit energi berteknologi nano telah menjadi basis produksi;

e) Tersedianya tenaga kerja bidang teknologi dan pemasaran industri pembangkit energi;
f) Menjadikan Provinsi Gorontalo menarik untuk tujuan investasi industri pembangkit energi.

Strategi

- a) Memperkuat dan mengembangkan klaster pembangkit energi;
- b) Menumbuhkan dan mengembangkan industri pembangkit energi berbasis tenaga surya;
- c) Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis *research and development*;
- d) Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan *safety standard*;
- e) Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM;
- f) Meningkatkan iklim usaha dan insentif yang lebih menarik;
- g) Menarik investor asing.

Rencana Aksi

Periode 2015–2025	Periode 2026 – 2035
a) Fasilitasi pendirian pabrik yang mengolah material menjadi komponen pembangkit listrik tenaga surya;	a) Pendirian pabrik material untuk <i>solar cell</i> ;
b) Pengembangan riset kabel konduktor khusus dan logam magnet berdaya tinggi untuk menghasilkan motor/generator listrik yang efisien;	b) Mendorong untuk melakukan peningkatan rancang bangun dan rekayasa bidang industri pembangkit energi;
c) Memfasilitasi penguatan dan pengembangan klaster;	c) Mengembangkan produk-produk pembangkit energi berdayasaing (hemat energi, energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal).
d) Mendorong penggunaan produksi dalam negeri;	d) Memperbarui sistem informasi industri pembangkit energi;
e) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi;	e) Melaksanakan penanganan masalah aktual pembangkit energi.
f) Meningkatkan penerapan SNI dan <i>safety standard</i> secara wajib;	
g) Merintis pengembangan produk-produk pembangkit energi berbasis tenaga surya.	
Lokasi pengembangan: Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato dan kabupaten Gorontalo	

3. Industri Alat Transportasi

Tabel 7.5 memuat rencana program pembangunan industri alat transportasi.

Tabel 7.5 Program Pembangunan Industri Alat Transportasi

Sasaran	
Periode 2015 – 2025	Periode 2026 – 2035
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar; b. Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh industri komponen perkapalan; c. Terjadi peningkatan kemampuan memenuhi standar SNI dan internasional; d. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti; e. Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi f. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis; g. Mengembangkan <i>design center</i> industri alat transportasi; h. Peningkatan akses informasi dan promosi.	a) Terjalannya kerja sama dengan <i>buyer, supporting</i> dan <i>related industri</i> dalam klaster industri komponen perkapalan; b) Terbangunnya akses permodalan yang luas; c) Terpenuhinya permintaan pasar domestik dan ekspor; d) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal kayu; e) Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen pembangkit listrik; f) Menjadi pemasok kebutuhan produk komponen perkapalan pada skala nasional; g) Terbangunnya kemitraan strategis antara pelaku usaha komponen perkapalan dengan perusahaan kapal skala nasional dan internasional; h) Terciptanya produk komponen kapal yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional i) Semakin banyak industri komponen kapal menjadi supplier/pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti; j) Terjadi peningkatan industri perkapalan/galangan kapal kayu regional dalam membangun kapal kayu untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya; k) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal regional untuk mampu mensupply kebutuhan komponen kapal kayu dalam negeri; l) Tumbuhnya desain transportasi darat Becak motor yang memenuhi SNI; m) Tumbuhnya industri perakitan

	becak motor untuk memenuhi pangsa pasar lokal, nasional bahkan internasional.
Strategi	
a.	Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri perkapalan guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing;
b.	Memperkuat dan mengembangkan klaster industri kapal;
c.	Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar SNI dan internasional;
d.	Meningkatkan kompetensi SDM ahli komponen perkapalan dan dirgantara, tenaga penyuluh serta mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM;
e.	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> terutama UPT berkaitan dengan pengadaan mesin dan teknologi;
f.	Mengembangkan industri pendukung (industri bahan baku dan komponen kapal kayu);
g.	Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok komponen yang berkualitas dan standard;
h.	Memperluas akses permodalan dan kerja sama
i.	Memperkuat jaringan pemasaran;
j.	Menjadikan pasar dalam negeri sebagai <i>base load</i> pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparasi/ <i>docking repair</i> dalam negeri;
k.	Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN);
l.	Melakukan promosi investasi;
m.	Melakukan perbaikan iklim usaha.
Rencana Aksi	
Periode 2015 – 2025	Periode 2026 – 2035
a.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar;
b.	Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i> , proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis;
c.	Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang alat transportasi untuk memenuhi standar internasional;
d.	Memberikan akses <i>supply</i> bahan baku, peralatan, dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta diversifikasi
a)	Melakukan restrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin/peralatan produksi yang sudah berusia tua;
b)	Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/Pengembangan klaster industri perkapalan;
c)	Mengembangkan kawasan khusus industri perkapalan/galangan kapal serta dirgantara;
d)	Menggunakan kapal standar sesuai perairan/karakteristik Indonesia;
e)	Mengembangkan produk ke arah komponen berteknologi tinggi;
f)	Melakukan standarisasi produk dan penerapan SNI;

- produk;
- e. Mengembangkan industri bahan baku dan komponen industri alat transportasi;
 - f. Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi
 - g. Penguatan sentra IKM modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi;
 - h. Meningkatkan akses informasi dan promosi;
 - i. Memfasilitasi percepatan proses izin rancang bangun;
 - j. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan;
 - k. Meyakinkan desain transportasi lokal becak motor kepada pemerintah pusat agar mendapatkan kelayakan operasi melalui tahapan peningkatan desain yang memenuhi SNI.
 - g) Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM untuk komponen perkapalan dan dirgantara berbasis teknologi baru dengan presisi tinggi;
 - h) Penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, karet and propelan) dengan spesifikasi yang sesuai dengan industri alat transportasi;
 - i) Memfasilitasi perolehan insentif kredit perbankan serta mendorong lembaga keuangan (Bank & Non-Bank) untuk membiayai pembangunan kapal;
 - j) Menjalin kerja sama kemitraan dan memfasilitasi terjalannya kerja sama yang lebih baik dengan *buyer*, *supporting* dan *related industri* dalam klaster industri alat transportasi;
 - k) Memfasilitasi peningkatan kerja sama dengan buyer luar negeri dalam memperluas pasar.
 - l) Meningkatkan investasi/ perluasan pengembangan industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal kayu baru maupun reparasi kapal kayu;
 - m) Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal kayu melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal kayu Nasional (PDRKN);
 - n) Memperkuat pengembangan klaster industri perkapalan dan sentra industri kapal rakyat.
 - o) Mendorong kerja sama pengembangan kapal-kapal khusus untuk kebutuhan pariwisata;
 - p) Membangun kemitraan strategis antara pelaku industri komponen perkapalan dan dirgantara, IKM, dan perusahaan perkapalan berskala nasional dan internasional;
 - q) Memfasilitasi kesinambungan terjalannya kerja sama yang lebih baik dengan *buyer*, dalam memperluas pasar;
 - r) Melakukan kajian studi
-

- kelayakan dan studi penunjang lainnya terhadap pengembangan lokasi kawasan industri *Ship Service* dan lokasi industri kapal rakyat;
- s) Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan *Land Banking* untuk kawasan industri *Ship Service* dan penyediaan fasilitas sentra industri kapal rakyat.

Lokasi pengembangan: Seluruh Provinsi Gorontalo
(Catatan : Sesuai dengan perda RTRW Kab. Gorontalo Utara 2011- 2030 , RTRW Kota Gorontalo 2010-2030 dan RTW Kab. Bone Bolango 2011-2030

4. Industri Pangan

Tabel 7.6 memuat rencana program pembangunan industri pangan.

Tabel 7.6 Program Pembangunan Industri Pangan

Sasaran	
Periode 2015 – 2025	Periode 2026 – 2035
a) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan ikan, rumput laut, kelapa, dan sagu;	a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;
b) Pemantapan klaster industri pengolahan ikan, rumput laut, kelapa, dan sagu;	b) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan;
c) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan, rumput laut, kelapa, dan sagu;	c) Peningkatan utilitas kapasitas;
d) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;	d) Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri;
e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;	e) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah;
f) Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan.	f) Peningkatan mutu makanan dan kemasan;
	g) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;
	h) Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;
	i) Terjadi peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku

	pangan, industri pangan, dan pengelola wisata; j) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; k) Adanya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di Wilayah Gorontalo; l) Pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih; m) Pemanfaatan air laut dalam (<i>deep sea water</i>); n) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan; o) Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; p) Terdapat pengembangan ekspor makanan dan minuman Wilayah Gorontalo ke mancanegara; q) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk; r) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i>.
	Strategi
	a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (<i>existing</i>); c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan; d) Mengembangkan lokasi klaster; e) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan; f) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan;

- g) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- h) Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran;
- i) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*;
- j) Mengembangkan dan memperkuat litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.

Rencana Aksi	
Periode 2015–2025	Periode 2026 – 2035
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi; d) Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; e) Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster pengolahan industri pangan	a) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan dan kelapa; b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pangan sehingga menaikkan pendapatan; c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan; d) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan pangan; e) Meningkatkan mutu kemasan; f) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; g) Menyederhanakan rantai penyaluran bahan pangan sehingga dapat memangkas biaya; h) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan; i) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan; j) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui

	yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan;	
f)	Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;	k) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan;
g)	Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);	l) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;
h)	Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;	m) Meningkatkan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;
i)	Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;	n) meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;
j)	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi	o) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat;
k)	Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;	p) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i> ;
l)	Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;	q) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;
m)	Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya;	r) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern;
n)	Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan <i>Land Banking</i> untuk kawasan	s) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan nonbank.

industri pangan dan
penyediaan fasilitas sarana dan
prasarana sentra industri
pangan.

Lokasi pengembangan: Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Bone Bolango, dan Kab. Gorontalo utara.

5. Industri Hulu Agro

Tabel 7.7 memuat rencana program pembangunan industri hulu agro

Tabel 7.7 Program Pembangunan Industri Hulu Agro

Sasaran	
Periode 2015 – 2025	Periode 2026 – 2035
a) Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas hulu agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan; b) Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinu; c) Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal; d) Berkembangnya perkebunan rakyat. e) Penerapan standar mutu produk SNI.	a) Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan hulu agro; b) Tersedianya pasokan bahan baku industri hulu agro secara berkelanjutan; c) Peningkatan nilai ekspor hulu agro dan turunannya; d) Peningkatan mutu hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri; e) Peningkatan jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang saling menguntungkan; f) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk hulu agro; g) Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk hulu agro yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha; h) Peningkatan ekspor komoditas hulu agro dan turunannya; i) Terbentuknya sentra-sentra industri hulu agro; j) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri hulu agro.
Strategi	
a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas hulu agro; b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri hulu	

agro;	
c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hulu agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;	
d) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;	
e) Melibatkan industri hulu agro dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak hulu agro.	
Periode 2015–2025	Periode 2026 – 2035
a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;	a) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri hulu agro;
b) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hulu agro untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;	b) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas;
c) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hulu agro di sentra-sentra industry;	c) Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas hulu agro dan kelembagaan di sentra-sentra industri;
d) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro melalui diklat industri;	d) Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas hulu agro;
e) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;	e) Meningkatkan mutu produk;
f) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;	f) Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas hulu agro;
g) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;	g) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk hulu agro;
	h) Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan;
	i) Memfasilitasi peningkatan investasi industri hulu agro yang ramah lingkungan;
	j) Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan komoditas hulu agro;
	k) Mengembangkan klaster industri hulu agro terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai;
	l) Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan komoditas hulu agro;
	m) Mengembangkan diversifikasi produk industri hulu agro yang ramah lingkungan;
	n) Penerapan SNI produk hulu agro;

h) Mengoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	o) Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal.
i) Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk rumah tangga;	p) Memperluas pasar komoditas hulu agro melalui promosi dan misi dagang.
j) Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM.	
Lokasi pengembangan: Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Bone Bolango	

6. Industri Kimia Dasar

Tabel 7.8 memuat rencana program pembangunan industri kimia dasar

Tabel 7.8 Program Pembangunan Industri Kimia Dasar

Sasaran	
Periode 2015 – 2025	Periode 2026 – 2035
a) Peningkatan kemampuan produksi bahan kimia dasar;	a) Pemantapan prioritas pengembangan industri kimia dasar melalui peningkatan kapasitas produksi;
b) Terjamin ketersediaan bahan baku;	b) Pengembangan kerjasama antara produsen bahan kimia dan pemilik bahan baku dalam pengadaan bahan baku pabrik kimia sehingga terjamin keberlanjutannya.
c) Tercipta struktur Industri Petrokimia yang semakin kuat;	c) Harmonisasi tarif produk petrokimia hulu-hilir;
d) Perluasan pengembangan produk akhir;	d) Adanya investasi baru ke kawasan industri;
e) Pengembangan pasar Industri Petrokimia.	e) Pengembangan turunan industri petrokimia C1, olefin dan aromatik;
	f) Penguasaan teknologi;
	g) Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan oleh produsen dengan pemberian insentif;
	h) Pengembangan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pelaku usaha di industri kimia dasar untuk tumbuh berkembang;
	i) Terjadi peningkatan kapasitas

j)	produksi petrokimia hulu; Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien.
----	---

Strategi

- Meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk;
- Meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku;
- Restrukturisasi usaha (merger dan akuisisi);
- Mengembangkan teknologi proses dan nilai tambah;
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan rekayasa dan engineering industri peralatan pabrik;
- Menstimulasi investasi pada industri kimia dasar serta memberikan insentif baik fiskal maupun nonfiskal untuk pengembangan industri petrokimia;
- Menjamin ketersediaan SDM dan peningkatan kandungan lokal;
- Meningkatkan kerjasama usaha dan integrasi industri migas dengan industri petrokimia;
- Memenuhi kebutuhan pasar;
- Mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah kluster industri petrokimia yang berdaya saing.
- Menetapkan kluster-kluster pemasaran;
- Mengembangkan informasi pasar;
- Meningkatkan pameran produk.

Rencana Aksi

Periode 2015–2025	Periode 2026 – 2035
a) Meningkatkan utilitas dengan jaminan pasokan bahan baku dan ketersediaan SDM bagi pabrik yang sudah berjalan;	a) Meningkatkan ketersediaan bahan baku pabrik kimia;
b) Mendorong peran serta perusahaan lokal yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pembangunan pabrik baru termasuk mengikutsertakan industri penunjang;	b) Meningkatkan kualitas SDM;
c) Melakukan inventarisasi dan peninjauan bahan baku untuk memperkuat jaminan ketersediaan bahan baku secara kontinyu dalam jangka panjang sesuai kualitas dan kuantitas yang diperlukan;	c) Melakukan kerja sama atau pembentukan perusahaan patungan antara BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku;
d) Mendorong terciptanya inovasi teknologi dalam upaya peningkatan kualitas produk bahan kimia;	d) Membangun pusat informasi atau database untuk industri kimia dasar dan meningkatkan kegiatan asosiasi industri kimia dasar;
e) Memperluas aplikasi produk	e) Mengintegrasikan Industri Petrokimia hulu dan <i>intermediate</i> ;
	f) Mengintegrasikan pusat olefin dan aromatik;
	g) Meningkatkan industri berkelas dan skala dunia;
	h) Menciptakan <i>strategic partnership</i> ;
	i) Memperluas <i>advance</i> produk;

	komoditi dan <i>engineering product</i> ;	j)	Mengintensifkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri;
f)	Membangun infrastruktur dan wilayah administrasi;	k)	Membangun pabrik bahan kimia baru dengan teknologi proses yang sudah terbukti;
g)	Mengintegrasikan produk kilang ke dalam Industri Petrokimia;	l)	Mengembangkan <i>centre of excellence</i> industri petrokimia;
h)	Mendorong penggunaan bahan baku alternatif batu bara, biomassa dan daur ulang limbah;	m)	Membangun <i>refinery</i> yang berintegrasi dengan industri petrokimia.
i)	Menyiapkan SDM lokal yang kompeten;	n)	Meningkatkan daya saing bahan kimia dengan cara meningkatkan kualitas produk dan harga yang lebih murah;
j)	Meningkatkan kualitas layanan para distributor dan pengecer;	o)	Memperbaiki pola pemasaran, distribusi dan pengawasan di setiap klaster pemasaran;
k)	Menerapkan strategi pasar yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar lokal;	p)	Mengembangkan informasi pemasaran dan pengembangan jaringan usaha;
l)	Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dalam pendirian pabrik petrokimia hulu (penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, AMDAL, dll);	q)	Melibatkan konsumen sebagai “saluran” untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas bahan kimia.
m)	Melakukan kajian kelayakan pengembangan dan pembangunan bisnis industri petrokimia;		
n)	Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait terhadap pemanfaatan potensi migas Kep. Riau.		
Lokasi pengembangan: Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara, dan Kab. Bone Bolango.			

7. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Tabel 7.9 memuat rencana program pembangunan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Tabel 7.9 Program Pembangunan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Sasaran	
Periode 2015 - 2025	Periode 2026 - 2035
a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam dalam memenuhi permintaan	a) Penguatan struktur industri; b) Tercapainya peningkatan mutu produk industri

pasar;	pengolahan logam yang memenuhi standar sertifikasi;
b) Didirikannya industri logam dasar dan bahan galian bukan logam di Provinsi Gorontalo.	c) Peningkatan efisiensi penggunaan energy;
	d) Tingginya daya saing industri semen nasional di pasar domestik dan ekspor;
	e) Bertambahnya jumlah klaster industri maupun industri pengolahan logam;
	f) Makin tingginya daya saing industri pengolahan logam dan bahan galian nonlogam nasional di pasar domestik dan ekspor;
	g) Makin efisiennya penggunaan energi.

Strategi

- Memperkuat kelembagaan;
- Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM;
- Memperkuat proses dan memfasilitasi pendirian pabrik;
- Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;
- Meningkatkan daya saing;
- Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk ramah lingkungan;
- Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.

Rencana Aksi

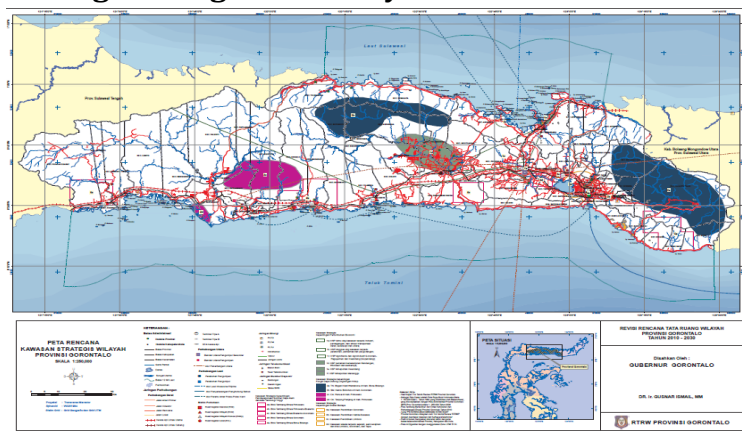
Periode 2015-2025	Periode 2026 - 2035
a) Memperkuat kelembagaan meliputi;	a) Meningkatkan kapasitas dan mutu produk pengolahan logam;
i) Penyelesaian kelengkapan regulasi dan kelembagaan;	b) Memfasilitasi pembangunan smelter emas dan tembaga;
ii) Penguatan kelompok usaha bersama di tingkat daerah atau kecamatan.	c) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam penggunaan bahan baku, emisi debu/asap dan efisiensi energi;
b) Meningkatkan kompetensi SDM bagi industri meliputi;	d) Menerapkan secara konsisten tentang SNI;
i) Peningkatan kemampuan SDM dalam produk standar dan sertifikasi produk;	e) Mengembangkan produk dan inovasi pengolahan logam;
ii) Peningkatan kemampuan SDM dalam	f) Mengintegrasikan jejaring

teknologi rekayasa <i>engineering</i> dan pengelolaan manajemen dan aksesibilitas pendanaan.	pasokan dan pemasaran meliputi;
c) Melakukan pendekatan secara berkesimbangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran investasi industri logam dan bahan galian;	1) perluasan akses pemasaran;
d) Melakukan komunikasi secara intensif dengan para <i>stakeholder</i> untuk memperoleh kesamaan persepsi dan visi tentang keberadaan pabrik semen di Provinsi Gorontalo.	2) Kemudahan akses finansial/permodalan;
e) Memfasilitasi pembangunan smelter pengolahan emas dan tembaga;	3) Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku;
f) Fasilitasi penyediaan lahan dan konsesi penambangan	4) Fasilitasi IKM untuk ikut pameran nasional dan internasional.
g) Memfasilitasi pembangunan pabrik kabel, semen, dan bata ringan.	g) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana;
	1) Penyiapan zona kawasan untuk industri pengolahan logam;
	2) Penyiapan pusat pengujian logam yang terintegrasi dengan BLK;
	3) Penyiapan branding untuk produk industri logam dalam merk dan standarisasi logam;
	4) Penyiapan <i>showroom</i> produk untuk memperluas pasar.
	h) Mengembangkan produk dan inovasi
	1) Pengembangan produk pengolahan logam;
	2) Meningkatkan kemampuan SDM.
	i) Meningkatkan produk pengolahan logam;
	j) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran meliputi;
	1) Pembangunan branding produk pengolahan logam untuk daerah;
	2) Penyiapan infrastruktur dalam mendukung

-
- pengembangan kawasan industri terpadu.
- k) Melanjutkan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bagi industri emas, tembaga dan semen;
 - l) Menerapkan dan pengawasan SNI;
 - m) Mengembangkan industri semen yang berdaya saing tinggi;
 - n) Mengembangkan bidang desain, rekayasa dan fabrikasi pabrik semen yang hemat energi.
-

Lokasi pengembangan: Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Boalemo, Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara

D. Pengembangan Perwilayahan Industri



Gambar 7.2 Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan RIPIN, Provinsi Gorontalo memiliki 6 WPPI, yaitu WPPI Kabupaten Gorontalo WPPI Kota Gorontalo, WPPI Kabupaten Boalemo, WPPI Kabupaten

pohuwato, WPPI Kabupaten Bone Bolango dan WPPI Kabupaten Gorontalo utara Berdasarkan kajian lanjutan ada tiga WPPI tambahan yang direkomendasikan, yakni Gorontalo memiliki kawasan strategis provinsi, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi, industri, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Terdapat 4 kawasan strategis Provinsi Gorontalo yang meliputi:

1. Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi:
 - a. Blok Tambang Emas Pohuwato;
 - b. Blok Tambang Emas Pohuwato-Boalemo;
 - c. Blok Tambang Emas Boalemo-Gorontalo;
 - d. Blok Tambang Emas Gorontalo;
 - e. Blok Tambang Emas Bone Bolango.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 - a. KSP Isimu sebagai kawasan terpadu industri, perdagangan, dan simpul transportasi darat, kereta api dan udara;
 - b. KSP Anggrek sebagai kawasan terpadu pelabuhan, petikemas dan pergudangan;
 - c. KSP Agrobisnis dan Agroindustri Gorontalo-Paguyaman dan Kwandang (Gopandang);
 - d. KSP pertanian berkelanjutan Randangan, Wonosari dan sekitarnya;
 - e. KSP Minapolitan Kwandang;
 - f. KSP Minapolitan Mananggu.

3. Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup:
 - a. TN. Bogani Nani Wartabone di Kab. Bone Bolango;
 - b. CA. Panua di Kab. Pohnuato;
 - c. CA. Tanjung Panjang di Kab. Pohnuato;
 - d. SM. Nantu Boliohuto di Kab. Gorontalo;
4. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya:
 - a. Kawasan Pendidikan Gorontalo;
 - b. Kawasan Pendidikan Kabila-Suwawa;
 - c. Kawasan Pendidikan Limboto;
 - d. Kawasan wisata terpadu sejarah, seni kerajinan dan tirta Limboto, Gorontalo, dan Tapa.

Untuk dapat menyusun pengembangan perwilayahan industri, maka secara umum dapat dikembangkan pembuatan rencana Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015-2035 seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015 – 2035

No		Wilayah	Program	
			2017-2027	2028-2037
A Pengembangan WPPI				
UMUM	1.	Koordinasi yang intensif dengan SKPD kabupaten/kota yang masuk dalam WPPI		
	2.	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan		
	3.	Pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan perindustrian di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Samudra Kabupaten Gorontalo Utara		
	1.	Penetapan WPPI Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Boalemo sebagai kawasan strategis nasional (KSN)	1.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI
	2.	Survei dan pemetaan	2.	Pembangunan infrastruktur energi
			3.	Pembangunan sarana dan

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
		sumber daya industri dalam WPPI	prasarana riset dan teknologi
		3. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan WPPI	4. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI
		4. Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI)	
		5. Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten/kota yang termasuk dalam WPPI	
		6. Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI	
		7. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM	
1	Kota Gorontalo	- Kawasan investasi internasional - Pusat kawasan industri, jasa industri dan perdagangan dan jasa Kota Gorontalo - Kawasan alih muat kapal (<i>transhipment point</i>)	“Pusat keunggulan” (<i>center of excellence</i>) kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan penumpang dan barang, peti kemas, industri jasa. - Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan wilayah <i>hinterland</i>
2	Kabupaten Gorontalo	Isimu: - Kawasan industri pendukung perdagangan bebas dan Pelabuhan Udara Djalaluddin - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal	Isimu: Kawasan industri dan simpul perdagangan, transportasi dan jasa limboto:

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
3	Kabupaten Boalemo	• Pusat koleksi dan distribusi Limboto • Kawasan perdagangan dan jasa lokal • Kawasan pertanian dan budi daya perikanan • Pusat koleksi dan distribusi lokal • Kawasan wisata kuliner, wisata agro dan wisata alam Telaga • Kawasan industri pendukung Perdagangan, industri dan jasa industri • Pusat koleksi dan distribusi • Simpul penghubung Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Batudaa, Bongomeme • Pusat pengembangan sentra perikanan air tawar dan pertanian	• Kawasan industri jasa • Kawasan pendidikan • Kawasan wisata pemandian air panas • Kawasan wisata air Telaga • Kawasan industri dan jasa • Kawasan Industri, jasa industri, aneka olahan, indsutri kerajinan kerawang Batudaa, Bongo Meme • Kasawasan industri kecil dan kerajinan kearawang, industri olahan produk pertanian dan perikanan air tawar
		Tilamuta: • Kawasan perdagangan dan pelayanan jasa • Industri pengolahan perikanan dan kelautan Paguyaman, Wonosari: • Kawasan perdagangan dan Industri hasil perkebunan dan pertanian Dulupi: • Pusat pengembangan pemintalan sutra • Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan	Tilamuta: • Industri pengolahan hasil perikanan tangkap • Pusat koleksi dan distribusi antar pulau dikawasan Teluk Tomini Paguyaman Wonosasri: • Kawasan industri dan perdagangan jasa hasil pertanian • Kawasan pengembangan industri hulu agro

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
4	Kabupaten Pohuwato	Botu Moito: • Pusat pengembangan produksi kakao dan hasil perkebunan • Pusat kegiatan perikanan tangkap	Dulupi: • Pusat pengembangan pemintalan sutra • Kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan Botu Moito: • Kawasan pendukung pengembangan industri kakao dan perkebunan dan industri ikan tangkap.
		Paguwat: • Kawasan produksi kelapa, pemanfaatan hasil hutan dan non-hutan dan industri pengolahan jagung • Pusat perdagangan dan jasa industri Marisa, Buntuliya dan Dengilo: • Pusat pengembangan industri pertambangan Emas, Tembaga dan Perak, dan hasil pertanian terpadu • Pusat Pengembangan industri dan Jasa Randangan dan Taluditi: • Pusat pengembangan industri hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan tambak • Pengembangan jasa transportasi udara perintis	Paguwat: • Kawasan produksi kelapa, pemanfaatan hasil hutan dan non-hutan dan industri pengolahan jagung • Pusat perdagangan dan jasa industri Marisa, Buntuliya dan Dengilo: • Pusat pengembangan industri pertambangan dan pengolahan hasil tambang Emas, Tembaga dan Perak, dan hasil pertanian terpadu • Pusat pengembangan industri dan Jasa Randangan dan Taluditi: • Pusat pengembangan industri hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan tambak

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
			Pengembangan jasa transportasi udara nasional
5	Kabupaten Gorontalo Utara	Anggrek, Sumalata: - Kawasan industri dan industri jasa Pelabuhan Berikat, Kargo Terminal dan industri olahan perikanan tangkap, industri hasil perkebunan dan peternakan juga pertambangan - Kawasan pertahanan dan keamanan	Anggrek, Sumalata: - Kawasan industri dan industri jasa Pelabuhan Berikat, Kargo Terminal dan industri olahan perikanan tangkap. industri hasil perkebunan dan peternakan juga pertambangan Emas, Tembaga dan Perak - Kawasan pertahanan dan keamanan laut sulawesi dan pasifik
		Kwandang Atinggola: - Kawasan pelayanan industri dan jasa - Pusat pengembangan industri perikanan tangkap dan alat transportasi laut dari kapal kayu serta pariwisata	Kwandang, Atinggola: - Kawasan pelayanan industri dan jasa - Pusat pengembangan industri perikanan tangkap dan alat transportasi laut dari kapal kayu serta pariwisata
6	Kabupaten Bone Bolango	Tapa: - Pusat koleksi industri kerajinan kerawang, aneka kuliner dan hasil pertanian perkebunan - Kawasan pengembangan industri pendukung industri jasa - Pusat perdagangan dan jasa skala regional	Tapa: - Pusat koleksi industri kerajinan kerawang, aneka kuliner dan hasil pertanian perkebunan - Kawasan pengembangan industri pendukung industri jasa - Pusat perdagangan dan jasa skala regional
		Suwawa: Pusat pengembangan industri pertanian, industri olahan	

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
		perkebunan, peternakan dan pariwisata alam	Suwawa
		• Pusat industri hasil tambangan Emas, Tambaga dan Perak	• Pusat pengembangan industri pertanian, industri olahan perkebunan kopi, fanili, peternakan sapi dan pariwisata alam
		Kabila Bone:	• Pusat industri hasil tambangan Emas, Tambaga dan Perak
		• Kawasan pengembangan eko wisata pantai dan wisata bawa laut	
		• Kawasan pengembangan jasa transportasi darat	Kabila Bone:
		• Kawasan pengembangan jasa kuliner	• Kawasan pengembangan eko wisata pantai dan wisata bawa laut (Snocklin)
		• Kawasan pengembangan industri kapal kayu	• Kawasan pengembangan jasa transportasi darat Trasn Sulawesi Bag. Selatan
		Bone, Bone Pantai dan Bone Raya:	• Kawasan pengembangan jasa kuliner dan penginapan
		• Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan tangkap, dan perkebunan (cengkeh)	• Kawasan pengembangan industri kapal kayu
		• Simpul indsutri olahan tambang Emas, Tembaga dan perak, pergudangan, transportasi darat dan laut	
		• Pusat pengembangan wisata bahari dan industri perikanan tangkap	Bone, Bone pantai dan Bone Raya
			• Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan (cengkeh)
			• Simpul indsutri olahan tambang Emas (Smelter), Tembaga dan perak, pergudangan, transportasi darat dan laut.
			• Pusat

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
			pengembangan wisata bahari dan industri perikanan tangkap

B Pengembangan KPI			
		1. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	
		2. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	
	UMUM	1. Penetapan KPI dalam RTRW kabupaten, kota dan provinsi	Pembangunan infrastruktur industri (energi, jalan, pelabuhan, dan sarana prasarana pendukung)
		2. Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan KPI	
		3. Studi kebutuhan infrastruktur industri di KPI	
		4. Penyiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	
1	Kota Gorontalo	-	
2	Kabupaten Gorontalo	Pengembangan Kawasan Industri Gorontalo, Paguyaman dan Kwandang (GOPANDA)	
3	Kabupaten Boalemo	Pengembangan Kawasan Industri Gorontalo, Paguyaman dan Kwandang (GOPANDA)	
4	Kabupaten Pohuwato	Pengembangan Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Paguat	
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Pengembangan Kawasan Industri Gorontalo, Paguyaman dan Kwandang (GOPANDA)	
7	Kabupaten Bone Bolango	Pengembangan Kawasan Industri Agro Terpadu Danau Perintis (KIAT) Suwawa	
C Pembangunan KI			
		1. Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	
		2. Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	
	UMUM	1. Kajian konsep untuk prioritas KI di Wilayah Gorontalo (khususnya	1. Pembangunan kawasan industri 2. Pembangunan

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
		prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan)	infrastruktur pendukung kawasan industri
		2. Penyusunan studi kelayakan	
		3. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan KI	3. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan ristekin
		4. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur industri	
		5. Koordinasi antara pemerintah kota dengan otorita kota dalam pengembangan dan pengelolaan KEK/KI	
		6. Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya	
		7. Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	
		8. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	
		9. Promosi investasi kawasan industri	
1	Kota Gorontalo	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai	Kawasan industri jasa meliputi: • Industri olahan pangan • Industri percetakan • Industri konveksi

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
		simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di Kawasan Industri.	- Industri makanan Kawasan industri Pabean, Tanjung Keramat: - Industri pengolahan hasil laut - Industri perkapalan Kawasan Industri Duingi, Kota Tengah, Molosifat: - Industri olahan pangan, industri batu bata, industri olahan kapuk, industri rotan, industri kayu Kawasan Industri Kota Barat: - Industri wisata adat dan wisata sejarah - Industri kerajinan kerawang, industri aneka kuliner
2	Kabupaten Gorontalo	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di: - Kawasan industri Isimu; - Kawasan industri Telaga, Telaga Biru; - Kawasan industri jasa Limboto; - Kawasan industri Tangkoku dan Buliyohuto;	

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
3	Kabupaten Boalemo	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di: • Kawasan industri Paguyaman, Wonosari berupa olahan jagung, pisang dan industri perkebunan berskala besar; • Kawasan industri Dulupi dan Tilamuta berupa industri olahan jagung, ikan beku, kakao menjadi coklat batangan, industri pemintalan sutra;	
		• Pusat kegiatan industri perkapalan dengan fungsi utama pengembangan industri khusus maritim dan fungsi pendukung perumahan karyawan serta simpul transportasi internasional ditetapkan di kawasan industri perkapalan Sembawang di Kecamatan Meral • Pembangunan konektivitas untuk memudahkan pergerakan bahan baku dan pemasaran hasil industri dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan perbatasan dengan Sulawesi Tengah.	Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal, ditetapkan di sepanjang garis pesisir di: • Kawasan industri Paguat, kawasan industri Marisa, kawasan industri Dengilo, kawasan industri Buntuliya, kawasan industri Tanjung Marisa, dan kawasan industri Patilanggio • Kawasan Industri Taluditi, Randangan, Lemito Pepayato

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
5	Kabupaten Bone Bolango	Kawasan Industri KIBO: • Pusat kegiatan industri olahan hortikultura, peternakan, perikanan air tawar, kelapa dan jagung	Kawasan Industri KIBO: • Pusat kegiatan industri olahan hortikultura, peternakan, perikanan air tawar, kelapa dan jagung
		Kawasan Industri BOSUWA: • Pusat kegiatan industri Smelter pengolahan Emas, Tembaga dan Perak • Pusat kegiatan industri pengolahan kopi, gula semut, gula aren, minyak atsiri, minyak cengkeh, olahan ikan tangkap dan wisata alam	Kawasan Industri BOSUWA: • Pusat kegiatan industri Smelter pengolahan Emas, Tembaga dan Perak. • Pusat kegiatan industri pengolahan kopi, gula semut, gula aren, minyak atsiri, minyak cengkeh, olahan ikan tangkap dan wisata alam
6	Kabupaten Gorontalo utara	Gopanda: 1. Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian 2. Pusat koleksi dan distribusi skala regional 3. Pusat industri jasa pergudangan (Terminal Cargo), Peti Kemas dan Pelabuhan Berikat	Gopanda: 1. Sentra pengembangan kegiatan pertanian/ perkebunan, perikanan, dan kehutanan 2. Pusat perdagangan dan jasa skala regional 3. Pusat industri jasa Pergudangan (Terminal Cargo), Peti Kemas dan Pelabuhan Berikat
		Kwandang: 1. Pusat pelayanan untuk Pulau Ponelo, kawasan wisata Pulau Saronde dan pulau sekitarnya 2. Pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa skala regional 3. Pusat koleksi dan distribusi skala regional	

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
D	Pengembangan Sentra IKM		
	UMUM	1. Survei dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. Perencanaan pembangunan sentra IKM 3. Pembentukan lembaga sentra IKM 4. Pembangunan infrastruktur sentra IKM	1. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM 2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk <i>workshop</i>/pusat promosi 3. Insentif khusus untuk IKM dalam sentra
1	Kota Gorontalo	• Industri agro: sentra industri tahu dan tempe serta pemanfaatan limbah tahu/tempe untuk pakan ternak • Industri pengolahan ikan dan hasil laut • Industri kerajinan: kayu (gasing), songkok keranjang, meubel, • Aneka kue kering, kue olahan Pisang dan pia • Pengembangan industri kapal rakyat berahan kayu dan fiber.	
2	Kabupaten Gorontalo	Industri kerajinan/makanan: • Pengembangan rantai nilai kelapa • Pengembangan rantai nilai peternakan sapi • Pengembangan rantai nilai jagung • Pengembangan rantai nilai ikan air tawar dan ikan tangkap • Pengembangan rantai nilai cabai	
3	Kabupaten Boalemo	• Pengembangan rantai nilai dari rumput laut • Pengembangan rantai nilai kelapa	

No	Wilayah	Program	
		2017-2027	2028-2037
		• Pengembangan rantai nilai kakao • Pengembangan rantai nilai jagung	
4	Kabupaten Pohuwato	Pengembangan rantai nilai kelapa, perikanan serta industri perkapalan rakyat berbahan fiber dan atau aluminium sebagai substitusi pemanfaatan bahan baku kayu, Industri kakao, sapi, ikan tangkap, ikan bandeng, industri nilam, industri jagung, kelapa, industri lebah, industri sagu, industri emas, tembaga dan perak, industri pariwisata	
5	Kabupaten Gorontalo Utara	Pengembangan rantai nilai ikan tangkap, Pengembangan rantai nilai kelapa, Pengembangan rantai nilai jagung, Pengembangan rantai nilai cabai	
6	Kabupaten Bone Bolango	• Industri pengolahan nira kelapa dan gula aren juga gula semut di Kecamatan Bulango Utara, Bulango Ulu • Pengolahan produk hortikultura di Kecamatan Kabila dan Tilong Kabila • Pengolahan ikan di Kecamatan Kabila Bone dan Bone Pantai	

Berdasarkan RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030, perwujudan dari pengembangan keterpaduan pusat-pusat kegiatan tersebut antara lain melalui pemantapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu kawasan-kawasan perkotaan di pulau-pulau

kecil didorong pengembangannya sebagai kota pesisir dengan menjadikan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagai *leading sector* dalam pengembangan ekonomi wilayahnya, serta menjadikan jagung, kelapa, sapi sebagai komoditas terdepan dan orientasi pembangunan ekonomi. Usulan program utama untuk setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: (1) prioritas pengembangan industri-industri unggulan dengan penerapan teknologi dan lokasi yang ramah lingkungan; (2) prioritas pengembangan industri kecil dan menengah tertentu; (3) peningkatan iklim investasi; (4) peningkatan promosi dan kerja sama investasi; (5) pengembangan jasa pendukung industri; (6) pengembangan tenaga kerja industri yang trampil dan profesional; (7) pengembangan infrastruktur yang modern dan didukung oleh Ilmu pengetahuan dan teknologi. (8) pengembangan, pembentukan dan pembangunan *Techno Park*. Berikut penjelasan kegiatan industri eksisting dan arahan pengembangan kegiatan industri di Provinsi Gorontalo per kabupaten/kota, yakni: (1) Kota Gorontalo; (2) Kabupaten Gorontalo; (3) Kabupaten Boalemo; (4) Kabupaten Pohuwato; (5) Kabupaten Bone Bolango; (6) Kabupaten Gorontalo Utara.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Industri

Pengembangan sumber daya Manusia (SDM) industri menitikberatkan peningkatan peranan penelitian dan pengembangan beserta perguruan tinggi, pelatihan keteknikan sumber daya manusia dibidang teknologi agro-industri, pelatihan sumber daya manusia dibidang industri pengolahan perikanan dan hasil laut, pelatihan wirausaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan industri dan pelatihan teknologi agro industri yang ramah lingkungan.

Tabel 7.11 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
1	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Industri Sesuai Industri Prioritas Daerah	1. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri training/diklat intensifikasi produksi	Sertifikasi kompetensi
		2. Pendidikan melalui <i>workshop/short course</i> standar industri berbasis kompetensi	
2	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan SDM Industri	1. <i>Workshop/ short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	
		2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>training of</i>	

		<i>trainers</i> (TOT) aparapemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri
3	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pendidikan	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/diploma sesuai kebutuhan industri
4	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pelatihan	Pemagangan Industri
5	Pembangunan SDM Industri Melalui Pengembangan Balai/Sentral Pelatihan	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri

6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri
Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan.

Tabel 7.12 Program Pengembangan SDA Industri
Tahun 2017 - 2037

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	
		Manajemen pengolahan sumber daya alam	
			Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
2	Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam		Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
		Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	
		Penetapan bea keluar	Pengawasan bea keluar
		Penetapan kuota ekspor	Pengawasan kuota ekspor
		Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri	Pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri
3	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan.	Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam	Pengawasan batasan minimal kandungan sumber daya alam
		Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	
		Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	
		Pengendalian hama dan penyakit tanaman	
		Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	
		Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	
		Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	
		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	
			Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan
			Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah
4	Peningkatan kualitas produksi pascapanen sesuai kebutuhan industri	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pascapanen Fasilitasi sarana/peralatan pascapanen Monitoring hasil dan standarisasi	

7. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan. Program Pengembangan teknologi industri tahun 2017-2037 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.13 Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2017–2037

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
	UMUM	1. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant) 2. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri) 3. Kerja sama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	
1.	Industri Elektronika dan Telematika	<i>Micro electronics (Fast Processing) components</i>	<i>Integrated smart telecommunication & processing device</i>
		<i>Creative design</i>	<i>Wireless & optical communication</i>
		<i>Precision engineering</i>	<i>Rapid prototyping</i>
2.	Industri Pembangkit Energi	<i>Precision engineering</i>	<i>Durable & super conductivity material</i>
		<i>Chemical battery & solar cell material</i>	<i>Smart efficiency control</i>
		<i>Material treatment</i>	
3.	Industri Pangan	Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nanoteknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi/suplemen
		Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi	Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro
		Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan)	Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
4	Industri Hulu Agro	dengan gula/garam)	
		Teknologi formulasi, <i>mixing/blending</i> , ekstrusi	
		Teknologi kemasan	
		Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumber daya lokal	
5	Industri Kimia Dasar	Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, <i>mixing/blending</i>) oleokimia skala mini dan medium	Teknologi maju untuk produksi <i>specialty fats</i>
		Teknologi konversi dan pemurnian oleokimia yang efisien	Teknologi maju untuk ekstraksi bahan aktif dari kelapa sawit untuk pangan dan <i>chemical</i>
		Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum	Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum
			Pengembangan pilot plant kimia organik dengan teknologi lokal
6	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam		Pengembangan pilot plant resin plastik
			Teknologi konversi gas ke olefin
			Pengembangan katalis untuk produksi kimia organik
		Teknologi Produksi Alumina <i>Chemical Grade</i>	Teknologi Produksi Alumina: Bayer (CGA)
6	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Teknologi Produksi Alumina <i>Smelter Grade</i>	Teknologi Produksi Alumina: Bayer (SGA)
			Teknologi Smelter Aluminium: Hall-Heroult

No.	Jenis Industri	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
		Teknologi produksi silika murni	Teknologi produksi silika murni
		Teknologi produksi timah murni	Teknologi produksi alloy timah

8. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri

Pengembangan, pemanfaatan kreativitas dan inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan kreatifitas dan inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk-produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun program pengembangan kreativitas dan inovasi industri tahun 2017–2037 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.14 Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2017-2037

No.	Program	Rincian
1.	Penyediaan Pusat Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	Pembangunan <i>technopark</i>
		Pembangunan pusat animasi
		Pembangunan pusat inovasi
2.	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong
		Pembangunan UPT
		Bantuan desain dan tenaga ahli
		Fasilitasi pembiayaan
3.	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	Pelatihan desain dan teknologi
		Bantuan tenaga ahli
		Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional

No.	Program	Rincian
		Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI
4.	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri
		Pengembangan produk " <i>branded</i> " Gorontalo
		Promosi dan pameran di dalam negeri
		Promosi dan pameran di luar negeri
5.	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kreatif di Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri
		Kerja sama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.)

9. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuhkan-kembangkan iklim industri secara berkelanjutan. Program penyediaan sumber pembiayaan industri tahun 2015-2035 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.15 Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2017-2037

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
1.	Fasilitasi dan insentif PMDN (miliar Rupiah)	456	2303
2.	Fasilitasi dan insentif PMA (juta dolar)	316	1595
3.	Hubungan kerja sama dengan bank	Fasilitasi kerja sama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/bank	
4.	Pendidikan manajemen keuangan	Bimbingan/pelatihan manajemen finansial	

10. Kerja Sama Antarlembaga dan Antarpemerintah Daerah

Kerja sama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antarpemerintah daerah dalam pengembangan industri dilaksanakan untuk menunjang perkuatan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Tabel 7.16 Program Peningkatan Kerja Sama Tahun 2017-2037

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
1.	Kerja Sama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Riset laboratorium dan publikasi ilmiah	Pembuatan paten
2.	Kerja Sama dengan SKPD terkait dalam Pengembangan Komoditi Industri Unggulan	Kajian bersama pengembangan komoditi industri unggulan	
3.	Kerja Sama Pemasaran dengan Provinsi lain	Pengadaan pameran dan pusat promosi	
4.	Kerja Sama Pemasaran dengan Negara lain, terutama ASEAN, Singapura	Pengadaan pameran dan pusat promosi	Fasilitasi kemudahan ekspor

11. Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan selanjutnya pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan maupun anggaran. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Berikutnya, penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah laju pengembangan perluasan usaha dan dapat mempercepat pertumbuhan investasi.

Tabel 7.17 Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri Tahun 2017 – 2037

No.	Program
1.	Penyederhanaan proses perizinan
2.	Pengembangan insentif fiskal
3.	Penyederhanakan prosedur izin ekspor dan fasilitasi izin ekspor
4.	Peningkatan pendapatan pajak daerah

E. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, ketersediaan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, sarana transportasi, sistem informasi industri dan infrastruktur penunjang standarisasi industri.

1. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan

dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi.

Tabel 7.18 Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2017-2037

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
1.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu	
		2. Peningkatan Pengendalian Bencana Banjir dan Abrasi Pantai	
		3. Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa	
2.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPA di Bintan	Daur ulang limbah untuk bahan yang berguna
		Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	Konsepsi dan sosialisasi industri hijau	Audit PROPER
4.	Sosialisasi Berkala Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha Pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media	

2. Pengelolaan Lahan

Dalam penyediaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW daerah sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar.

Tabel 7.19 Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2017 – 2037

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2027-2037
1.	Penetapan kawasan pengembangan industri	Penyusunan <i>Master Plan</i> Kawasan Pengembangan Industri Pembebasan lahan KI	
2.	Keterbukaan informasi dan regulasi lahan industri	1. Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku 2. Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	
3.	Pemanfaatan lahan industri tepat guna	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	

3. Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri dilakukan secara terintegrasi. Rasio elektrifikasi untuk Wilayah Gorontalo berdasarkan data 2015 yaitu 79.18%, artinya masih terdapat 20,82% yang belum terelektifikasi, oleh karena itu PLN sedang merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik 2015-2019 antara lain untuk Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara 4,159 MW dengan jumlah pembangkit yaitu 83 dengan nilai investasi 4, 433 juta dolar, dan 7.207 kms dengan dukungan 90 transmisi dengan nilai investasi \$ 1.169 selanjutnya PLN sedang merencanakan di wilayah yang sama yaitu 5.620 MVA dengan dukungan 165 gardu induk dengan nilai investasi \$ 412. Selanjutnya proyeksi kebutuhan energi

sektor industri hasil keluaran model LEAP merupakan hasil perkalian dari intensitas energi dan jumlah industri dari masing-masing kelompok industri. Pertumbuhan industri dari masing-masing kelompok industri diperkirakan berdasarkan pertumbuhan PDRB per sektor, pertumbuhan konsumsi BBM dan LPG di sektor industri dan pertumbuhan listrik terjual ke industri.

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Gorontalo diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 13,1% tahun 2015 dan untuk proyeksi pertahun dalam periode 20 tahun ke depan dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 7,3%. Berdasarkan proyeksi tersebut kebutuhan listrik yang mencapai 754 GWh pada tahun 2015 akan meningkat hingga 5.353 GWh pada tahun 2035. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka diperlukan penambahan kapasitas sebesar 214 MW pada periode tahun 2017-2027 dan penambahan kapasitas selanjutnya sebesar 692 MW pada periode 2025-2035.

Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas pendukung industri ini juga akan terkait langsung dengan instansi terkait seperti PLN, PDAM maupun Telkom sehingga diperlukan kerja sama/koordinasi terpadu.

Tabel 7.20 Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Tahun 2015-2035

No. Program		Tahun	
		2017-2027	2027-2037
Pembangunan Jaringan Listrik			
1.	Pengembangan Pembangkit Listrik	Tambahan 214 MW	Tambahan 692 MW
2.	Pengembangan Gardu Induk	Kapasitas Total 360 MVA	
3.	Pembangunan SUTT	150 kV	
4.	Perluasan Jaringan Distribusi	Sambungan pelanggan baru	
Pembangunan Jaringan Air			
1.	Pembangunan Tampung Air Baku Waduk	Waduk Dumbaya Bulan Suwawa Kab. Bone Bolango	
2.	Pembangunan Tampung Air Baku Waduk	Waduk Bulango Kab. Bone Bolango	
3.	Pembangunan DAM	DAM Sungai Bone, Sungai Bolango, Sungai Randangan, Sungai Tangkobu	
4.	Peningkatan Persentase Cakupan Layanan	900 sambungan baru	4500 sambungan baru
Pembangunan Jaringan Telekomunikasi			
1.	Pengembangan Jaringan	Jaringan Mikro Digital	
		Jaringan Serat Optik	
		Jaringan Mikro Analog	

4. Transportasi (Darat, Laut dan Udara)

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara merupakan bagian utilitas industri dan merupakan sarana yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan alur proses komoditi industri.

Tabel 7.21 Program Pengembangan Transportasi Tahun 2015 - 2035

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2028-2037
1.	Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara	Bandara Djalaludin Gorontalo menjadi Bandara Transit Hadji	
2.	Pembangunan bandara	Bandara Perintis Randangan Kab. Pohuwato	
3.	Peningkatan pembangunan pelabuhan/dermaga penyeberangan antar pulau	Pengembangan dan pembangunan pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Marisa dan Pelabuhan Gorontalo	
4.	Pembangunan jembatan dengan kapasitas lebih tinggi	Talu Molo, Dumbaya Bulan, Lomaya, Tangkobu	
5.	Penyediaan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP	Pembangunan jalan Gorontalo <i>Outo Ring Road</i> (GOR)	Pembangunan Jalan Tol Kota Gorontalo-Bandara Djalaluddin dan Jalan Toll Gorontalo Manado
6.	Penyediaan angkutan darat yang murah dan efisien	Pengembangan KA dan BRT Gorontalo-Manado dan Bitung	
7.	Peningkatan jaringan jalan	1. Pemeliharaan jalan-jalan eksisting 2. Percepatan pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)	

5. Sistem Informasi Industri

Penyediaan *software* dan *hardware* sistem informasi industri merupakan bagian utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan

penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 7.22 Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri Tahun 2015-2035

Program	Tahun	
	2017-2027	2028-2037
Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian	Sistem informasi prosedur investasi pada pelayanan terpadu perizinan dan penanaman modal	Sistem pelayanan perizinan secara <i>online</i>
	Informasi potensi investasi sektor industri	
	<i>Update berkala</i>	

6. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri
 Penyediaan infrastruktur penunjang standarisasi industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 7.23 Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri Tahun 2015-2035

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2028-2037
1.	Pengembangan standarisasi industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun nonfiskal	
		Penentuan standarisasi industri dan kerja sama penerapan standarisasi industri	
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian moto produk industri dengan kebutuhan	Pengembangan lembaga penilai kesesuaian	
		Pengembangan pengawasan standar	

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2028-2037
	permintaan dan pasar	Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri	
		Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya laboratorium produk hasil industri	

F. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)

Keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) yang keberadaan dan perkembangannya tersebar diseluruh wilayah dan mayoritas diusahakan oleh masyarakat luas menjadikan IKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan IKM agar secara proses dapat bertumbuh dan bergerak menjadi industri menengah besar perlu diusahakan oleh pemerintah, swasta dan *stakeholders* lainnya melalui kegiatan pemberdayaan IKM. Program pemberdayaan IKM tahun 2015-2035 dapat dilihat pada tabel 7.24 berikut.

Tabel 7.24 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2015-2035

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2028-2037
1.	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor
2.	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui <i>standardisasi</i> , <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama
3.	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	Pemberian bantuan (mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong) dan bimbingan bagi IKM	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM
4.	Hubungan kerja sama	Kerja sama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan	Kerja sama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi

No.	Program	Tahun	
		2017-2027	2028-2037
		Pengembangan linkage dengan IBS (kerja sama produksi: IKM menjadi pemasok IBS)	

G. Urgensi Industrialisasi Sektor Pertanian (UMKM) dalam Menurunkan Kemiskinan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi hasil dari nilai prediksi industri kecil menengah (IKM) olahan pangan atas jumlah IKM olahan pangan terhadap nilai prediksi kemiskinan atas industri kecil menengah (IKM) olahan pangan. Sarwono (2007: 21) mengatakan bahwa hasil positif atau negatif hanya menunjukkan arah bukan menunjukkan jumlah. Adapun hasil pengujian hipotesis dijabarkan pada berikut.

Tabel 7.25 Hasil Pengujian Hipotesis

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/29/22 Time: 07:46

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 17

Total pool (balanced) observations: 85

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	58.09501	6.325014	9.184961	0.0000
PDRB_P?	-1.476617	1.594905	-0.925834	0.3579
IKM_P?	-6.350759	1.594612	-3.982636	0.0002
Fixed Effects (Cross)				
_BOLSEL--C	-21.79622			
_BOLTIM--C	-21.82853			
_MITENG--C	-2.036611			
_MINAHASA--C	4.367667			
_MINUT--C	5.543499			
_BITUNG--C	11.86572			

_BANGLA--C	-6.682852
_BANGKEP--C	-5.847751
_BANGGAI--C	15.88216
_TOUNA--C	6.805046
_POSO--C	-1.908605
_PARIMO--C	6.494444
_POHUWATO--C	6.431982
_BOALEMO--C	-1.051893
_KABGOR--C	10.02708
_BONBOL--C	2.196604
_KOTAGOR--C	-8.461743

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.992044	Mean dependent var	27.67721
Adjusted R-squared	0.989874	S.D. dependent var	14.20101
S.E. of regression	1.218885	Sum squared resid	98.05492
F-statistic	457.2046	Durbin-Watson stat	1.232136
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Pengolahan Data Eviews Versi 9, 2022

Berdasarkan hasil pada tabel di atas maka dapat dijabarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan besarnya koefisien determinasi atau angka *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,989874. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 98,987% variabilitas kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini dapat dijelaskan oleh PDRB sektor pertanian dan industri kecil menengah (IKM) olahan pangan. Sedangkan sisanya sebesar 1,013% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti

jumlah penduduk, pendapatan perkapita, pembangunan pemerintah, investasi dan kebijakan stimulus kemiskinan pemerintah pusat. Pengaruh yang besar ini karena sumbangan penduduk miskin di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini yakni pada penduduk dengan pekerjaan sebagai petani, peternak dan nelayan.

2. Hasil Pengujian Serempak

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai F_{hitung} sebesar 457,2046 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga hipotesis diterima. Artinya PDRB sektor pertanian dan industri kecil menengah (IKM) olahan pangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut sangat perlu untuk dioptimalkan agar tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini menjadi menurun.

3. Pengujian Parsial

a. Pengaruh PDRB sektor pertanian terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi PDRB sektor pertanian lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,3579 < 0,05$). Sehingga PDRB sektor pertanian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini. Hasil koefisien negatif bermakna bahwa semakin tinggi nilai PDRB sektor pertanian di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini maka akan semakin baik

dampak dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah yang dalam hal ini akan mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini.

b. Pengaruh Industri Kecil Menengah (IKM) Olahan Pangan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini

Berdasarkan analisis diperoleh nilai signifikansi Industri kecil menengah (IKM) olahan pangan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai $(0,0002 < 0,05)$. Sehingga industri kecil menengah (IKM) olahan pangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini. Hasil koefisien negatif bermakna bahwa semakin banyak jumlah IKM olahan pangan yang beroperasi di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini (kabupaten/kota) maka akan mampu meningkatkan atau mengoptimalkan pengembangan ekonomi yang terlihat dari keberhasilan pemerintah mereduksi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini.

c. Perbandingan Hasil Tiap Kabupaten/Kota

Penelitian ini menggunakan model *fixed* sehingga dalam penelitian ini terdapat nilai-nilai konstanta dari tiap di kabupaten/kota Kawasan Teluk Tomini. Hasil pada tabel di atas diperoleh konstanta yang terbaik yakni pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimana Kabupaten tersebut akan tetap mengalami penurunan kemiskinan sebesar 21,828% meskipun tidak memaksimalkan capaian dari PDRB sektor

pertanian dan industri kecil menengah (IKM) olahan pangan, sebagai contoh pada tahun 2021 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki nilai kemiskinan sebesar 4,97% yang kemudian bisa saja turun menjadi 3,91%. Sementara itu kabupaten/kota di Kawasan Teluk Tomini yang kurang optimal yakni pada Kabupaten Banggai dan Kabupaten Gorontalo yang sangat bergantung pada industrialisasi dan pertanian ketika ingin menurunkan kemiskinan menjadi lebih kecil.

H. Pemetaan UMKM di Provinsi Gorontalo yang Berada di Kawasan Teluk Tomini

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Perkembangan UMKM di tiap kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat dari tingkat keunggulannya (LQ) yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.26 Rangkuman Keunggulan UMKM

Daerah	UMKM				
	Pangan	Sandang	Kimia dan Bahan Bangunan	Logam dan Elektronika	Kerajinan
KOTA	0.742	1.418	0.993	0.957	0.756
	Bukan Basis	Basis	Bukan Basis	Bukan Basis	Bukan Basis
KGTLO	1.363	0.687	0.676	1.105	0.973
	Basis	Bukan Basis	Bukan Basis	Basis	Bukan Basis
BLMO	1.053	0.000	1.055	1.770	1.124
	Basis	Bukan Basis	Basis	Basis	Basis
PHWT	0.881	0.998	1.336	0.979	0.789

	Bukan Basis	Bukan Basis	Basis	Bukan Basis	Bukan Basis
BNBL	1.173	0.986	0.857	0.909	1.222
	Basis	Bukan Basis	Bukan Basis	Bukan Basis	Basis
GORUT	1.172	0.860	1.221	0.910	1.042
	Basis	Bukan Basis	Basis	Bukan Basis	Basis

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa pada Kota Gorontalo sandang atau pakaian menjadi basis. Hal ini karena makin menjamurnya usaha-usaha toko pakaian di Kota Gorontalo bahkan beberapa usaha mengalami progres peningkatan usaha yang makin signifikan. Sementara untuk 4 jenis lainnya yakni pangan, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika serta kerajinan masuk dalam kategori bukan basis (bukan sektor unggulan) terutama untuk pangan dengan nilai terendah yang berarti bahwa banyaknya produk UMKM di Kota Gorontalo bukan berasal dari dalam Kota Gorontalo melainkan dari luar Kota Gorontalo yang dipasarkan di Kota Gorontalo. Kemudian di Kabupaten Gorontalo UMKM olahan pangan dan logam dan elektronika menjadi basis serta sandang serta kimia dan bahan bangunan, serta UMKM kerajinan bukan basis, dimana hal tersebut terjadi karena usaha-usaha pakaian di Kabupaten Gorontalo cenderung stagnan bahkan mati karena masyarakat lebih suka berbelanja di Kota Gorontalo atau bahkan melakukan pemesanan secara *online* dengan model dan bahan yang lebih baik, sementara untuk kimia dan bahan bangunan bukan masuk basis karena memang usaha jenis ini belum banyak dilakoni oleh masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Kemudian kerajinan bukan basis karena masuknya usaha-usaha kerajinan seperti

ACE informa dan jasa titip berbagai *furniture* dari luar Gorontalo yang sudah banyak digeluti oleh masyarakat Gorontalo.

Pada Kabupaten Boalemo ditemukan bahwa UMKM yang masuk dalam kategori unggul atau basis yakni olahan pangan, logam dan elektronika, kimia dan bahan bangunan serta kerajinan. Dari keempat jenis UMKM tersebut UMKM logam dan elektronika yang paling tinggi nilainya dimana usaha ini banyak digeluti oleh masyarakat Wonosari dan Paguyaman. Meskipun memiliki nilai tertinggi namun UMKM logam dan elektronika pada tahun 2019 mengalami penurunan nilai hingga masuk dalam kategori tidak unggul. Kemudian disusul oleh UMKM kerajinan yang merupakan UMKM yang konsisten menjadi basis pada masyarakat Kabupaten Boalemo. Serta UMKM olahan pangan yang cenderung kurang stabil namun pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan yang membuat UMKM olahan pangan banyak digeluti oleh masyarakat. Sementara sandang bukanlah UMKM yang unggul karena banyak pelaku usaha yang cenderung coba-coba sehingga tidak mengurus perizinan UMKM di Kabupaten Boalemo. Pada Kabupaten Pohuwato hanya terdapat 1 UMKM yang menjadi basis yakni UMKM kimia dan bahan bangunan. Sementara usaha lainnya yang tidak masuk basis karena Kabupaten Pohuwato menjadi salah satu Kabupaten yang terjauh dengan pusat ibu kota provinsi sehingga bahan baku agak lebih mahal dan pangsa pasar yang kurang progresif dalam peningkatan pendapatan bagi para pelaku UMKM.

Kabupaten Bone Bolango memiliki 2 jenis UMKM yang menjadi basis yakni UMKM olahan pangan dan kerajinan. Hal ini terjadi karena Kabupaten Bone Bolango dekat dengan pusat kota sehingga pangsa pasar yang baik ini akan memudahkan dalam melakukan operasional penjualan yang akan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku UMKM pangan dan kerajinan. Kemudian UMKM yang bukan merupakan basis sebanyak 3 jenis UMKM yakni sandang, kimia dan bahan bangunan, serta logam dan elektronika. Hal ini karena ketiga jenis UMKM ini memiliki biaya bahan baku yang besar dan banyaknya usaha sejenis di Kota Gorontalo yang berasal dari luar Gorontalo dengan harga yang cukup bersaing.

Kemudian pada Kabupaten Gorontalo Utara ditemukan bahwa terdapat 3 jenis UMKM yang menjadi basis atau unggul yakni UMKM olahan pangan, kimia dan bahan bangunan serta kerajinan. Pada olahan pangan menjadi basis karena banyaknya tersedia bahan baku yang bisa digunakan untuk produk olahan pangan, begitupun dengan kimia dan bahan bangunan yang dalam hal ini Kabupaten Gorontalo menjadi kabupaten yang masih sangat butuh pembangunan serta untuk kerajinan di Kabupaten Gorontalo Utara tersedianya bahan bangunan dan pangsa pasar di 2 provinsi tetangga yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kemudian untuk jenis UMKM yang tidak menjadi basis atau bukan unggulan yakni UMKM yakni sandang serta logam dan elektronika karena beberapa UMKM jenis ini pernah ada namun tutup kembali karena kurangnya

permintaan serta untuk sandang, masyarakat masih lebih suka berbelanja di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian mengenai keunggulan atas UMKM di tiap kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.27 Rangkuman LQ_{Share} dan LQ_{Shift} UMKM

No.	Daerah	UMKM				
		Pangan	Sandang	Kimia dan Bahan Bangunan	Logam dan Elektronika	Kerajinan
1.	KOTA	0.693 & 0.968 Mundur	1.521 & 1.825 Progresif	0.930 & 0.739 Mundur	0.869 & 0.311 Mundur	0.948 & 0.336 Mundur
2.	KGTLO	2.266 & 12.616 Progresif	0.430 & 0.851 Mundur	0.593 & 2.346 Berkembang	1.012 & 2.762 Progresif	0.879 & 4.296 Berkembang
3.	BLMO	1.139 & 1.551 Progresif	0.000 & 0.000 Mundur	1.134 & 0.333 Lamban	1.489 & 5.073 Progresif	1.219 & 0.727 Lamban
4.	PHWT	0.873 & 4.914 Berkembang	0.790 & 0.380 Mundur	1.569 & 1.556 Progresif	0.929 & 8.348 Berkembang	0.839 & 1.710 Berkembang
5.	BNBL	1.162 & 2.552 Progresif	0.975 & 0.588 Mundur	0.998 & 0.796 Mundur	0.863 & 1.157 Berkembang	1.050 & 1.185 Progresif
6.	GORUT	1.157 & 2.408 Progresif	0.967 & 0.547 Mundur	1.019 & 1.067 Progresif	0.859 & 1.071 Berkembang	1.045 & 1.123 Progresif

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa UMKM olahan pangan menjadi UMKM yang sangat berpeluang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekonomi wilayah. Untuk itu, perlu dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) olahan pangan, sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga diluar daerah dan semakin berkembang. Apalagi jika didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Serta tidak hanya dari pemerintah saja melainkan partisipasi dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru

bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi dari masyarakat memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki potensi yang beragam di tiap Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Pada jenis UMKM olahan pangan hasilnya progresif pada Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM olahan pangan sangatlah bergantung pada bahan baku karena pada daerah dengan ketersediaan bahan baku yang memadai maka akan membuat biaya dalam proses produksi lebih efisien yang tentu akan meningkatkan permintaan atas produk olahan pangan dengan harga bersaing dan implikasinya akhirnya pada pendapatan pelaku usaha UMKM dan peningkatan ekonomi di wilayah (Kabupaten/kota) tempat operasional UMKM olahan pangan. Hasil yang cenderung progresif ini karena UMKM olahan pangan merupakan usaha yang relatif murah dalam memulai (modal kecil bisa melakukan operasional).

UMKM sandang progresif hanya pada Kota Gorontalo. UMKM kimia dan bahan bangunan hanya progresif pada Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. UMKM logam dan elektronika memiliki kategori progresif pada Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Kemudian untuk UMKM kerajinan hanya progresif pada Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini

menunjukkan bahwa UMKM lainnya mulai memberikan kontribusi bagi ekonomi Gorontalo namun masih perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan tiap-tiap Kabupaten/kota.

Glosarium

- Daya Saing** : Indikator yang membandingkan kemampuan dan kinerja kelembagaan ekonomi dan rumah tangga perusahaan yang lebih baik yang terus didorong oleh penciptaan nilai tambah ekonomi yang tumbuh berkelanjutan.
- Perencanaan Pembangunan** : Proses yang memiliki tantangan pada pembangunan berkelanjutan termasuk alat dan teknik juga analisis berkelanjutan pada kondisi dan jarak pembangunan nasional dan daerah sebagai respons atas tujuan dan strategi dan kerangka kerja pembangunan.
- Ekonomi Pembangunan** : Bagian dari Ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan makro ekonomi dan bagaimana melakukan agribisnis terhadap sektor dan sub-sektor ekonomi

baik yang berkaitan dengan pengukuran kinerja ekonomi dari aspek permintaan (*demand*) dan dari aspek penawaran (*supply*) dengan indikator output adalah PDB dan PDRB.

Sektor Unggulan : Sektor yang mampu menarik sektor-sektor lain baik dari aspek manfaat komparatif dan manfaat kompetitif dan mendorong pertumbuhan serta menjadi pengganda ekonomi wilayah atas dasar hasil parameter pemetaan wilayah serta memiliki ketangguhan dan keterandalan (*reliable*).

Faktor Produksi Lahan

: Bagian dari faktor-faktor produksi yang memiliki dampak strategis dalam redistribusi lahan kepada masyarakat terutama lahan pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar pada output ekonomi pada produk domestik bruto (PDB) dan produk

- domestic regional bruto (PDRB) dibandingkan dengan faktor produksi lain.
- Penguasaan Lahan** : Persentase dari hasil pemetaan lahan yang di manfaatkan (digarap) atau diolah dalam terapan usahatani dengan menempatkan objek lahan yang dikuasai baik sebagai penggarap, milik sendiri, petani penyewa ataupun petani penyakap.
- Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi** : Pemikiran yang matang dan andal dalam mencermati kesesuaian teori ekonomi normative positif maupun pandangan sosialis dan mainstream karena adanya fakta pembangunan ekonomi yang bersifat anomali sehingga menuntut temuan baru (Novelty) dalam merekonstruksi pemikiran pembangunan ekonomi saat ini dan dimasa yang akan datang.

Kemiskinan : Amartya Sen (Peraih Nobel Ekonomi) mencermati kemiskinan dari multi dimensi. Maksudnya adalah bukan hanya faktor pendapatan namun lebih utama adalah ketidak-mampuan memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian dan tempat tinggal) juga pendidikan dan kesehatan ataupun keterbatasan/sulit memperoleh akses terhadap komponen di atas.

**Daya Saing
Sumber daya
Manusia** : Faktor produksi yang diukur dari indikator keahlian dan spesifikasi yang mendalam dan juga tangguh pada berbagai aktivitas ekonomi baik personal maupun institutional dalam kerangka jangka menengah dan panjang sehingga bebas dari ketergantungan pada daya saing komparatif

- disuatu wilayah (regional), nasional dan international.
- Modal Manusia** : Seperangkat kemampuan seseorang mencakup kebiasaan, keahlian, pengetahuan, keterampilan, status sosial, kepribadian dan interaksi (silaturahmi) baik secara vertikal (Tuhan YME, Allah SWT), Horizontal dengan manusia dan alam sekitar sehingga mampu menghidupi dirinya secara paripurna.
- Indeks Pembangunan Manusia** : Ukuran utama seberapa jauh/maju suatu negara dengan indicator perbandingan dan ukuran beberapa komponen: harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup sekaligus sejauh mana masyarakat mendapatkan akses pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.
- Nilai Tukar** : Kesepakatan yang dibangun oleh dua pihak yang berada di wilayah

atau negara yang berbeda dalam melakukan aktivitas pertukaran barang dan atau perdagangan dengan perjanjian pertukaran tersebut dengan nilai tertentu baik hari ini maupun masa yang akan datang.

Nilai Tukar Petani : formulasi yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan rasio antara harga yang diterima oleh petani (it) dan indeks harga yang dibayarkan petani (ib) dengan menggunakan beberapa formula antara lain *laspeyres indeks* dengan asumsi bahwa petani menjadi produsen dan menjual produk/ barang yang ditawarkan dan juga petani sebagai konsumen untuk membeli produk/barang dan jasa sebagai bagian dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh petani. Selanjutnya bila $NTP > 100$ yakni rata-rata tingkat harga yang petani terima

mengalami kenaikan, bila $NTP = 100$ yakni tingkat harga komoditas yang dijual petani sama dengan harga barang atau jasa yang di beli oleh petani, dan bila $NTP < 100$ yakni petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan disaat harga yang petani bayar mengalami kenaikan.

Fiskal Pertanian : Pendapatan suatu negara dan dianggap oleh pemerintah sebagai anggaran yang akan membiayai berbagai macam program pembangunan ekonomi termasuk program pembangunan pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan *output* nasional dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) sebagai bentuk pengukuran kinerja ekonomi nasional.

Daya Saing UMKM : Keandalan usaha mikro, kecil dan menengah untuk terus meningkat pertumbuhan usaha diantara

eksisting usaha yang sejenis untuk merebut dan memperkuat pasar konsumen baik pada skala regional, nasional dan internasional dengan tetap menumbuhkan inovasi dan meningkatkan layanan purna jual dengan prinsip-prinsip tumbuh berkelanjutan.

Ekosistem Ekonmi : Akumulasi dan perekat keterkaitan sistem yang mendorong rantai pasok ekonomi kreatif dalam kerangka produksi, distribusi, konsumsi dan *sales after service* dengan target pemberian nilai tambah produk yang terlindungi, dapat diakses sehingga berdaya saing tinggi.

Ekosistem Industri UMKM : Keterkaitan antara rantai nilai produksi dengan ekonomi kreatif yang mampu memberikan nilai manfaat yang tinggi pada skala usaha perorangan dan industri rumah tangga

yang tumbuh berkelanjutan secara inklusif dan mampu mengakses dan meyakinkan kelembagaan keuangan lewat inovasi dan kreasi produksi dalam menopang usaha dan menjadi bentuk adopsi baru bagi usaha-usaha dengan yang sama lainnya.

Daftar Pustaka

- Akhmad, A., Noer A. A., Mangara, T., dan Sumedi A. M., (2013). *Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Agribisnis* 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.15408/aj.v7i1.5167>
- Amir, A. (2007). *Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Era*. Bogor: Bografikan.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Provinsi Gorontalo*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Gorontalo dalam Angka 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Gorontalo.
- Bhegawati, D. A. S. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Total, dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Bali*. *Widya Amerta*. 6(1). 35-53. <http://dx.doi.org/10.37637/wa.v6i1.317>.
- Blanchard, O. (2006). *Macroeconomic 4 Edition*. Pearson Prentice Hall: New Jersey.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Brodjonegoro, S. S. (2004). *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HELTS) Mewujudkan perguruan Tinggi Berkualitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi.

- Bustanil, A., dan Walter, F. P. (2006). *Artikel pelajaran dari Kebijakan Pangan di Indonesia*. Globalisasi. Persada Bogor: Biografika Puri Matahari
- Bush, T., dan Coleman M. (2006). *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Chenery, B. (1971). *Growth and Structure Change International Monetary Fund. Jurnal Finance & Development* 8 (003). 16-27. <https://doi.org/10.5089/9781616353049.022>
- Desoto, H. (2006). *The Mystery of Capital. Rahasia Kejayaan Kapital Barat*. Penerbit: Qalam Pres.
- Dinda, J. (2016). *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Forester, J. (1989). *Planning in The Face of Power*. University of California Press.
- Forester, J. (1993). *Understanding Planning Practice: An Empirical, Practical and Normative Account*. in John Forester, *Critical Theory, Public Policy, and Planning Practice*, Albany. NY: State University of New York Press, pp. 15-35, 165.
- Glasson, J. (2001). *Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Healy, H. (1996). *Review of Handbook of Memory Disorder, First published: November 1996*. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1077\(199611\)11:6<526::AID-HUP843>3.0.CO;2-F](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1077(199611)11:6<526::AID-HUP843>3.0.CO;2-F)
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Society*. Published in Canada by UBC Press.
- Hoc. (1996). *Socio Economic Development of The North-Western Region. Dia Chi: 17 Nguyen Gia Thieu. P.Vo. Thi Sau, Q3*.
- Innes, J. E. (1998). *Information in Communicative Planning. Journal of the American Planning*

- Association. 64(1): 52–63. Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/14730952211043219 journals.sagepub.com/home/plt
- Innes, J. E. (1995). *Planning Theory's Emerging Paradigm: Communicative Action and Interactive Practice*. Judith E. Innes View all authors and affiliations. 14 (3). <https://doi.org/10.1177/0739456X9501400307>
- Irawan, dan Suparmoko. (1990). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jalal, F. (2009). *Evaluasi program dan Capaian Target Kinerja pembangunan Pendidikan Tahun 2008 Bidang Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjen DIKTI Jakarta*.
- Julia, D. (2016). *Dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor pertanian di provinsi Riau*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kunstler. (1996). *Plant functional traits have globally consistent effects on competition*. *Nature* 529, 204–207 (2016). <https://doi.org/10.1038/nature16476>
- Kuntsler, J. H. (1996). *Home from Nowhere*. New York: Simon and Schuster.
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. *The American Economic Review*. 45(1). 1-28.
- Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi kelima. Yogyakarta: UPP. STIM YKPM.
- Manicas, P. T. (2006). *A Realist Philosophy of Social Science: Understanding and Explanation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Manices, P. (2006). *Endogenous growth theory: The most recent "revolution" in economics?* University of Hawai'i at Mānoa, USA.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardikanto, T. (2007). *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kehutanan Republik Indonesia.
- Mazumder, B. (2011, November 11). *Black-white differences in intergenerational economic mobility in the US*. Working Paper, No. 2011-10, Federal Reserve Bank of Chicago. <https://www.chicagofed.org/publications/working-papers/2011/wp-10>
- Mubyarto. (2006). *Artikel Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.
- Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: dalam Perspektif Pembangunan*. Edisi Revisi. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mulyasa, E. (2004). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurul, A. N. (2017). *Analisis Pengaruh Investasi, Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1999-2014 Disusun*. *Journal of Chemical Information and Modelin*. 53(9). 1689-99.
- Oktavia, A., Zulfanetti, dan Yulmardi. (2017). *Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Sumatera*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 12 (2). 49-56.
- Pratomo, S. (2015). *Analisis Peran Sektor Pertanian Sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Boyolali*. (Doktoral Tesis, UNS).
- Rustan, H. U., dan Syarwani, C. (2006). *Analisis LQshift LQshare Untuk Mengukur Dampak Perluasan Kota*

- Terhadap Kinerja Ekonomi Regional (Studi Kasus: Perluasan Kota Manado Terhadap Perekonomian Wilayah Sulawesi Utara). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 17(21). 21-40*
- Rustiadi, E., Saefulhakim S., dan Panuju D.R. (2005). *Transmigrasi dan Pengembangan Wilaya*. Jakarta: Penerbit Gramedia. <https://www.academia.edu/29721276>
- Rustiadi, E., Saefulhakim S., dan Panuju D.R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: Yayasan pustaka Obor Indonesia.
- Sahdan G. (2006). *Artikel Menanggulangi Kemiskinan Desa*.
- Sajogyo P. (1999). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scott, J. (1981). *Moral Ekonomi PETANI pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Shatock, M. (2003). *Managing successful University, Typee; by RefineCatch Limited, Bungay, Suffolk*. UK: Bell & Baint LTD, Glasgow.
- Simanjuntak, M., Yulmardi, dan Bhaki A. (2018). *Pengaruh PDRB Sektor Pertanian, Nilai Tukar Petani dan Investasi Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jambi. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. 7 (1). 1-12. <https://doi.org/10.22437/jels.v7i1.4783>*
- Soebagyo, D. (2017). *Perekonomian Indonesia: Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi dan Kajian Empiris*. Cetakan Pertama Februari. Surakarta: Jasmine.
- Sukirno, S. (2014). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sutjipto. (2005). *Bertolak Menuju Enterpreneurial University*. Universitas Negeri Jakarta.
- Tampubolon, D. P. (2001). *Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, A. A. (2008). *Anatomi organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Warsh, D. (2006). *Knowledge and the Wealth of Nations*. USA: W. W. Norton

Indeks

D

Daya Saing, 84, 139, 185,
266, 269, 274, 289
Daya Saing Sumberdaya,
139
Daya Saing UMKM, 274

E

Ekonomi, 28, 57, 74, 79,
127, 128, 181, 213, 265,
268, 269, 277, 278, 279,
285, 288, 290
Ekonomi Pembangunan,
265, 277, 288
Ekosistem Ekonmi, 275
Ekosistem Industri
UMKM, 185, 275

F

Faktor Produksi Lahan,
267
Fiskal Pertanian, 273

I

Indeks, 59, 60, 61, 70,
131, 153, 160, 161, 271,
283
Indeks Pembangunan,
271

K

Kemiskinan, 62, 64, 65,
70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 79, 253, 256,
257, 269, 278

M

Manusia, 59, 60, 70, 139,
160, 161, 236, 269, 271,
285
Modal Manusia, 270

N

Nilai Tukar, 170, 271,
272
Nilai Tukar Petani, 170,
272

P

Penguasaan Lahan, 267
Perencanaan
Pembangunan, 265,
286

R

Rekonstruksi
Pemikiran, 268

S

Sektor Unggulan, 266,
279

Tentang Penulis



Amir Halid, setelah menyelesaikan studi SMA (sekolah guru olahraga) 1990 hijrah ke Makassar melanjutkan studi. Namun tujuan studi saat itu urung terwujud dan pada tahun 1991 mulai studi di Akademi Bahasa Asing UMI Makassar dan menjadi ketua Senat Mahasiswa ABA UMI 1992-1994 dan telah menyelesaikan studi tahun 1994. Bekerja sebagai pemandu wisata (*english speaking guide*) dan konsultan di beberapa perusahaan multi nasional antara lain PT. Bhanda Gara Reksa (Persero) Cabang Makassar dan PT Ujung Lima (Berdikari Group) (Persero) 1994-1996. Melanjutkan studi S1 Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia 1996 dan menyelesaikan studi 1999. Bekerja sebagai staf pada pusat pengembangan sumber daya manusia Pascasarjana dan mengajar mata kuliah bahasa inggris ekonomi, ekonomi makro, mikro dan keuangan perbankan di Fakultas Ekonomi UMI dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Wirabhakti Makassar Sejak Tahun 2000. Menjadi wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan kerja sama STIE Wirabhakti pada tahun 2001 dan lulus seleksi beasiswa (S2) di Prodi Ilmu Agribisnis Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2001 dan selesai studi S2 tahun 2003. Lulus pada seleksi penerimaan dosen pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Negeri

Gorontalo tahun 2004 dan ditempatkan di Fakultas Pertanian dan menjadi sekretaris pusat studi ilmu pertanian tropis di lembaga penelitian UNG 2005 dan dipercayakan menjadi sekretaris badan pengembangan Universitas Negeri Gorontalo 2005-2007. Berhasil lulus seleksi beasiswa program doktor (S3) di Prodi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor IPB 2007 konsentrasi ekonomi perencanaan dan menyelesaikan studi tahun 2012. Pemenang *runner up* (juara 2) pemilihan dosen berprestasi di UNG 2013. Dibidang organisasi profesi menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cab. Gorontalo selama dua periode 2013-2016 dan 2016-2019 dan menjadi Koordinator ISEI Wilayah Timur Indonesia 2019-2021, selanjutnya menjadi Pengurus ISEI Pusat 2021-2024. Karir di bidang penelitian yakni Pemenang Hibah Penelitian Nasional Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia MP3EI selama 2 periode 2014-2016 dan 2016-2019. Kemudian menjadi Pemenang Hibah Tertinggi pada Skema Penelitian Nasional (Penelitian Unggulan Strategis Nasional) PUSN 2018-2020 di Lembaga Penelitian UNG. Bidang tugas tambahan yakni Ketua Pusat Studi Kelapa UNG 2013 sampai sekarang, koordinator tim peneliti Patriot Pangan Nasional Wilayah 2 Sulawesi (Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara) dan juga sebagai Ketua Jurusan S1 Ilmu Agribisnis Fakultas Pertanian UNG tahun 2013-2015 dan menjadi Ketua Program Studi S2 Ilmu Agribisnis Pascasarjana UNG 2015-2019 dan juga sebagai anggota Senat Fakultas Pertanian dan anggota

Senat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016-2019 dan tahun 2019-2023. Terdapat beberapa buku yang telah berhasil di terbitkan/published yakni: (1) Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan Kebijakan dan Perubahan 2013; (2) Tantangan Pertanian Indonesia Timur dalam Pembangunan Kawasan timur Indonesia 2014; (3) Pengembangan Produk Olahan Jagung sebagai Lokomotif Ekonomi 2014; (4) Pengembangan Profitabilitas Jagung 2014; (5) Model Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Tambang 2017; (5) Pengembangan Komoditas Olahan Produk jagung 2017; (6) Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Indonesia Refleksi Gagasan Kedepan 2018; (7) Potensi Pengembangan Olahan Jagung Bagi Kesejahteraan Masyarakat, 2018; (8) Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Era New Noemal Covid-19 dan Gagasan Kedepan. Karir Akademik yakni meraih gelar guru besar (profesor) di bidang ilmu ekonomi tahun 2019.

Ilmu ekonomi yang bebas nilai dari kontemplasi faktor-faktor produksi menghadapi permasalahan moral dari perspektif ontologis (ontologi keilmuan) jaman dulu , namun saat ini ilmu ekonomi menghadapi masalah dari perspektif aksiologis (aksiologi keilmuan) yakni nilai manfaat dari ilmu pengetahuan yang didapatkan, sehingga menjadi ladang amal.

Penulis

Prof. Dr. Amir Halid., S.E, M.Si.



Irawati Abdul, setelah menyelesaikan studi SMA Negeri 1 Limboto tahun 1993 dan melanjutkan studi S1 di bidang ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samratulanie Manado dan berhasil menyelesaikan studi tahun 1998. Berhasil lulus seleksi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2004 dan ditempatkan di program studi Ilmu Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, dan mendapat tugas menjadi sekretaris Jurusan S1 Pendidikan Ekonomi tahun 2006, dan tahun 2007 lulus seleksi studi S2 Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Samratulanie Manado dan berhasil menyelesaikan studi tahun 2009. Kemudian berhasil lulus seleksi studi program Doktor Ilmu ekonomi di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya 2018 dan berhasil menyelesaikan studi dengan predikat cumlaude tahun 2022. Di bidang Organisasi Profesi menjadi Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cab. Gorontalo selama dua periode 2013-2016 dan 2016-2019 dan menjadi Sekretaris ISEI Wilayah Timur Indonesia 2019-2021. Karir di bidang penelitian yakni Pemenang Hibah Penelitian Nasional Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia MP3EI selama 2 periode 2014-2016 dan 2016-2019 kemudian menjadi Pemenang Hibah Tertinggi pada Skema Penelitian Nasional (Penelitian Unggulan Strategis Nasional) PUSN 2018. bidang tugas tambahan yakni Sekretaris Pusat Studi Kelapa UNG 2013 sampai sekarang,

terdapat beberapa buku yang telah berhasil diterbitkan antara lain: (1) Pengembangan Daya Saing Olahan Jagung; (2) Pengembangan Produk Olahan Jagung Sebagai lokomotif Ekonomi. Tugas tambahan yang sedang di emban adalah Wakil Dekan 1 bidang Akademik pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023. Selain itu aktif menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah lokal dan nasional yang membahas isu-isu ekonomi saat ini.

GDP per kapita di Amerika Serikat jauh lebih tinggi ketimbang di negara maju lainnya karena Amerika Serikat melakukan investasi secara lebih proporsional di bidang ilmu pengetahuan dan penemuan sejak berabad yang lalu, yang menimbulkan inovasi dan kemajuan teknologi berakibat pada pembayar deviden besar dalam bentuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Penulis

Dr. Irawati Abdul, S.E, M.Si.



Tineke Wolok, menyelesaikan studi S1 di Bidang Teknik Industri pada Institut Teknologi Nasional Malang tahun 1992, ikut serta pada kegiatan kemahasiswaan mulai lembaga kemahasiswaan ditingkat himpunan mahasiswa teknik industri sampai

menjadi pengurus senat mahasiswa fakultas teknik dan juga aktif di kegiatan kemahasiswaan daerah antara lain himpunan mahasiswa Indonesia Gorontalo HPMIG cabang Malang. Berhasil menyelesaikan studi Magister Manajemen S2 di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2005. Berhasil lulus seleksi dosen pegawai negeri sipil (PNS) 2006 dan di tempatkan di Jurusan Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian berhasil lulus seleksi studi program doktor ilmu ekonomi di Pascasarjana Universitas Merdeka Malang 2018 dan berhasil menyelesaikan studi tahun 2022. terdapat beberapa penelitian yang telah berhasil di publish antara lain: (1) Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Bank Sinar Mas Cab Gorontalo 2015; (2) Rekonstruksi Model Layanan Akademik Berbasis Quality Assurance di Universitas Negeri Gorontalo 2017. Selanjut terdapat karya ilmiah berupa buku dengan judul *“Green Marketing: Pemasaran dan Pembelian 2019”*.

Penulis

Dr. Tineke Wolok., S.T, M.M.